

LAPORAN KINERJA

**BP BATAM
TAHUN 2025**



**3 SASARAN STRATEGIS
9 INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEBAGAI LAPORAN KE**

**DIREKTUR PPK BLU
DITJEN PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

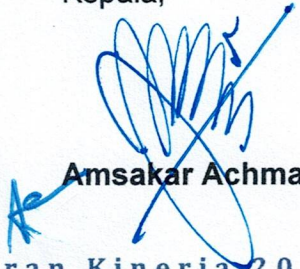
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja BP Batam Tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BP Batam selama Tahun 2025, serta sebagai perwujudan komitmen dalam melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan laporan ini juga mengacu pada Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2025.

Dalam laporan ini disajikan informasi mengenai capaian kinerja BP Batam berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Laporan kinerja ini juga digunakan sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan.

Laporan Kinerja BP Batam Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan bermanfaat bagi seluruh pihak, serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan kinerja BP Batam pada periode berikutnya. Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan BP Batam yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing tinggi.

Batam, Februari 2026
Kepala,


Amsakar Achmad ~

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BP Batam Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Kontrak Kinerja BP Batam Tahun 2025. BP Batam pada tahun 2025 memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan total 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 4 (empat) Target Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 6 target; dan
- 2) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 3 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Kontrak Kinerja BP Batam tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Investasi di KPBPB Batam	1. Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam	Rp60 T	Rp69,30 T	115,50
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perijinan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	87 (Baik)	87,08 (Baik)	100,09
		3. Nilai Realisasi PNPB	Rp1,978 T	Rp1,926 T	97,39
3.	Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	4. Indeks Reformasi Birokrasi	80 (Sangat Baik)	*68,58 (Baik)	85,73
		5. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	80%	100%	125
		6. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu	92%	88,21%	95,88
		7. Peningkatan Nilai Maturity Rating BLU	3,38	3,41	100,89
		8. Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	3,50	4,53	129,29
		9. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	68%	67,68%	100,48
Persentase Capaian Rata-Rata					105,58

Keterangan:

* Nilai 68,58 merupakan hasil evaluasi sementara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang masih dalam tahap masa sanggah dan akan disesuaikan setelah penetapan nilai final.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada Tahun 2025 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama memperoleh capaian rata-rata sebesar 105,58%.

Kinerja keuangan BP Batam tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp1.469.140.851.531,45 atau 70,93% dari total pagu anggaran yang dapat digunakan, yaitu Rp 2.071.397.065.000,00. Capaian kinerja BP Batam diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

CAPAIAN KINERJA BP BATAM TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Investasi di KPBPB Batam	1. Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam	Rp60 T	Rp69,30 T	115,50
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perijinan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	87 (Baik)	87,08 (Baik)	100,09
		3. Nilai Realisasi PNPB	Rp1,978 T	Rp1,926 T	97,39
3.	Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	4. Indeks Reformasi Birokrasi	80 (Sangat Baik)	*68,58 (Baik)	85,73
		5. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	80%	100%	125
		6. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu	92%	88,21%	95,88
		7. Peningkatan Nilai Maturity Rating BLU	3,38	3,41	100,89
		8. Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	3,50	4,53	129,29
		9. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	68%	67,68%	100,48
Persentase Capaian Rata-Rata					105,58

Keterangan:

* Nilai 68,58 merupakan hasil evaluasi sementara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang masih dalam tahap masa sanggah dan akan disesuaikan setelah penetapan nilai final.

Hasil SKM BP Batam Tahun 2025



Amsakar Achmad
Kepala BP Batam

Li Claudia Chandra
Wakil Kepala BP Batam



**Direktorat
Pengelolaan
Kapelabuhan**

90,24
A (Sangat Baik)



**Rumah
Sakit**

89,62
A (Sangat Baik)



**Pusat Pelayanan
Terpadu Satu Pintu**

88,28
B (Baik)



**Direktorat
Pengelolaan Lahan**

88,15
B (Baik)



**Sistem Pengelolaan Air Minum,
Badan Usaha Sistem Pengelolaan
Air Minum Fasilitas dan Lingkungan**

79,11
B (Baik)

Nilai Rata-Rata **87,08 B(Baik)**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Kedudukan Badan Pengusahaan Batam	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	4
D. Struktur Organisasi	6
E. Organisasi Pembina dan Asistensi	7
F. Sumber Daya Manusia	8
G. Mandat dan Peran Strategis BP Batam	9
H. Sistematika Pelaporan	10
BAB II	12
PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
B. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	15
C. Arah Kebijakan dan Strategi BP Batam	22
D. Kontrak Kinerja Tahun 2025	29
E. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	32
BAB III	35
AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2025	35
B. Analisis Capaian Kinerja	37
C. Realisasi Anggaran Tahun 2025	115
BAB IV	118
PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Langkah Peningkatan Kinerja	119
LAMPIRAN	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BP Batam	7
Gambar 2. 1 Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	16
Gambar 2. 2 Tahapan Implementasi RPJPN Tahun 2025-2045.....	17
Gambar 2. 3 Asta Cita.....	18
Gambar 2. 4 Sasaran Pembangunan Nasional	20
Gambar 2. 5 Visi Misi, Program Prioritas Presiden dalam RPJMN.....	21
Gambar 2. 6 Prioritas Nasional 3	22
Gambar 2. 7 Pohon Kinerja (Logical Framework) Badan Pengusahaan Batam.....	28
Gambar 3. 1 Tren Pertumbuhan Realisasi Investasi Tahun 2021-2025.....	42
Gambar 3. 2 Dashboard Investasi	44
Gambar 3. 3 Klinik Investasi Keliling	44
Gambar 3. 4 Duta Investasi.....	45
Gambar 3. 5 Anugerah Investasi	45
Gambar 3. 6 Manajemen Talenta Batam.....	45
Gambar 3. 7 Promosi Investasi.....	46
Gambar 3. 8 Tren Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2020-2025 dan Target Renstra 2029	56
Gambar 3. 9 Tren Pertumbuhan Realisasi PNBPN Tahun 2020 - Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra 2029	74
Gambar 3. 10 Tangkap Layar Nilai Evaluasi Sementara RB pada portal RB Nasional.....	79
Gambar 3. 11 Bimtek Peningkatan Tata Kelola BP Batam melalui Implementasi BIOS dan Strategi Pencapaian Indeks Maturity Rating	89
Gambar 3. 12 Dashboard Penilaian Maturity Rating	96
Gambar 3. 13 Bimtek Peningkatan Tata Kelola BP Batam melalui Implementasi BIOS dan Strategi Pencapaian Indeks Maturity Rating	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data SDM BP Batam	8
Tabel 2. 1 Tabel Target Kinerja Sasaran Strategis BP Batam 2025 – 2029 ..	14
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Kepala BP Batam Tahun 2025	31
Tabel 2. 3 Tabel Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	32
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Kepala BP Batam Tahun 2025	35
Tabel 3. 2 Capaian Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam	39
Tabel 3. 3 Perbandingan capaian Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam	41
Tabel 3. 4 Perbandingan Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam dengan Target Renstra BP Batam	43
Tabel 3. 5 Kriteria Penentuan Nilai SKM	53
Tabel 3. 6 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik BP Batam	53
Tabel 3. 7 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat BP Batam	54
Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik 2023-2025	55
Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada 5 Badan/Unit Usaha BP Batam Tiga Tahun Terakhir	55
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dengan target Renstra BP Batam	56
Tabel 3. 11 Capaian Nilai Realisasi PNPB	70
Tabel 3. 12 Perbandingan Nilai Realisasi PNPB	73
Tabel 3. 13 Perbandingan Nilai Realisasi PNPB dengan Target Renstra BP Batam	74
Tabel 3. 14 Rentang Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	78
Tabel 3. 15 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	79
Tabel 3. 16 Perbandingan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	80
Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi dengan Target Renstra BP Batam	81
Tabel 3. 18 Capaian Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	84
Tabel 3. 19 Uraian Capaian Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	85
Tabel 3. 20 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	86
Tabel 3. 21 Perbandingan Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU dengan Target Renstra BP Batam	87
Tabel 3. 22 Capaian Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu	91
Tabel 3. 23 Uraian Capaian Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu	91

Tabel 3. 24 Perbandingan capaian Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu.....	92
Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu dengan Target Renstra BP Batam	93
Tabel 3. 26 Capaian Peningkatan Nilai Maturity Rating BLU	95
Tabel 3. 27 Perbandingan Capaian Peningkatan Nilai Maturity Rating BLU	98
Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi Nilai Maturity Rating BLU dengan Target Renstra BP Batam.....	99
Tabel 3. 29 Capaian Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	103
Tabel 3. 30 Detail Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	104
Tabel 3. 31 Perbandingan Capaian Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	105
Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU dengan Target Renstra BP Batam	106
Tabel 3. 33 Capaian Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional.....	110
Tabel 3. 34 Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional.....	110
Tabel 3. 35 Perbandingan Capaian Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional.....	111
Tabel 3. 36 Perbandingan Realisasi Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional.....	112
Tabel 3. 37 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum**
- B. Kedudukan Badan Pengusahaan Batam**
- C. Tugas Pokok dan Fungsi**
- D. Struktur Organisasi**
- E. Organisasi Pembina dan Asistensi**
- F. Sumber Daya Manusia**
- G. Mandat dan Peran Strategis BP Batam**
- H. Sistematika Pelaporan**

LAPORAN KINERJA 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BP Batam sebagai institusi publik berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah direncanakan dalam Kontrak Kinerja Kepala BP Batam Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis BP Batam 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BP Batam Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2025-2029. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan kinerja merupakan salah satu dari 4 (empat) komponen utama penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bersama dengan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

AKIP dikembangkan sebagai instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menerapkan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*performance-based management*) untuk menyediakan informasi kinerja yang relevan dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Dalam rangka memastikan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab, penyusunan laporan akuntabilitas setiap akhir tahun menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Selain merupakan bentuk pemenuhan prinsip akuntabilitas publik, penyusunan Laporan Kinerja juga didasarkan pada ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014. Format dan tata cara penyajiannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kontrak Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan indikator dan target kinerja melalui Kontrak Kinerja di awal tahun tidak hanya bertujuan menggambarkan sasaran akhir yang ingin dicapai, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman manajemen dalam mengarahkan upaya terbaik untuk memberikan hasil kinerja yang optimal.

Tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi BP Batam dalam menjalankan mandatnya sebagai pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dinamika ekonomi global, tekanan geopolitik, perubahan regulasi, serta tuntutan peningkatan kualitas layanan publik dan transformasi birokrasi menjadi faktor eksternal dan internal yang menuntut adaptasi cepat dan strategi yang tepat.

Menghadapi kondisi tersebut, BP Batam tetap berkomitmen melaksanakan program prioritas, meningkatkan efektivitas pelayanan, dan memperkuat tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian target yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai instrumen evaluasi berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Melalui dokumen Laporan Kinerja, BP Batam menyampaikan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Kepala BP Batam Tahun 2025. Laporan ini juga menggambarkan kontribusi BP Batam dalam mendukung pencapaian visi pembangunan nasional serta penguatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Batam.

B. Kedudukan Badan Pengusahaan Batam

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) merupakan instansi pemerintah

pusat yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah. Kedudukan BP Batam secara hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan dimaksud, BP Batam berada di bawah pembinaan, pengendalian, dan evaluasi Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Peraturan terbaru tersebut juga mengatur bahwa jabatan Kepala dan Wakil Kepala BP Batam diemban secara *ex officio* oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam. Ketentuan ini bertujuan untuk memperkuat integrasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pengelolaan kawasan, dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan publik serta percepatan pengembangan investasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BP Batam memiliki kewenangan sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset, pelayanan perizinan, dan fasilitasi investasi di dalam kawasan. Kedudukan ini menempatkan BP Batam sebagai entitas strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing kawasan, sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional.

Dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dijalankan oleh BP Batam, Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 7. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan Batam dengan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB Batam sesuai dengan fungsi KPBPB.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Dewan Kawasan tersebut, Badan Pengusahaan Batam menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam;
- b. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di bidang kebijakan strategis dan perizinan;
- c. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan lahan, pesisir, dan reklamasi;
- d. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di bidang investasi dan perusahaan;
- e. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan bandara, pelabuhan, dan lalu lintas barang;
- f. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di bidang pelayanan umum;
- g. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di bidang infrastruktur;
- h. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pengusahaan Batam;
- i. pengelolaan lahan berpedoman pada rencana tata ruang kawasan Batam, Bintan, dan Karimun; dan
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Pengusahaan Batam.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Dewan Kawasan tersebut, Badan Pengusahaan Batam mempunyai kewenangan:

- a. membuat ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

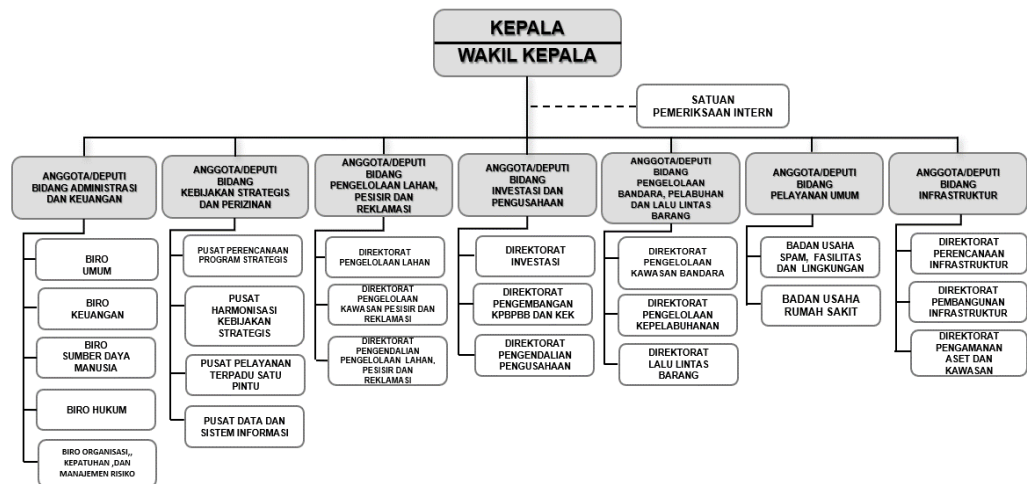
- b. mengeluarkan perizinan berusaha dan izin lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di KPBPB Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membuat peraturan di bidang penetapan tarif atas jasa yang disediakan atau dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan wewenang lain, yang meliputi:
 - 1. melaksanakan pengelolaan dan pembangunan, sesuai dengan fungsi KPBPB;
 - 2. memproses perizinan berusaha dan izin lainnya yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada Badan Pengusahaan Batam;
 - 3. melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - 4. melaksanakan pengelolaan dan perusahaan aset meliputi: administrasi, pengembangan, dan pembinaan;
 - 5. melaksanakan pengelolaan lahan sesuai dengan wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam;
- e. mengelola Pegawai Badan Pengusahaan Batam, yang meliputi:
 - 1. pengadaan;
 - 2. pengangkatan;
 - 3. penempatan;
 - 4. kedudukan;
 - 5. pengembangan;
 - 6. kepangkatan;
 - 7. jabatan;
 - 8. gaji, fasilitas dan/atau tunjangan lainnya; dan
 - 9. penghargaan, sanksi dan pemberhentian.

D. Struktur Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka melalui Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Batam dan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Bawah Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ditetapkan Struktur Organisasi BP Batam adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BP Batam



E. Organisasi Pembina dan Asistensi

Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, penetapan kebijakan umum, pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan Badan Pengusahaan Batam dilakukan oleh Dewan Kawasan yang keanggotaannya terdiri dari:

Ketua merangkap : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Anggota

- Anggota :
1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Perdagangan;
 5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 8. Sekretaris Kabinet;

9. Gubernur Kepulauan Riau;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
11. Walikota Batam.

Dewan Kawasan mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kawasan dapat membentuk Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Teknis.

F. Sumber Daya Manusia

Jumlah data pegawai BP Batam per 31 Desember 2025 sebanyak 2.076 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data SDM BP Batam

I. PIMPINAN	JUMLAH
PNS	2
NON PNS	6
POLRI	0
TNI	0
SUBTOTAL	8
II. PEGAWAI TETAP PNS / POLRI	JUMLAH
PNS PENUGASAN	1.269
POLRI	2
TNI	
SUBTOTAL	1.271
III. PEGAWAI TETAP NON PNS	JUMLAH
NON PNS	512
CAPEG NON	0
SUBTOTAL	512
JUMLAH PEGAWAI TETAP	1.791
IV. PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA (P2K)	JUMLAH
STRUKTURAL	0
P2K PELAKSANA	269
P2K PENGAMANAN KHUSUS	3
TENAGA AHLI	8
STAF KHUSUS	5
JUMLAH PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA (P2K)	285
GRAND TOTAL	2.076

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia BP Batam

G. Mandat dan Peran Strategis BP Batam

Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi khusus kepada BP Batam melalui pertemuan pada tanggal 13 Maret 2025 dan 22 Mei 2025 di Istana Negara Jakarta dan memberikan arahan agar pengembangan Batam mulai dari infrastruktur, perekonomian, hingga kesejahteraan masyarakat dapat digesa untuk meningkatkan daya saing KPBPB Batam. Hal tersebut sejalan dengan upaya Batam untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sesuai RPJMN 2025-2029. Adapun arahan Bapak Presiden yaitu sebagai berikut:

1. Mempercepat simplifikasi perizinan yang transparan dan akuntabel;
2. Melakukan penyelarasan terhadap berbagai regulasi yang dinilai menjadi hambatan bagi percepatan pertumbuhan investasi;
3. Selesaikan persoalan kepemilikan lahan non produktif;
4. Mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan di Rempang dengan tetap menjaga iklim investasi;
5. Optimalisasi sektor strategis seperti Kawasan Industri, galangan kapal, logistik untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional;
6. Jadikan Batam menarik sebagai destinasi investasi;
7. Kembangkan Batam menjadi kota yang indah, nyaman & menarik bagi penduduk serta pekerja; dan
8. Pengelolaan investasi Batam bisa memberikan dampak yang baik terhadap kesejahteraan Masyarakat.

Hal tersebut menjadi pemacu BP Batam sejalan dengan upaya Batam dalam meningkatkan realisasi investasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Batam hingga 10 persen pada 2029. Upaya ini akan diterjemahkan menjadi strategi pembangunan KPBPB Batam yang akan ditempuh dalam tahun 2025 sampai dengan 2029 yaitu:

1. Peningkatan investasi swasta dalam 6 (enam) sektor prioritas: hub logistik internasional, kedirgantaraan, industri ringan dan bernilai tambah, digital dan kreatif, perdagangan internasional dan pusat keuangan, dan wisata kesehatan terpadu;

2. Pengembangan kawasan strategis prioritas di Batam dalam kerangka wilayah penataan dan pengembangan (WPP);
3. Upaya penurunan biaya logistik dalam rangka meningkatkan daya saing;
4. Peningkatan pemanfaatan aset menuju penerimaan yang optimal dalam rangka mendukung pendanaan tugas pengelolaan KPBPB Batam;
5. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta peningkatan pelayanan dari segi kemudahan dan kecepatan berbasis teknologi informasi; dan
6. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan pendukung investasi.

Dengan beberapa strategi pembangunan yang akan ditempuh diharapkan akan memberikan *output/outcome* yang dihasilkan meliputi:

1. Nilai realisasi investasi di KPBPB Batam terakumulasi selama lima tahun sebesar Rp304,9 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 10% pada tahun 2029;
2. Tercapainya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum dan kawasan dengan predikat “sangat baik”;
3. Nilai realisasi PNB BP Batam selama lima tahun sebesar Rp13 triliun; dan
4. Tercapainya indeks reformasi birokrasi dengan predikat AA pada tahun 2029.

H. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta mandat dan peran strategis Badan Pengusahaan Batam.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, serta Kontrak Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2025, serta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas capaian kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2025 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan.

Lampiran:

- 1) Kontrak Kinerja Kepala Badan Pengusahaan Batam Tahun 2025;
- 2) Data pendukung lainnya.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

- A. Rencana Strategis**
- B. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**
- C. Arah Kebijakan dan Strategi BP Batam**
- D. Kontrak Kinerja Tahun 2025**
- E. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025**

LAPORAN KINERJA 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Renstra Strategis BP Batam Tahun 2020-2025 ditetapkan melalui Peraturan Kepala BP Batam Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2025-2029.

Dalam Renstra 2025-2029 disebutkan Visi BP Batam adalah:

“Kawasan ekonomi yang maju dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Adapun visi di atas memiliki arti:

1. BP Batam berperan aktif dalam menarik investasi luar dan dalam negeri pada sektor prioritas untuk mendukung keunggulan dan daya saing dalam rangka memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi regional dan nasional;
2. Maju berarti berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil sehingga memiliki daya saing tinggi di kancah domestik dan global;
3. Berkelanjutan berarti lestari dan seimbang antara pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan; dan
4. BP Batam mendorong peningkatan kinerja kelembagaan agar menjadi institusi yang kredibel dalam pengelolaan KPBPB guna mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah dirumuskan tersebut, maka BP Batam menyelaraskan misinya sebagai berikut:

1. Menjadikan KPBPB Batam sebagai kawasan investasi bernilai tinggi; dan
2. Meningkatkan kinerja kelembagaan yang efektif dan efisien.

Selanjutnya, dalam Renstra BP Batam juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. KPBPB Batam menjadi kawasan investasi yang berdaya saing tinggi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial;
2. Meningkatkan tata kelola kelembagaan BP Batam yang efektif, efisien dan akuntabel.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh BP Batam pada akhir periode Renstra tahun 2029. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, serta target pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tabel Target Kinerja Sasaran Strategis BP Batam 2025 - 2029

Tujuan BP Batam	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1. KPBPB Batam menjadi kawasan investasi yang berdaya saing tinggi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.	1. Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam	1. Nilai realisasi Investasi di KPBPB Batam	Rp	46,29 T	52,31 T	59,56 T	68,23 T	78,56 T
	2. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan dan Pelayanan Umum BP Batam	2. IKM pengguna layanan umum dan kawasan	Indeks	87,5	88	88,5	89	90
		3. Nilai realisasi PNBP BP Batam	Rp	1,99 T	2,44 T	2,64 T	2,84 T	3,07 T
2. Meningkatnya tata kelola kelembagaan BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel.	3. Terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel	4. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB	BB	A	A	AA

Penetapan IKU tersebut telah memenuhi kriteria minimum sebagai indikator kinerja yang baik, antara lain:

- 1) Spesifik dan jelas terhadap hasil atau capaian kinerja (tujuan/sasaran/*outcomes*);
- 2) Keterukuran (*measurability*) dan keterkaitan (*relevance*) terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
- 3) Indikator yang ditetapkan dapat dicapai (*achievable*) oleh organisasi;
- 4) Menggambarkan suatu kinerja yang dicapai dalam kurun waktu tertentu (*timebound*).

Pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Badan Pengusahaan Batam 2025-2029. Renstra yang disusun bersama-sama dengan melibatkan seluruh komponen organisasi, merupakan dasar dari perencanaan dan harus diimplementasikan dalam rangka mencapai Visi dan Misi BP Batam. Penyusunan Renstra pun telah mengikuti pola, berupa tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Cita-cita besar bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 tercermin dalam RPJPN 2025-2045 yang secara menyeluruh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

RPJPN Tahun 2025-2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 memiliki tujuan utama untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045, yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi Agenda Pembangunan yang selanjutnya diturunkan menjadi 17 (tujuh belas) Arah (tujuan) Pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan. Lebih lanjut terdapat 5 (lima)

sasaran visi RPJPN yang terdiri dari: (1) Pendapatan per kapita setara negara maju, (2) Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, (3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, (4) Daya saing sumber daya manusia meningkat, dan (5) Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Gambar 2. 1 Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045



Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025

Pentahapan pembangunan jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Indonesia emas 2045 yang dapat kita lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 2 Tahapan Implementasi RPJPN Tahun 2025-2045



Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025

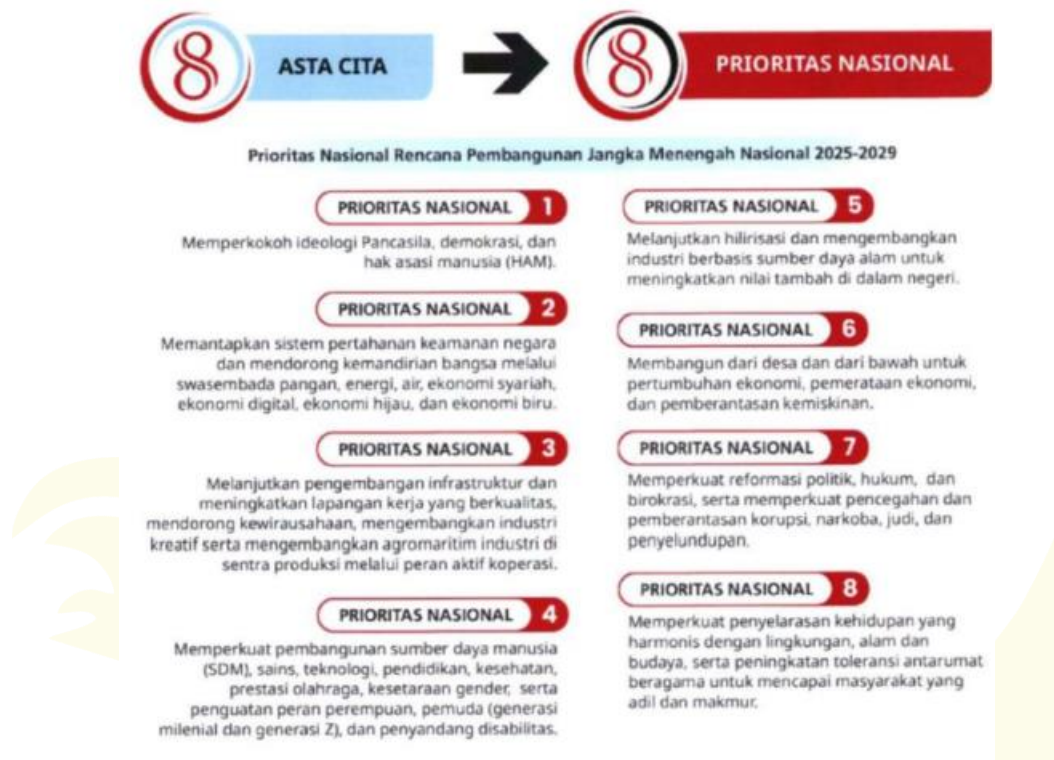
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan tahapan Pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sehingga pencapaian target pada RPJMN ini menjadi titik awal serta penentu keberhasilan pencapaian target RPJPN. Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025- 2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden. Visi Presiden 2025-2029 yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 yaitu:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerjasama putraputri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara Negara Maju di tahun 2045.

Visi tersebut akan dicapai melalui 8 (delapan) Misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita atau menjadi Prioritas Nasional RPJMN 2025- 2029, yaitu:

Gambar 2. 3 Asta Cita



Sumber: UU Nomor 59 Tahun 2024

Selanjutnya Asta Cita akan didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program *Quick Wins*, dan 320 Program Kerja, adapun 17 Program Prioritas yaitu:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;

10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Prioritas pembangunan yang terukur dan tersinergi dengan baik, strategi pembangunan wilayah yang konkret, serta tata kelola dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang kuat menjadi daya ungkit RPJMN Tahun 2025-2029 dalam mencapai sasaran pembangunan. Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada capaian Sasaran Pembangunan Nasional sebagai berikut:

Gambar 2. 4 Sasaran Pembangunan Nasional



Sumber: UU Nomor 59 Tahun 2024

Terdapat 8 program hasil terbaik cepat (*Quick Wins*) dalam RPJMN 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersantitas baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Berikut visual visi, misi, program prioritas, program hasil terbaik cepat, dan program kerja Pembangunan RPJMN 2025-2029:

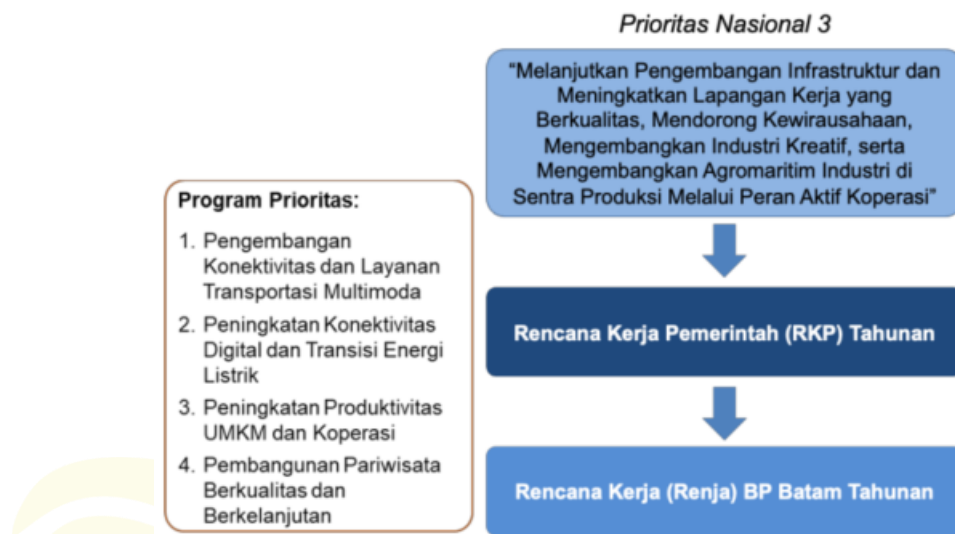
Gambar 2. 5 Visi Misi, Program Prioritas Presiden dalam RPJMN



Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025

Dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, BP Batam melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu nomor 3 yaitu “Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi”. Visualisasi prioritas nasional, program prioritas nasional, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja BP Batam sebagai berikut:

Gambar 2. 6 Prioritas Nasional 3



Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025

C. Arah Kebijakan dan Strategi BP Batam

Pada masa pemerintahan Kabinet Merah Putih 2025-2029, dari 8 (delapan) Misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita atau menjadi Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029. BP Batam melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 3 yaitu "Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi".

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMN utamanya terkait arah pembangunan wilayah Sumatera yang memiliki tema "Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan" dan sebagai upaya kunci untuk mendorong peningkatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di KPBPB Batam telah ditetapkan lokasi prioritas dan *highlight* indikasi intervensi pemerintah diantaranya sebagai berikut:

1. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Batam melalui penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang terintegrasi;
2. Pembangunan Jembatan Batam-Bintan terintegrasi Jalan Tol Batam-Bintan;

3. Pengembangan koridor industri Batam-Bintan-Karimun (sektor industri prioritas: semikonduktor, mesin dan perlengkapan, dirgantara, transportasi laut dan galangan kapal, hilirisasi bauksit, logam, besi, dan baja, industri berteknologi tinggi, industri hijau, dan industri halal);
4. Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil;
5. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Tanjung Pinggir-Jodoh;
6. Pengembangan Kawasan Terpadu Rempang Ecocity;
7. Pengembangan Kawasan Terpadu Galang Maritime City;
8. Pengembangan KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa, KEK Sekupang, KEK Tanjungsauh;
9. Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedangbesa yang ada di KI/KEK prioritas;
10. Pembangunan Closing Dam Piayu;
11. Pembangunan Bendungan Estuari Galang-Galang Baru;
12. Pengembangan CBD-TOD Teluk Tering-Batam Center;
13. Pengembangan SPAM Regional Batam;
14. Pengembangan Batam Urban dan Industrial Sewerage System Development Project;
15. Perencanaan, persiapan, dan pembangunan LRT Batam Trase Bandara Hang Nadim-Batam Center-Batu Ampar dan BRT Trans Batam Trase Batam Center-Tanjung Ugang, yang terintegrasi dengan TOD;
16. Pembangunan TPST Regional Batam;
17. Pengembangan kawasan pariwisata Batam (Pengembangan Kawasan MICE dan Urban Tourism Batam Center);
18. Pembangunan PLTS Apung Waduk Duriangkang;
19. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi;
20. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.

Pengelolaan dan pengembangan KPBPB Batam yang dilakukan oleh BP Batam diarahkan tidak hanya difokuskan kepada

pengembangan Batam sebagai kawasan ekonomi yang handal akan tetapi menjadi salah satu kontributor pembangunan ekonomi nasional dengan memperhatikan suatu pengembangan wilayah ekonomi dan investasi yang terencana. Oleh karena itu pengelolaan KPBPB Batam perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan ekonomi dan investasi dengan tata kota/kawasan yang berpedoman untuk meningkatkan nilai tambah seluruh sektor yang mengacu pada segala aspek aktivitas ekonomi, investasi, sosial, lingkungan, potensi kewilayahan dan perairan serta daya dukung KPBPB Batam.

Adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 berdampak signifikan terhadap pergerakan roda ekonomi di Batam sehingga diperlukan upaya untuk peningkatan ekonomi melalui fokus pada pemulihan industri, investasi, dan pariwisata.

Arah kebijakan dan strategi BP Batam dalam 5 (lima) tahun mendatang disusun dengan mengacu pada pelaksanaan tugas dan fungsi BP Batam dalam pengelolaan dan pengembangan KPBPB. BP Batam menetapkan 2 (dua) arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan investasi melalui pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang berkelanjutan

Optimalisasi peningkatan investasi bertujuan menjadikan KPBPB Batam sebagai tujuan investasi di Indonesia, sehingga BP Batam mengupayakannya melalui promosi yang terarah dan terukur dengan menyampaikan kemudahan dan kelebihan yang dimiliki KPBPB Batam yang menjadikan magnet investasi yang menarik di Indonesia. Upaya lebih lanjut untuk mendukung hal tersebut di antaranya dilakukan dengan pengembangan dan pembangunan infrastruktur berupa prasarana dan sarana agar lebih memperlancar konektivitas dan distribusi barang dari pelabuhan/bandara menuju kawasan industri dan sebaliknya dalam mewujudkan KPBPB Batam sebagai kawasan industri berorientasi ekspor. Sejalan dengan hal tersebut infrastruktur yang dibangun juga melibatkan kelestarian dan keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selain itu BP Batam juga akan mengupayakan pengembangan kawasan

pusat perdagangan, ekosistem bisnis dan industri keuangan pada lokasi yang direncanakan.

2. Meningkatkan kinerja organisasi BP Batam sebagai Lembaga yang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB yang berkualitas, akuntabel dan efisien

Peningkatan tata kelola pelayanan dan birokrasi yang berkualitas, akuntabel, efisien, dan melayani bertujuan untuk menjadikan BP Batam sebagai organisasi yang kredibel menjalankan fungsinya dalam pengembangan kawasan strategis KPBPB Batam. Adapun hal ini akan dilakukan di antaranya melalui peningkatan kualitas perencanaan yang tetap diawasi hingga tahap implementasi sehingga tercapai pembangunan yang terarah dan berkesinambungan. Sejalan dengan hal tersebut BP Batam juga mengupayakan kepastian hukum dalam berinvestasi dan berusaha di KPBPB Batam serta pengelolaan keuangan BP Batam yang memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik. Di samping itu arah kebijakan ini juga dicapai melalui peningkatan profesionalitas pegawai BP Batam.

Sedangkan strategi BP Batam dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Strategi untuk meningkatkan investasi melalui pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang berkelanjutan
 - a. Peningkatan investasi swasta dalam 6 (enam) sektor prioritas: Hub Logistik Internasional, Kedirgantaraan, Light and Valuable, Digital dan Kreatif, Perdagangan Internasional dan Finance Center, dan Integrated Health Tourism;
 - b. Pengembangan kawasan strategis prioritas di Batam dalam kerangka wilayah penataan dan pengembangan (WPP);
 - c. Upaya penurunan biaya logistik dalam rangka meningkatkan daya saing; dan
 - d. Peningkatan pemanfaatan aset menuju penerimaan yang optimal dalam rangka mendukung pendanaan tugas pengelolaan KPBPB Batam.

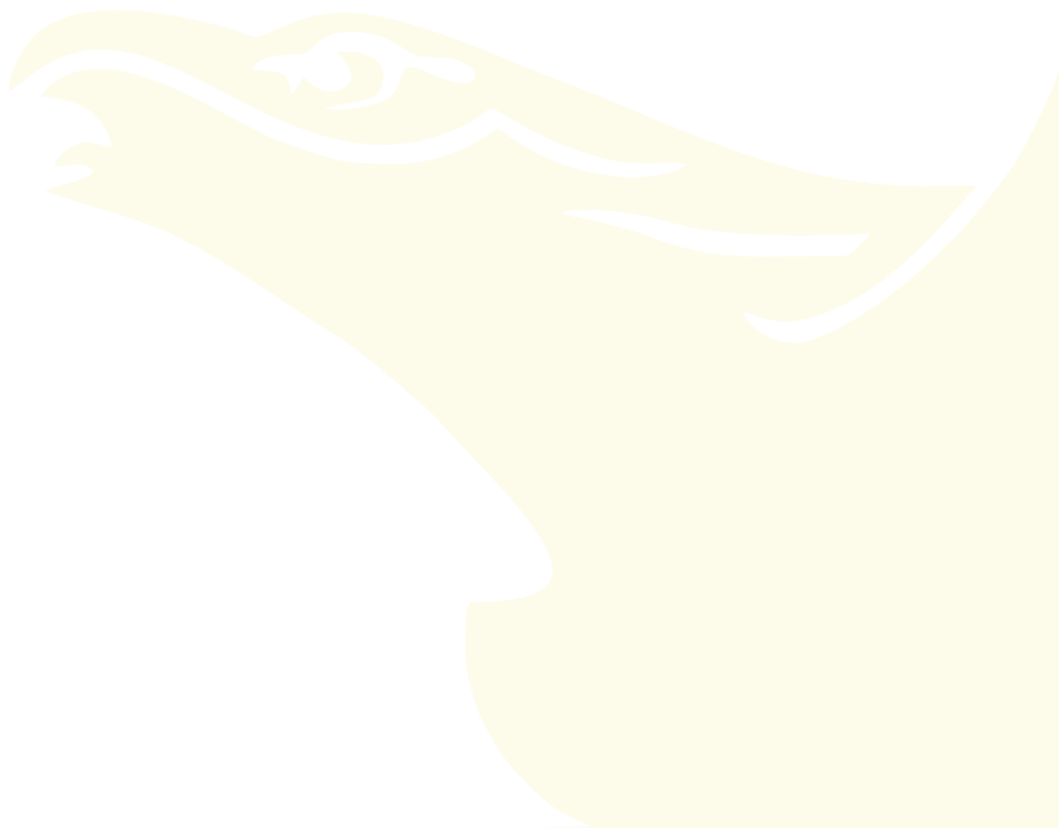
Untuk mewujudkan strategi di atas, BP Batam akan melakukan langkah konkret, di bawah ini:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan berinvestasi di KPBPB Batam;
 - b. Mengembangkan klaster – klaster industri ramah lingkungan, terintegrasi dan terkoneksi;
 - c. Mengoptimalkan penggunaan lahan yang efektif dan efisien;
 - d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung investasi berbasis pengembangan kewilayahan;
 - e. Penguatan sistem konektivitas antar kawasan industri;
 - f. Mewujudkan sistem transportasi masal antar dan intra wilayah; dan
 - g. Mengoptimalkan pemanfaatan aset di BP Batam untuk meningkatkan pendapatan dan kepuasan masyarakat pengguna jasa layanan.
2. Strategi untuk Meningkatkan kinerja organisasi BP Batam sebagai Lembaga yang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB yang berkualitas, akuntabel dan efisien.
- a. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta peningkatan pelayanan dari segi kemudahan dan kecepatan; dan
 - b. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan pendukung investasi.

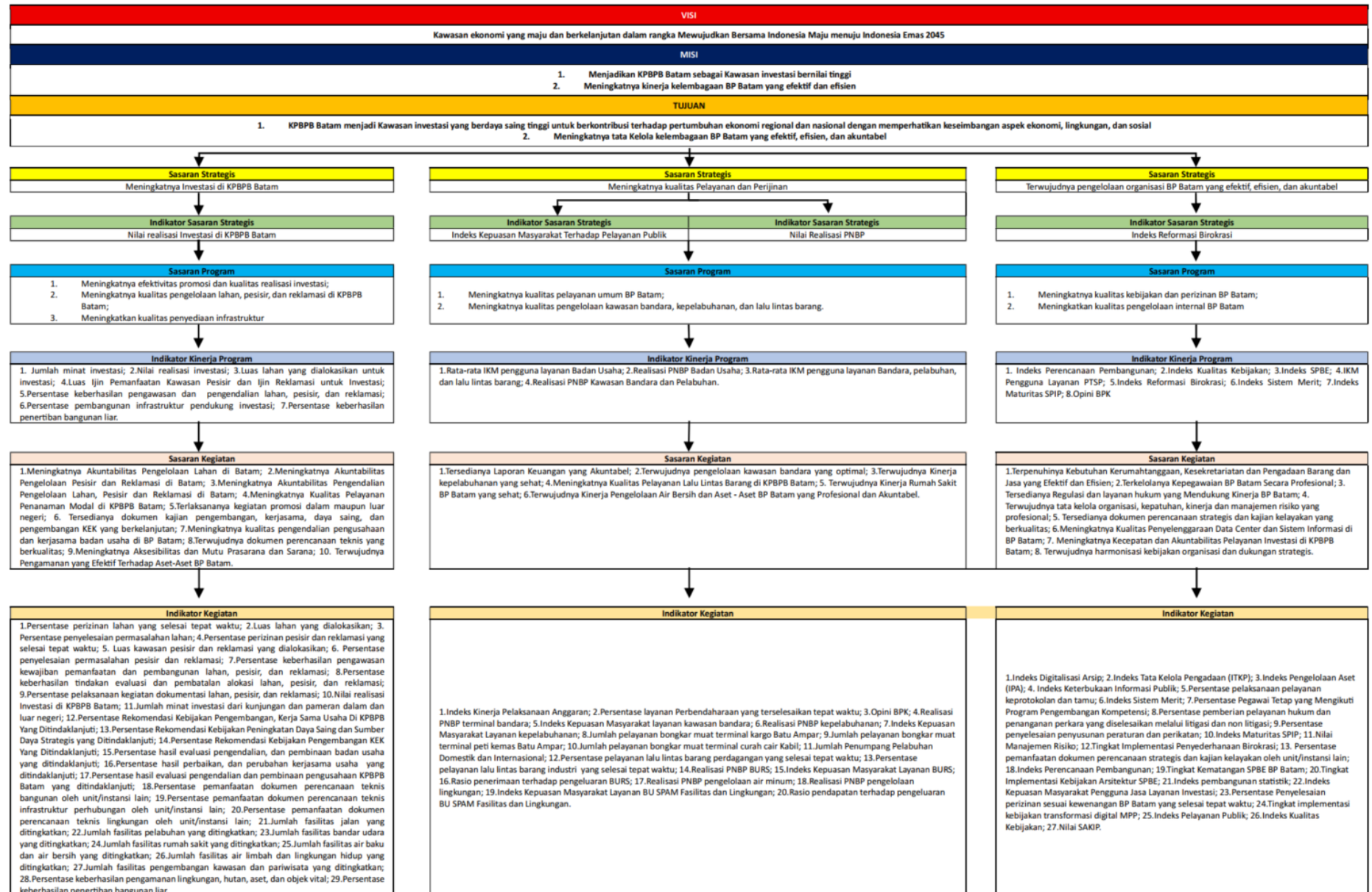
Untuk mewujudkan strategi di atas, BP Batam akan melakukan langkah konkret di bawah ini:

- a. Menyusun dokumen perencanaan berkualitas yang berpedoman pada RPJMN guna mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI;
- b. Penyelarasan antar dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah di BP Batam;
- c. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai di BP Batam guna mendukung fungsi pengembangan KPBPB Batam; dan

- d. Pengelolaan keuangan BP Batam yang memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik.



Gambar 2. 7 Pohon Kinerja (Logical Framework) Badan Pengusahaan Batam



D. Kontrak Kinerja Tahun 2025

Kontrak Kinerja antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2025 merupakan dokumen komitmen kinerja Kepala BP Batam yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Kontrak Kinerja ini disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan pengukuran kinerja serta penyusunan Laporan Kinerja BP Batam Tahun 2025.

Penyusunan Kontrak Kinerja Kepala BP Batam Tahun 2025 mengacu pada tugas dan fungsi BP Batam, arah kebijakan pembangunan nasional, serta kerangka perencanaan strategis yang tersedia pada saat penetapan dokumen tersebut. Dalam Kontrak Kinerja Tahun 2025 ditetapkan tiga sasaran strategis utama, yaitu meningkatnya investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, meningkatnya kualitas pelayanan dan perijinan, serta terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sasaran strategis tersebut diukur melalui 9 indikator kinerja utama berupa Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, Nilai Realisasi PNBPN, Indeks Reformasi Birokrasi, Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU, Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu, Peningkatan Nilai Maturity Rating BLU, Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU, Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional.

Dalam implementasinya, terdapat perbedaan redaksional dan jumlah indikator kinerja serta perbedaan penetapan target antara Kontrak Kinerja Kepala BP Batam Tahun 2025 dengan indikator kinerja dan target yang tercantum dalam Rencana Strategis BP Batam Tahun 2025-2029. Perbedaan tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari perbedaan waktu penetapan kedua dokumen serta terdapatnya

indikator kinerja mandatory dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Dit. PPK BLU), Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kontrak Kinerja Kepala BP Batam Tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2025, pada saat Rencana Strategis BP Batam Tahun 2025–2029 belum ditetapkan secara resmi.

Rencana Strategis BP Batam Tahun 2025–2029 baru ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2025 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman resmi penyelenggaraan tugas dan fungsi BP Batam untuk periode lima tahunan. Dalam proses penetapannya, Renstra telah melalui penyempurnaan substansi, termasuk penajaman redaksional indikator kinerja, peningkatan keterukuran indikator, serta penyesuaian target agar lebih selaras dengan arah kebijakan nasional, dinamika lingkungan strategis, dan kapasitas organisasi dalam jangka menengah.

Dengan demikian, perbedaan redaksi indikator, jumlah indikator, serta target kinerja antara Kontrak Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 merupakan konsekuensi administratif dan teknis yang timbul akibat perbedaan waktu penetapan dokumen perencanaan, serta adanya kewajiban BP Batam sebagai Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Mandatory yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Dit. PPK BLU), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kontrak Kinerja Tahun 2025 tetap berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja tahunan, sedangkan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pengukuran kinerja jangka menengah. Kontrak Kinerja BP Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kontrak Kinerja Kepala BP Batam Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1. Meningkatnya Investasi di KPBPB Batam	Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam	Rp60 T
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	87 (Baik)
3. Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai Realisasi PNBP	Rp1,978 T
	Indeks Reformasi Birokrasi	80 (Sangat Baik)
	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	80%
	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu	92%
	Peningkatan Nilai Maturity Rating BLU	3,38
	Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	3,50
	Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	68%

E. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

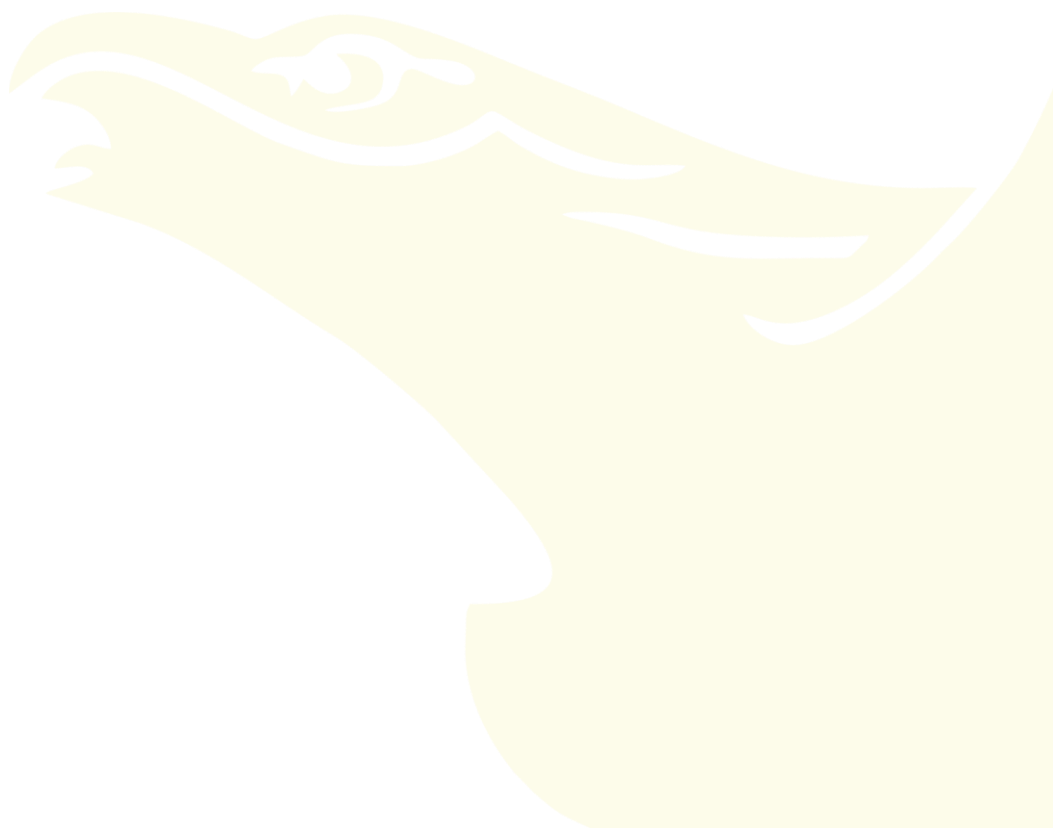
Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Kontrak Kinerja BP Batam Tahun 2025, ditetapkanlah RKA Tahun 2025, yang terdiri dari:

Tabel 2. 3 Tabel Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Kode Kegiatan	Kegiatan	Pagu
1	A	BELANJA RUPIAH MURNI	Rp 0,00
2	B	BELANJA PINJAMAN HIBAH LUAR NEGERI	Rp 8.760.000.000,00
3	C	BELANJA RUPIAH MURNI PENDAMPING	Rp 5.870.199.000,00
4	D	BELANJA PNBP	Rp 2.056.766.866.000,00
	I.	Program Pengembangan Kawasan Strategis	Rp 1.119.219.111.000,00
	5123	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	Rp 87.282.018.000,00
	5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	Rp 33.302.621.000,00
	5125	Pengelolaan, Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara	Rp 15.015.544.000,00
	5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	Rp 174.583.018.000,00
	5127	Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan	Rp 574.204.794.000,00
	5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	Rp 1.818.824.000,00
	5130	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan	Rp 40.352.891.000,00
	5134	Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi	Rp 72.110.765.000,00
	5981	Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja Badan Usaha BP Batam	Rp 2.446.644.000,00
	5982	Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Badan Usaha BP Batam	Rp 895.583.000,00
	5983	Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam	Rp 1.655.147.000,00
	6651	Penyusunan Perencanaan Teknis Pendukung Pengembangan Infrastruktur Kawasan	Rp 20.013.796.000,00
	6652	Promosi KPBPB Batam	Rp 7.991.080.000,00
	6672	Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam	Rp 1.003.653.000,00
	6675	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air Minum	Rp 86.542.733.000,00

No	Kode Kegiatan	Kegiatan	Pagu
	II.	Program Dukungan Manajemen	Rp 937.547.755.000,00
	5113	Penyusunan Kebijakan Strategis, Perencanaan Program dan Teknis	Rp 8.791.788.000,00
	5114	Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa	Rp 129.610.409.000,00
	5115	Pengelolaan dan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Rp 589.479.371.000,00
	5116	Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Rp 7.101.918.000,00
	5117	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	Rp 9.297.404.000,00
	5118	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta	Rp 8.508.307.000,00
	5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan	Rp 3.141.690.000,00
	5978	Penyusunan dan Penyelarasan Kebijakan, Pentarifan serta Pengelolaan Teknologi Informasi	Rp 5.305.322.000,00
	5979	Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kawasan	Rp 5.589.745.000,00
	5980	Pelayanan Pemasaran, Kehumasan dan Protokol	Rp 27.818.887.000,00
	6640	Dukungan Manajemen pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	Rp 10.630.250.000,00
	6641	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	Rp 12.990.727.000,00
	6642	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan, Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara	Rp 3.498.168.000,00
	6643	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	Rp 20.726.516.000,00
	6644	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan	Rp 6.883.924.000,00
	6645	Dukungan Manajemen Internal Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	Rp 842.781.000,00
	6646	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan	Rp 7.380.511.000,00
	6647	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi	Rp 5.234.955.000,00
	6648	Dukungan Manajemen Internal Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja Badan Usaha BP Batam	Rp 625,120.000,00
	6649	Dukungan Manajemen Internal Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Badan Usaha BP Batam	Rp 525.093.000,00

No	Kode Kegiatan	Kegiatan	Pagu
	6650	Dukungan Manajemen Internal Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam	Rp 591.562.000,00
	6671	Dukungan Manajemen Internal Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam	Rp 2.877.762.000,00
	6673	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi	Rp 53.782.639.000,00
	6674	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air Minum	Rp 16.312.906.000,00
Total			Rp 2.071.397.065.000,00



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja Tahun 2025**
- B. Analisis Capaian Kinerja**
- C. Realisasi Anggaran Tahun 2024**

LAPORAN KINERJA **2025**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Kinerja BP Batam Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja BP Batam merupakan kinerja tahun pertama pada periode Renstra BP Batam 2025-2029. Secara rata-rata capaian kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 105,58% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh Indikator Kinerja Utama. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Kepala BP Batam Tahun 2025

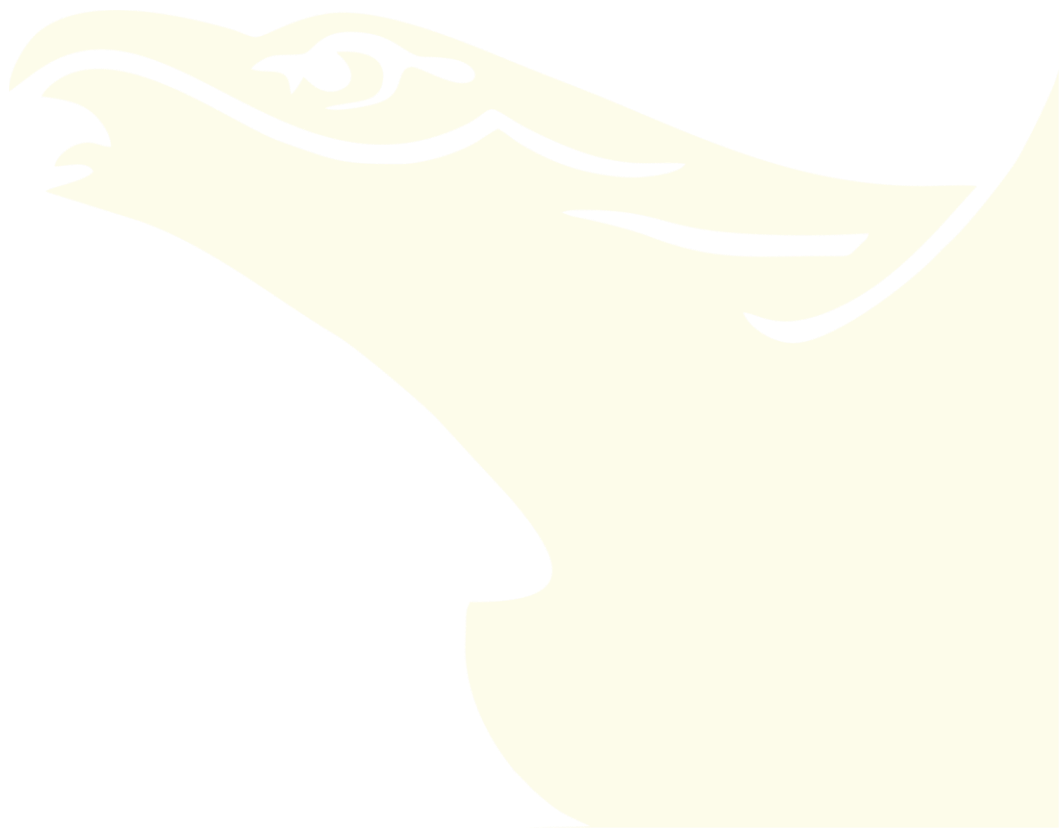
No	Kode	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	SS-1	Meningkatnya Investasi di KPBPB Batam			
	IKU 1.1	Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam	Rp60 T	Rp69,30 T	115,50%
2.	SS-2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perijinan			
	IKU 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	87 (Baik)	87,08 (Baik)	100,09%
	IKU 2.2	Nilai Realisasi PNB	Rp 1,978 T	Rp1,926 T	97,39%
3.	SS-3	Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			
	IKU 3.1	Indeks Reformasi Birokrasi	80 (Sangat Baik)	*68,58 (Baik)	85,73
	IKU 3.2	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	80%	100%	125%
	IKU 3.3	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu	92%	88,21%	95,88%
	IKU 3.4	Peningkatan Nilai Maturity Rating BLU	3,38	3,41	100,89
	IKU 3.5	Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	3,50	4,53	129,29
	IKU 3.6	Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	68%	67,68%	100,48
Persentase Capaian Rata-rata					105,58%

Keterangan:

**Nilai 68,58 merupakan hasil evaluasi sementara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang masih dalam tahap masa sanggah dan akan disesuaikan setelah penetapan nilai final.*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 6 target; dan
- 2) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 3 target.



B. Analisis Capaian Kinerja

Hasil evaluasi dan analisis Akuntabilitas Kinerja Badan Pengusahaan Batam dilakukan dengan membandingkan rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan.

Badan Pengusahaan Batam Tahun 2025 telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan, secara detail capaian kinerja tahun 2025 diuraikan berikut ini.



1.1 Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam

Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) **1.1 Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam**. Untuk mengetahui nilai investasi yang masuk di KPBPB Batam, maka perlu dilakukan pendataan atas investasi yang masuk di wilayah KPBPB Batam secara terukur dari berbagai sumber yang valid.

Pelaksanaan pencatatan Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam merupakan bagian dari pelaksanaan tugas yang diamanatkan kepada BP Batam dalam rangka pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian dan kemudahan berinvestasi, sekaligus menunjukkan komitmen BP Batam dalam menjaga dan memperkuat ekosistem investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Pengukuran nilai realisasi investasi di KPBPB Batam dilakukan dengan menggunakan metode *bottom-up*, di mana perhitungan disusun berdasarkan akumulasi komponen investasi yang terealisasi. Adapun rumusan perhitungan nilai realisasi investasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Modal Tetap + Modal Lancar

Realisasi Investasi = Modal Tetap + Modal Lancar

Realisasi Investasi =

(Impor Barang Modal + Margin Distribusi + Jasa Pemasangan + Biaya lain-lain) + Modal Lancar

Dimana sumber berasal dari:

Modal Tetap : Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam

Modal Lancar : Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, Badan Pusat Statistik Kota Batam

Target Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam Tahun 2025 sebesar Rp60 Triliun. Tujuan dari capaian tersebut adalah sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Realisasi investasi di Batam pada Tahun 2025 adalah Rp69,30 Triliun atau 115,50% dari target yang telah ditetapkan.

a) Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Tabel 3. 2 Capaian Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Investasi di KPBPB Batam			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam	Rp60 T	Rp69,30 T	115,50%

Berdasarkan tabel perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam ditargetkan sebesar Rp60 Triliun. Realisasi kinerja yang dicapai pada Tahun 2025 sebesar Rp69,30 Triliun, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 115,50%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi investasi di KPBPB Batam berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala BP Batam Tahun 2025. Peningkatan realisasi investasi ini mencerminkan komitmen BP Batam dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta efektivitas kebijakan dan upaya fasilitasi investasi yang telah dilaksanakan.

Peningkatan realisasi Investasi ditopang oleh ekspansi kapasitas pelaku usaha *existing* (reinvestasi), dan beralih ke aset produktif, mesin, peralatan industri dan fasilitas produksi. Investasi tidak hanya lonjakan komitmen jangka pendek namun juga merupakan peningkatan produktivitas. Selain itu, peningkatan realisasi investasi mencerminkan tingginya kepercayaan investor baik PMA maupun PMDN. Dominasi sektor jasa lainnya, mesin/elektronik menunjukkan pergeseran sektor

produktif sebagai penopang industri inti dan sektor infrastruktur (listrik/gas/air) sebagai pendukung industri.

Hal tersebut sejalan dengan peta barang unggulan berdasarkan data impor barang modal, di mana Oracle GPU GB200 in Compute Rack Model Family menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp5,4 triliun (10,69 persen), disusul BT/WLAN Module sebesar Rp3,41 triliun (6,70 persen), serta Gauge senilai Rp2,18 triliun (4,29 persen), dan komponen industri lainnya. Struktur ini menegaskan dominasi sektor teknologi dan perangkat industri sebagai penggerak utama investasi barang modal di Batam, sekaligus memperkuat indikasi transformasi menuju industri berbasis teknologi dan manufaktur berdaya saing tinggi.

Dari sisi negara asal, impor barang modal yang didominasi oleh China senilai Rp18,85 triliun (37,04 persen), diikuti Amerika Serikat sebesar Rp9,05 triliun (17,78 persen) dan Singapura Rp7,08 triliun (13,92 persen), menunjukkan integrasi Batam dalam rantai pasok global. Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap China mengindikasikan potensi risiko apabila terjadi gangguan pada *supply chain* global, namun di sisi lain juga mencerminkan posisi Batam sebagai hub industri yang terkoneksi kuat dengan pusat produksi teknologi dunia. Dengan demikian, dinamika impor barang modal semakin menegaskan bahwa peningkatan realisasi investasi di Batam bersifat produktif, strategis, dan terintegrasi dalam ekosistem industri global.

Di sisi importir, sebagian besar barang modal di KPBPB Batam dikendalikan oleh perusahaan inti seperti CV Danisindo Engineering tercatat sebagai importir barang modal terbesar pada Tahun 2025 dengan nilai Rp9,09 triliun (17,86 persen), diikuti oleh PT Pegaunihan Technology Indonesia sebesar Rp6,68 triliun (13,12 persen), serta Tanstarr Jaya Indonesia senilai Rp2,21 triliun (4,34 persen), dll.

Realisasi investasi KPBPB Batam Tahun 2025 yang mencapai Rp69,30 triliun (115,50 persen) dari target menunjukkan kuatnya daya tarik Batam sebagai kawasan strategis nasional. Di tengah penataan ulang rantai pasok global, Batam terbukti mampu mempertahankan

momentum investasi, khususnya pada sektor industri berbasis teknologi dan manufaktur bernilai tambah. Hal ini mencerminkan keunggulan struktural Batam sebagai simpul pertumbuhan ekonomi regional.

Komposisi negara asal dan jenis barang modal memperlihatkan bahwa Batam semakin terintegrasi dalam jejaring logistik regional. Keterkaitan yang kuat dengan China, Amerika Serikat, dan Singapura menegaskan posisi Batam dalam rantai nilai global, sekaligus menjadi penguat pentingnya diversifikasi sumber pasok untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

Pergeseran investasi ke aset produktif mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan penguatan industri lokal. Namun, konsentrasi impor dan ketergantungan pada negara tertentu masih perlu dimitigasi melalui penguatan industri domestik dan perluasan peran pelaku usaha lokal.

Ke depan, penguatan ekosistem industri, peningkatan kualitas SDM, dan percepatan infrastruktur menjadi kunci pertumbuhan Batam yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat perannya sebagai motor ekonomi kawasan.

b) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Capaian Realisasi Investasi di KPBPB Batam selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, seiring dengan kenaikan targetnya. Perbandingan Capaian Realisasi Investasi di KPBPB Batam untuk 3 (tiga) tahun terakhir (2023-2025) dapat dilihat pada tabel berikut:

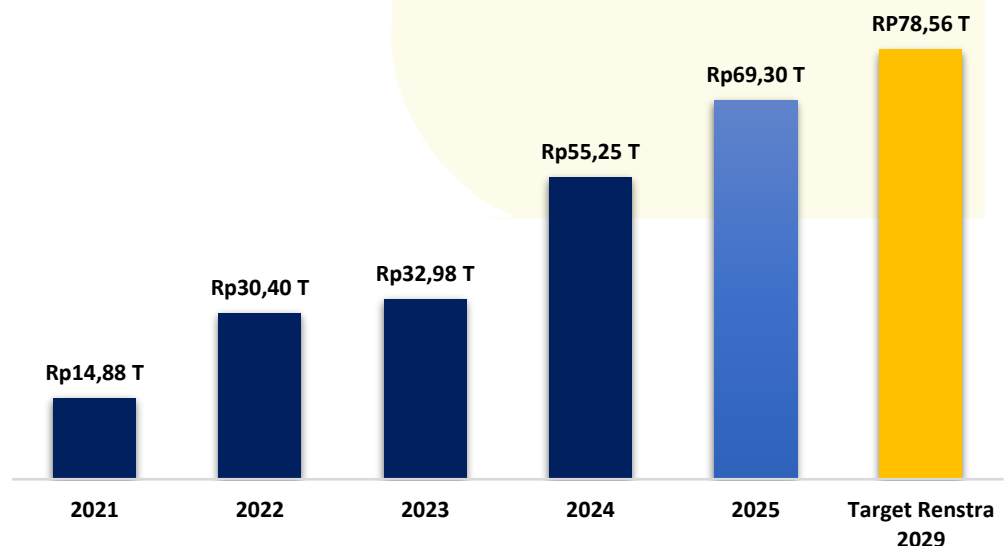
Tabel 3. 3 Perbandingan capaian Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam

Sasaran Strategis			Meningkatnya Investasi di KPBPB Batam					
Indikator Kinerja Utama			Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam					
2023			2024			2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rp31,5 T	Rp32,98 T	104,70	Rp40 T	Rp55,25 T	138,13	Rp60 T	Rp69,30 T	115,50

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, realisasi investasi di KPBPB Batam menunjukkan tren peningkatan yang konsisten seiring dengan peningkatan target kinerja setiap tahunnya. Pada Tahun 2023, realisasi investasi tercatat sebesar Rp32,98 Triliun dari target Rp31,5 Triliun. Selanjutnya, pada Tahun 2024 realisasi investasi meningkat menjadi Rp55,25 Triliun dari target Rp40 Triliun.

Pada Tahun 2025, realisasi investasi kembali mengalami peningkatan signifikan dengan capaian sebesar Rp89,30 Triliun dari target Rp60 Triliun, sehingga menunjukkan kinerja yang semakin optimal dalam menarik investasi. Tren peningkatan ini mencerminkan keberhasilan strategi BP Batam dalam mendorong pertumbuhan investasi, baik melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kualitas layanan, maupun penguatan promosi investasi. Tren capaian realisasi investasi di KPBPB Batam tahun 2021 s.d. 2025 dan target Target Akhir Renstra 2029 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 3. 1 Tren Pertumbuhan Realisasi Investasi Tahun 2021-2025



c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Renstra

Tahun 2025 merupakan tahun pertama Renstra BP Batam 2025-2029, di mana Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam mencapai Rp69,30 Triliun atau 88,21% dari Target Akhir Renstra BP Batam 2025-2029 yaitu sebesar Rp78,56 Triliun.

Tabel 3. 4 Perbandingan Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam dengan Target Renstra BP Batam

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Investasi di KPBPB Batam			
Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam	Rp69,30 T	Rp78,56 T	88,21%

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Rencana Strategis BP Batam Tahun 2025-2029, realisasi Nilai Investasi di KPBPB Batam pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp69,30 Triliun atau mencapai 88,21% dari target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar Rp78,56 Triliun. Capaian tersebut menunjukkan progres yang signifikan pada tahun pertama pelaksanaan Renstra, sekaligus mencerminkan efektivitas kebijakan dan program strategis yang telah diimplementasikan dalam mendorong peningkatan investasi di KPBPB Batam. Ke depan, capaian ini menjadi landasan yang kuat bagi BP Batam untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan investasi serta mengoptimalkan upaya percepatan realisasi investasi guna mencapai dan melampaui target akhir Renstra pada akhir periode perencanaan.

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Capaian Kinerja

Capaian realisasi investasi di KPBPB Batam pada Tahun 2025 yang mencapai Rp69,30 Triliun atau 115,50% dari target Rp60 Triliun. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat positif pada tahun

pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- Menyediakan platform monitoring digital yaitu *Dashboard Investasi*;

Gambar 3. 2 Dashboard Investasi



- Melaksanakan kegiatan Klinik Investasi Keliling;

Gambar 3. 3 Klinik Investasi Keliling



- Melaksanakan Program kerja inovatif seperti Duta Investasi dan Anugerah Investasi;

Gambar 3. 4 Duta Investasi

DOTA INVESTASI

Launching pada 18 Juli 2025



Program Duta Investasi memperkuat promosi dan jejaring bisnis Batam secara business to business. Para duta berperan aktif menjembatani komunikasi antara pelaku usaha, calon investor, dan BP Batam, termasuk menindaklanjuti keluhan langsung dari pengusaha

Tujuan:
Akses langsung ke BP Batam melalui jembatan komunikasi profesional. Peningkatan kepercayaan dan relasi dengan jejaring industri dan mitra global. Fasilitas promosi investasi lintas sektor dan negara.

Outcome:

- Terdapat 73 Duta Investasi di lingkungan BP Batam, 4 Duta Investasi Global.
- Seluruh Duta Investasi dilibatkan langsung dalam promosi investasi, kegiatan klinik investasi dan kunjungan investor.
- Setiap kunjungan perusahaan atau Kawasan industri melibatkan duta investasi untuk fasilitas investor.

Gambar 3. 5 Anugerah Investasi

ANUGERAH INVESTASI

Dilaksanakan pada 22 Oktober 2025



Tujuan:
Melakukan Apresiasi kepada para investor dan pengusaha yang ada di Batam atas kontribusinya dalam Pembangunan kota Batam.

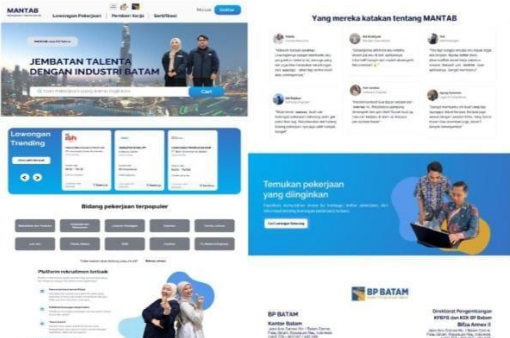
Outcome:

- Terlibatnya Duta Investasi Batam sebagai announcer award
- Komitmen investasi dari 20 perusahaan dari berbagai negara pada 12 kawasan industri dengan jumlah nilai komitmen investasi sebesar 10.349 (in Billion USD) dan Tenaga Kerja sebanyak 15.925 Orang.
- Penyerahan Golden Visa Diberikan kepada PT Digitaland Services Two dan PT Infineon Technologies.

Gambar 3. 6 Manajemen Talenta Batam

MANAJEMEN TALENTA BATAM

Launching tanggal 3 atau 4 Desember 2025



MANTAB memperkuat link and match antara dunia industri dan Pendidikan vokasi lintas kawasan

Tujuan:

- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal melalui sistem data terpadu dan terverifikasi;
- Mempertemukan kebutuhan industri dengan tenaga kerja yang dimiliki Kota Batam sesuai standar nasional dan global;
- Mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja dan mahasiswa melalui akses terhadap program sertifikasi;
- Membangun ekosistem talenta yang terintegrasi;
- Mendukung perencanaan dan kebijakan investasi berbasis kebutuhan sektor industri;
- Meningkatkan daya saing Batam sebagai pusat talenta industry dan kreatif.

Output:

- Penyerapan tenaga kerja oleh industri sesuai dengan kompetensi
- Peningkatan skill tenaga terampil di Batam (untuk mahasiswa aktif/tenaga kerja)

- Melakukan kerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI (BKPMRI) dalam hal pendampingan akselerasi kemudahan pelaksanaan PP 25 tahun 2025 terhadap PP 28 dalam format Investment Desk sesuai PKS Nomor 10/P/A.8/2025 dan 328/SPJ/A4/8/2025;
- Melakukan kegiatan promosi investasi yang intensif;

Gambar 3. 7 Promosi Investasi



DIGITALISASI & MEDIA PROMOSI INVESTASI
On progress

Melakukan digitalisasi & medi promosi secara untuk meningkatkan awareness dan promosi investasi Kota Batam

Terlaksana:

- INTI INDONESIA TECHNOLOGY INNOVATION** 28-30 Oktober
- 5th SELANGOR INVESTMENT & INDUSTRIAL PARK EXPO** 8-11 Oktober
- TRADEXPO 40th indonesia** 15-19 Oktober

Coming soon:

1. Join Promotion Event dengan KJRI Singapura (18 Nov 2025)
2. Training Duta Investasi (6 s.d. 7 November 2025)
 1. Effective Communication
 2. Augmented Intelligent
3. Rencana Video Promosi pada Bandara Internasional Changi Airport dan Media Luar Ruang Ten Square

- Melakukan konsolidasi yang konsisten dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai cq. Direktorat Fasilitas, PUSDATIN BC, dan Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Batam serta dengan Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi, dan Kota Batam dalam rangka perhitungan Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam;
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur prioritas pendukung investasi di wilayah KPBPB Batam, diantaranya:
 - Terbangunnya fasilitas jalan yang ditingkatkan sepanjang 4,85 km.

e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian realisasi investasi yang signifikan pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana, telah dilaksanakan secara relatif efisien dan tepat sasaran. Optimalisasi peran unit kerja yang menangani investasi, pemanfaatan sistem digital dalam proses

perizinan, serta penguatan koordinasi lintas sektor berkontribusi dalam menekan biaya operasional dan mempercepat proses layanan kepada investor.

Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut tercermin dari kemampuan BP Batam dalam menghasilkan *output* kinerja investasi yang tinggi. Ke depan, upaya peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas, serta penguatan tata kelola penganggaran akan terus dilakukan guna menjaga dan meningkatkan efisiensi pencapaian kinerja investasi.

Dalam mencapai kinerja realisasi investasi di KPBPB Batam Tahun 2025, efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan beberapa langkah berikut:

- Melakukan digitalisasi berupa (*Dashboard* Investasi dan Manajemen Talenta Batam);
- Memanfaatkan kompetensi Pegawai BP Batam sebagai Duta Investasi untuk memberikan fasilitas dan kemudahan layanan premium terhadap investor.

f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian realisasi investasi di KPBPB Batam tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan investasi. Secara umum, mayoritas program dan kegiatan tersebut menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Dan untuk program yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi Investasi di KPBPB Batam, antara lain:

- Program Duta Investasi
Program Duta Investasi merupakan salah satu *key driver* keberhasilan pencapaian indikator kinerja peningkatan minat dan realisasi investasi. Program ini memperkuat promosi investasi Batam melalui pendekatan *business to business*, dengan melibatkan 73 Duta Investasi di lingkungan BP Batam serta 4 Duta Investasi Global. Para Duta Investasi berperan aktif sebagai

jembatan komunikasi antara BP Batam, pelaku usaha, dan calon investor, termasuk dalam penanganan langsung keluhan investor di lapangan. Keberadaan Duta Investasi terbukti berkontribusi pada tingginya capaian minat investasi tahun 2025 yang mencapai 208 minat atau 104% dari target. Setiap kunjungan investor dan kawasan industri juga difasilitasi secara langsung oleh Duta Investasi, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepastian berusaha.

- **Dashboard Investasi**

Peluncuran platform investinbatam.bpb Batam.go.id beserta *Dashboard* Investasi menjadi inovasi penting dalam peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal. Platform ini berfungsi sebagai kanal interaktif yang memungkinkan investor menyampaikan kendala dan memantau tindak lanjut BP Batam secara *real time*. Hingga Desember 2025, tercatat 155 pengaduan terselesaikan dari 158 pengaduan investasi atau 98,10%, yang menunjukkan *responsivitas* layanan yang tinggi. Selain itu, pemanfaatan media digital melalui Instagram *Invest in Batam* menghasilkan *engagement rate* sebesar 2,07%, jauh lebih tinggi dibandingkan akun resmi BP Batam. Program ini secara langsung menunjang keberhasilan pencapaian indikator kualitas pelayanan penanaman modal dan promosi Investasi.

- **Desk Investment**

Desk Investment merupakan hasil kolaborasi BP Batam dan Kementerian Investasi dan *Hilirisasi/BKPM* dalam penerapan PP 25 dan PP 28 Tahun 2025. Unit ini menjadi pusat koordinasi perizinan dan pengawasan Investasi, menghadirkan pendampingan teknis untuk investor secara langsung.

- **Klinik Investasi Keliling**

Program Klinik Investasi Keliling berkontribusi signifikan terhadap percepatan penyelesaian kendala perizinan dan pengembangan usaha di kawasan industri. Dengan pendekatan pelayanan “jemput bola” dan kolaborasi lintas instansi (Imigrasi dan Bea Cukai melalui *ImmiCare*), program ini memberikan solusi langsung kepada pelaku usaha. Sepanjang pelaksanaan, sebanyak 39 perusahaan telah

difasilitasi, terutama terkait OSS IBOSS, perizinan dasar, dan kepastian. Program ini mendukung peningkatan kepastian berusaha, efisiensi waktu layanan, serta memperkuat kepercayaan investor, sehingga berdampak positif terhadap realisasi investasi dan kualitas layanan.

▪ **Anugerah Investasi**

Anugerah Investasi berfungsi sebagai instrumen apresiasi dan penguatan hubungan dengan investor. Program ini berhasil mendorong komitmen investasi dari 20 perusahaan lintas negara di 12 kawasan industri dengan nilai komitmen investasi sebesar 10,349 miliar USD serta potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 15.925 orang. Kegiatan ini juga memperkuat citra Batam sebagai kawasan yang memberikan penghargaan dan kepastian bagi investor strategis, sehingga menunjang keberlanjutan Investasi.

▪ **Melaksanakan Kegiatan Promosi Investasi**

- Menyelenggarakan kegiatan promosi di *event* pameran industri dan perdagangan di dalam negeri;
- Kerja sama advertorial dengan media asing nasional negara Singapura;
- Audiensi Investor berminat yang datang ke Direktorat Investasi untuk mendapatkan informasi tentang fasilitas dan kemudahan berinvestasi di kawasan KPBPB Batam; dan
- Peningkatan informasi perkembangan investasi Batam melalui platform sosial media oleh Duta Investasi.

▪ **Kegiatan Fasilitas dan Manajemen Risiko Investasi**

- Pelaksanaan pengendalian kegiatan berusaha dengan kunjungan lapangan ke Perusahaan yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan bersama tim;
- Memberikan layanan fasilitas dan pengendalian kegiatan berusaha kepada pelaku usaha PMA dan PMDN yang datang ke ruang layanan konsultasi investasi, di Direktorat Investasi;
- Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan data barang modal dengan KPU Bea Cukai Tipe B Batam sesuai periode pelaporan investasi;

- Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan data ekonomi Batam dengan Badan Pusat Statistik Kota Batam;
- Melakukan rapat dan pembahasan dengan unit kerja internal (Lahan dan Pesisir, Infrastruktur, Perijinan PTSP, dan SPAM) kendala dan permasalahan pelaku usaha yang menyampaikan melalui *Dashboard* Investasi;
- Melaksanakan Manajemen Talenta Batam sebagai platform yang menjembatani antara pelaku usaha dan pencari kerja;
- Pembangunan infrastruktur yang masif sehingga mampu meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di wilayah KPBPB Batam.

Beberapa upaya akan dilakukan di tahun 2026 untuk meningkatkan capaian, diantaranya:

- Kegiatan Promosi Investasi:
 - Lebih intensif melakukan kegiatan promosi investasi dengan ikut berperan aktif dalam kegiatan promosi dalam dan luar negeri serta melakukan *join promotion* dengan kementerian terkait, *Indonesia Investment Promotion Centre* (IIPC), Kedutaan Besar Republik Indonesia; dan
 - Berpartisipasi sebagai narasumber pada seminar bisnis internasional di kawasan internasional khususnya kawasan Eropa dengan membuka peluang *Direct Call* dari Batam menuju pasar Eropa.
- Kegiatan Fasilitasi dan Manajemen Risiko Investasi:
 - Pengembangan sistem *Dashboard* Investasi;
 - Penyiapan prasarana dan sarana Klinik Investasi;
 - Penyusunan program Klinik Investasi Keliling ke kawasan industri dalam rangka pengendalian kepatuhan berusaha dan sosialisasi fasilitas *Dashboard* Investasi; dan
 - Memberikan layanan fasilitasi dan pengendalian kegiatan berusaha kepada pelaku usaha yang datang ke ruang layanan konsultasi investasi, di Direktorat Investasi.



2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Sasaran Strategis memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) **2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik** dengan target indeks 87, capaian pada tahun 2025 tercapai 87,08 (100,09%). Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pemerintah memandatkan penyelenggara pelayanan publik untuk mengevaluasi kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan.

Pelaksanaan SKM yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. SKM dilakukan dengan memberikan kuesioner berisikan pertanyaan terhadap pelayanan yang diberikan oleh BP Batam. Adapun tujuan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah untuk memperoleh data dan informasi kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan oleh BP Batam.

Pelaksanaan SKM tahun 2025 bekerja sama dengan Politeknik Negeri Batam dengan objek pelaksanaan SKM terdiri atas lima (5) Badan/Unit Usaha layanan Publik BP Batam, yaitu:

1. Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan;
2. Badan Usaha Rumah Sakit;
3. Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Direktorat Pengelolaan Lahan; dan
5. Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan.

Metode penentuan sampel menggunakan tabel Krejcie dan Morgan. Populasi penduduk kota Batam sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) kota Batam sebanyak 1.196.396 orang, sesuai dengan tabel Krejcie dan Morgan, jumlah responden sebanyak 384 orang permasing-masing lokus. Adapun 9 (sembilan) unsur pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ Tarif

Biaya/ Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/ atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk, Spesifikasi dan Jenis Pelayanan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Tabel 3. 5 Kriteria Penentuan Nilai SKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Baik Sekali

Sumber: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

a. Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik BP Batam

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perijinan			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	87	87,08	100,09%

Berdasarkan Tabel diatas, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik BP Batam pada Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perizinan memperoleh indeks sebesar 87,08 dengan mutu pelayanan “BAIK” hal ini memiliki arti bahwa capaian kinerja melebihi target 0,08 poin dari target IKM sebesar 87, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,09%. Realisasi IKM sebesar 87,08 diperoleh dari rata-rata pengukuran indeks pelayanan pada 5 (lima) Badan/Unit Usaha layanan Publik BP Batam sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat BP Batam

No	Unit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu Pelayanan	Predikat
1	Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	90,24	A	Sangat Baik
2	Badan Usaha Rumah Sakit	89,62	A	Sangat Baik
3	Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	88,28	B	Baik
4	Direktorat Pengelolaan Lahan	88,15	B	Baik
5	Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan	79,11	B	Baik
Rata-rata		87,08	B	Baik

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan BP Batam telah memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja layanan BP Batam, serta efektivitas upaya perbaikan dan penguatan kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas layanan terus dilakukan oleh BP Batam untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat pengguna layanan.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik BP Batam mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perbandingan capaian indikator ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik 2023-2025

Sasaran Strategis			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan					
Indikator Kinerja Utama			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik					
2023			2024			2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
84	84,03	100,04	87	87,02	100,02	87	87,08	100,09

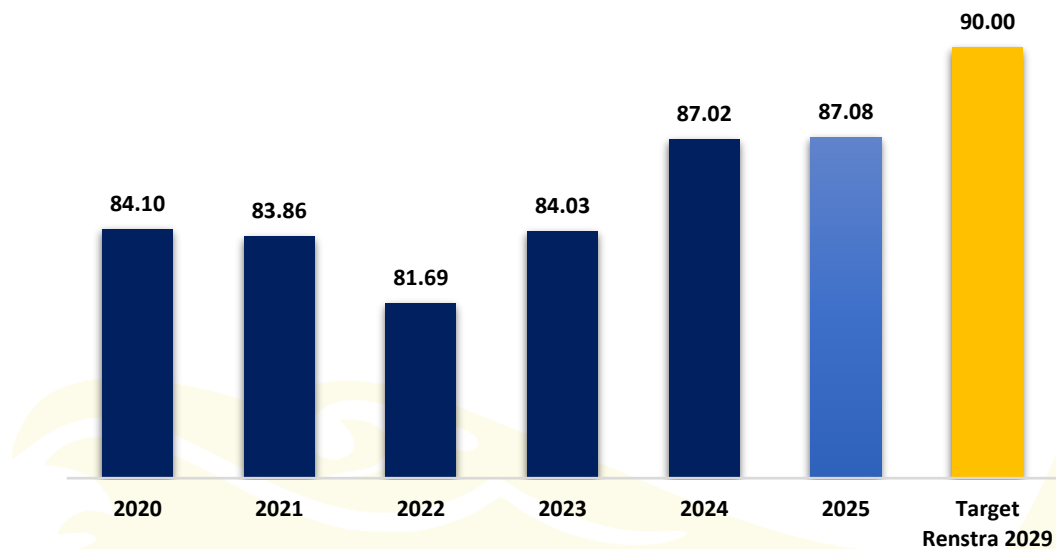
Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2023, target indikator ini adalah 84 dengan realisasi sebesar 84,03. Pada tahun 2024 indikator ini mengalami peningkatan capaian yang cukup signifikan menjadi 87,02 dari target 87. Pada Tahun 2025 target indikator ini adalah 87 dengan realisasi sebesar 87,08. Adapun perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada 5 (lima) Badan/Unit Usaha BP Batam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada 5 Badan/Unit Usaha BP Batam Tiga Tahun Terakhir

NO	UNSUR SKM	BURS				DPK				PTSP				DPL				SPAM				
		LAPORAN				LAPORAN				LAPORAN				LAPORAN				LAPORAN				
		NI	NK	KATEGORI MUTU PELAYANAN	KINERJA BADAN LAYANAN	NI	NK	KATEGORI MUTU PELAYANAN	KINERJA BADAN LAYANAN	NI	NK	KATEGORI MUTU PELAYANAN	KINERJA BADAN LAYANAN	NI	NK	KATEGORI MUTU PELAYANAN	KINERJA BADAN LAYANAN	NI	NK	KATEGORI MUTU PELAYANAN	KINERJA BADAN LAYANAN	
1	Persyaratan	3,61	90,23	A	Sangat Baik	3,63	90,63	A	Sangat Baik	3,63	90,66	A	Sangat Baik	3,63	92,29	A	Sangat Baik	3,18	79,56	B	Baik	R A T A - R A T A
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	3,55	88,87	A	Sangat Baik	3,62	90,46	A	Sangat Baik	3,62	90,43	A	Sangat Baik	3,72	93,07	A	Sangat Baik	3,21	80,32	B	Baik	
3	Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,59	89,74	A	Sangat Baik	3,64	90,95	A	Sangat Baik	3,47	86,78	B	Baik	3,17	79,13	B	Baik	3,19	79,62	B	Baik	
4	Biaya/Tarif	3,54	88,57	A	Sangat Baik	3,63	92,16	A	Sangat Baik	-	-	-	-	3,67	91,63	A	Sangat Baik	3,15	78,76	B	Baik	
5	Produk Spesifikasi dan Jenis Layanan	3,53	88,31	A	Sangat Baik	3,63	90,67	A	Sangat Baik	3,66	91,60	A	Sangat Baik	3,57	89,26	A	Sangat Baik	2,98	74,50	C	Kurang Baik	
6	Kompetensi Pelaksanaan	3,61	90,20	A	Sangat Baik	3,56	89,05	A	Sangat Baik	3,50	87,40	B	Baik	3,64	90,39	A	Sangat Baik	3,19	79,62	B	Baik	
7	Perilaku Pelaksanaan	3,64	91,05	A	Sangat Baik	3,61	90,13	A	Sangat Baik	3,51	87,74	B	Baik	3,62	90,48	A	Sangat Baik	3,23	80,66	B	Baik	
8	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	3,54	88,43	A	Sangat Baik	3,55	88,77	A	Sangat Baik	3,54	88,41	A	Sangat Baik	3,32	82,94	B	Baik	3,13	76,35	B	Baik	
9	Sarana dan Prasarana	3,65	91,19	A	Sangat Baik	3,59	89,69	A	Sangat Baik	3,33	83,21	B	Baik	3,34	83,59	B	Baik	3,21	80,35	B	Baik	
Rata-Rata Keseluruhan				A	Sangat Baik			A	Sangat Baik			B	Baik							B	Baik	
PEROLEHAN IKM TAHUN 2025		89,62		A	90,24		A	88,28		B	88,15		B	79,11		B	87,08					
PEROLEHAN IKM TAHUN 2024		91,27			88,42			88,11			88,09			79,19			87,02					
PEROLEHAN IKM TAHUN 2023		91,06			84,87			81,05			0			76,24			-					

Adapun Tren capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik tahun 2020-2025 dan Target Renstra 2029 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3. 8 Tren Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2020-2025 dan Target Renstra 2029



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Renstra

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra BP Batam Tahun 2029, capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dengan target Renstra BP Batam

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perijinan			
Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	87,08	90	96,76

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Rencana Strategis BP Batam Tahun 2025-2029, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perizinan menunjukkan realisasi sebesar 87,08. Capaian tersebut setara dengan 96,76% dari target akhir Renstra Tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 90. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik BP Batam pada Tahun 2025 telah mendekati target jangka menengah yang

direncanakan. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan dan konsisten agar target akhir Renstra dapat tercapai secara optimal pada akhir periode perencanaan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dalam Capaian Kinerja

Adapun upaya yang telah dilaksanakan BP Batam dalam mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2025, yaitu:

a) Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan

- Penerapan *e-Ticketing* dan *Cashless Payment* di Terminal Domestik Telaga Punggur dan Sekupang;
- Penambahan saran dan prasarana alat bongkar muat kontainer STS CRANE di pelabuhan Batu Ampar;
- Tersedianya fasilitas Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) untuk pelayanan *Costum Imigration Quarantin Port Autorithy* (CIQPA);
- Penyederhanaan pelayanan sistem *Host to Host* dan telah terintegrasi dengan Inaportnet Kementerian Perhubungan;
- Penerapan aplikasi pelaporan terminal khusus; dan
- Menerapkan sistem keamanan fasilitas pelabuhan sesuai mandatory dari Kementerian Perhubungan terkait *International Ship and Port Facility Security Code* (ISPSCODE).

b) Badan Usaha Rumah Sakit

- Layanan berbasis IT, sehingga mempercepat layanan dengan adanya SIMRS;
- Terintegrasinya layanan BPJS dengan SIMRS BP Batam;
- Peningkatan Kompetensi SDM dalam memberikan pelayanan;
- Keterbukaan informasi atas layanan yang diberikan;
- Kondisi Sarana dan Prasarana yang baik dalam menunjang pelayanan;
- Rumah Sakit telah terakreditasi Paripurna, serta beberapa unit layanan telah memperoleh sertifikasi ISO, antara lain Laboratorium, Instalasi Gawat Darurat (IGD), dan Instalasi Gizi;
- Rumah Sakit BP Batam telah memperoleh Sertifikasi Halal oleh LPPOM MUI Kepri.

c) Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Percepatan penyelesaian penerbitan perizinan tepat waktu sesuai dengan SOP;
- Perubahan perizinan secara manual ke elektronik secara keseluruhan;
- Pemenuhan sarana dan prasarana seperti perbaikan toilet, pengadaan kursi roda, fasilitas khusus untuk pelayanan difabel, penataan ulang pustaka, ruang menyusui, dan tempat bermain anak-anak;
- Dilakukan layanan informasi dan perizinan pertanahan langsung ke masyarakat melalui Layanan BP Batam Keliling (BLINK);
- Pemeliharaan dan pengembangan sistem perizinan IBOSS;
- Penambahan media informasi di berbagai media seperti instagram;
- Meningkatkan kompetensi SDM (petugas pelayanan *front office* dan verifikator perizinan); dan
- Melakukan aktivitas layanan keliling (BLINK) secara periodik; dan

d) Direktorat Pengelolaan Lahan

- Melaksanakan Pelayanan Perizinan sesuai SOP;
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan dukungan teknologi informasi *Land Management System* (LMS);
- Pemeliharaan berkala sistem IT layanan perizinan pertanahan; dan
- Percepatan Layanan Izin Peralihan Hak (IPH) semula 14 hari menjadi 5 hari kerja.

e) Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan

- Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (*Water Treatment Plant*/WTP) di Waduk Duriangkang dengan kapasitas 500 liter/detik, Waduk Muka Kuning sebesar 350 liter/detik, dan Waduk Tembesi sebesar 230 liter/detik;
- Penanganan *stress area* yang berhasil diturunkan dari 23 titik menjadi 17 titik;
- Penurunan tingkat kehilangan air (*Non-Revenue Water*/NRW) dari 24% menjadi 20%;
- Pembangunan WTP Rempang berkapasitas 20 liter/detik guna mendukung pelayanan air bersih di kawasan Rempang Eco City dan Dapur 6;
- Penyelesaian pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih sepanjang 19,3 km; dan

- Hingga Desember 2025, jumlah sambungan baru SPAM telah mencapai 340.698 sambungan.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan

- Masih belum matangnya sistem yang di bangun dan masih kurang aktifnya pengguna aplikasi pelaporan terminal khusus;
- Kurangnya SDM yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dalam mengelola kegiatan operasional pelabuhan;
- Kurangnya kapabilitas SDM dalam pelaksanaan internal audit kegiatan *International Ship and Port Facility Security Code (ISPSCODE)*;
- Agen penjualan tiket belum melaksanakan perubahan keseluruhan penjualan tiket dari manual ke *e-ticketing* kepada masyarakat;
- Sistem pelayanan kepelabuhanan (B-SIMS) belum memberikan pelayanan yang optimal dalam hal pengawasan kegiatan operasional.

b) Badan Usaha Rumah Sakit

- Budaya kerja Rumah Sakit belum sepenuhnya menerapkan *Core Value BerAkhlak*;
- Keterbatasan jumlah SDM Kesehatan pada tenaga perawat;
- Keterbatasan sarana pendukung layanan seperti alat Haemodialisa, tempat tidur ruang perawatan;
- Kurangnya ketersediaan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pendukung layanan yang diberikan;
- Keterkaitan tugas dan fungsi pada unit kerja yang berbeda menyebabkan perencanaan tidak dapat segera direalisasikan.

c) Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Belum semua sektor perizinan terintegrasi ke OSS BP Batam;
- Masih terbatasnya media informasi melalui elektronik yang tersebar di tempat layanan;
- Perlunya koordinasi yang berkelanjutan dengan unit teknis perizinan;
- Terbatasnya ketersediaan anggaran koordinasi/studi tiru ke K/L terkait pelayanan prima.
- Fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai seperti fasilitas ibadah, ruang kerja, lift, dan pendingin ruangan;

- Terjadinya gangguan sistem perizinan OSS dan IBOSS yang mengganggu proses perizinan; dan
- Status kepemilikan Gedung Mal Pelayanan Publik dimiliki oleh 3 pihak, sehingga terkendala dalam pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana.

d) Direktorat Pengelolaan Lahan

- Keterbatasan kuantitas SDM; dan
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam mendukung verifikasi layanan pertanahan.

e) Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan

- Minimnya pemeliharaan sarana dan prasarana;
- Minimnya peralatan penunjang untuk pembersihan waduk dari gangguan tanaman liar misalnya eceng gondok (*weed harvester* dan *excavator*);
- Keterkaitan tugas dan fungsi pada unit kerja yang berbeda menyebabkan perencanaan tidak dapat segera direalisasikan;
- Pendistribusian air ke area yang mengalami tekanan (*stress area*) mengalami kendala;
- Kurangnya ketersediaan air baku untuk didistribusikan; dan
- Keterbatasan kompetensi SDM dengan kualifikasi terkait pemeliharaan waduk dan air baku.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program-program yang menunjang keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan berbagai inisiatif strategis pada unit kerja, antara lain:

- Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan (DPK) melalui simplifikasi pelayanan berbasis B-SIMS serta digitalisasi pelayanan kepelabuhanan;
- Badan Usaha Rumah Sakit (BURS) melalui pelaksanaan sertifikasi, akreditasi, serta integrasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dengan sistem BPJS Kesehatan;

- Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui penerapan Sertifikasi ISO 9001:2015 terkait Standar Pelayanan serta Pelaksanaan pelayanan berupa BP Batam Layanan Keliling (BLINK);
- Direktorat Pengelolaan Lahan melalui penerapan Sertifikasi ISO 9001:2015 terkait Standar Pelayanan serta optimalisasi layanan *Land Management System* (LMS);

Sedangkan kegagalan dalam pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada layanan SPAM antara lain disebabkan oleh masih adanya permasalahan kualitas air yang belum memenuhi standar pelayanan, seperti kondisi air yang keruh, berwarna kekuningan, berbau, serta mengandung endapan. Selain itu, terdapat gangguan dalam kontinuitas pasokan air berupa penghentian aliran (mati air) dan tekanan air yang rendah. Penyampaian informasi terkait pemadaman air maupun gangguan teknis juga dinilai belum optimal karena masih terjadi keterlambatan dan belum merata kepada pelanggan. Di samping itu, kecepatan respons layanan *call center* dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat masih perlu ditingkatkan, mengingat sebagian pengaduan belum terealisasi secara tepat waktu serta proses penanganan keluhan yang relatif membutuhkan waktu cukup lama.

Beberapa upaya atau tindak lanjut kedepan yang akan dilakukan di tahun 2025 untuk mempertahankan/meningkatkan capaian adalah sebagai berikut:

- Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan
 - Penambahan layanan yang digitalisasi terhadap layanan jasa terkait kepelabuhanan lainnya;
 - Mengaktifkan fitur *helpdesk* di *website* B-Care BP Batam; dan
 - Penambahan sarana *Control Room* untuk pengawasan keamanan pelabuhan di Batam.
- Badan Usaha Rumah Sakit
 - Penambahan sarana dan prasarana medis; dan
 - Penambahan jumlah SDM terutama tenaga para medis.

- Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Penambahan sarana dan prasarana;
 - Penambahan jumlah SDM (Bagian verifikasi perizinan dan layanan *Front Office*);
 - Penambahan loket PTSP (layanan khusus lansia, disabilitas dan ibu hamil);
 - Penambahan layanan antrian *online*, *call center* dan panggilan video; dan
 - Peningkatan kompetensi melalui diklat untuk verifikator perizinan.
- Direktorat Pengelolaan Lahan
 - Penambahan sarana dan prasarana;
 - Penambahan jumlah SDM verifikator perizinan; dan
 - *Upgrading* kompetensi SDM verifikator perizinan.
- Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan
 - Pembangunan jaringan pipa distribusi air baku;
 - Monitoring dan evaluasi penerimaan operasional serta pemanfaatan aset produktif melalui kerja sama;
 - Pengendalian konsistensi Standar Pelayanan dan percepatan penanganan pengaduan;
 - Pengadaan sarana baru dan pemeliharaan aset secara terencana dan preventif;
 - Tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan SKM sebagai dasar perbaikan layanan; dan
 - Penguatan pengelolaan SDM melalui penyesuaian kebutuhan dan peningkatan kompetensi.



2.2 Nilai Realisasi PNBP

Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) **2.2 Nilai Realisasi PNBP**. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi/badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. PNBP merupakan penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dikelompokkan menjadi 6 (enam) klaster objek yaitu:

1. Pemanfaatan SDA;
2. Pelayanan;
3. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan;
4. Pengelolaan Barang Milik Negara;
5. Pengelolaan Dana; dan
6. Hak Negara Lainnya.

Formulasi perhitungan realisasi jumlah PNBP adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi PNBP} = \frac{\sum(\text{Jumlah Realisasi PNBP Tahun 2025})_n}{\sum(\text{Target PNBP Tahun 2025 yang berlaku})_n} \times 100\%$$

PNBP BP Batam (Badan Pengusahaan Batam) berasal dari berbagai sumber yang terkait dengan pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Berikut beberapa sumber utama penerimaan PNBP BP Batam:

1. Biro Keuangan
 - Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya;
 - Pendapatan atas Sanksi/Klaim;
 - Pendapatan Bunga Jangka Pendek;
 - Pendapatan Jasa Giro;
 - Pendapatan Lain-Lain;
 - Pendapatan Lelang; dan
 - Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas.
2. Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam
 - Pendapatan Jasa Giro; dan
 - Pendapatan Sewa Usaha Kuningan *Guest House* Lainnya.
3. Pusat Data dan Sistem Informasi
 - Pendapatan Data Center IT Center.
4. Direktorat Pengelolaan Lahan;
 - Pendapatan Administrasi Peralihan;
 - Pendapatan Denda UWTO;
 - Pendapatan Lain-Lain;
 - Pendapatan Layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL);
 - Pendapatan Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi;
 - Pendapatan Penggantian Dokumen;
 - Pendapatan Pengukuran dan Penetapan Lokasi;
 - Pendapatan Persetujuan Lelang;
 - Pendapatan Rekomendasi Hak Atas Tanah;
 - Pendapatan Revisi Gambar Penetapan Lokasi;
 - Pendapatan UWT Alokasi Baru;
 - Pendapatan UWT Pembaruan; dan
 - Pendapatan UWT Perubahan Peruntukan.
5. Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara
 - KSO Pendapatan Kargo Umum;
 - KSO Pendapatan Operasional Umum;
 - Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Air;
 - Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Listrik Catu Daya;
 - Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Listrik KWH;

- Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya;
- Pendapatan Denda Jasa Non-aeronautika;
- Pendapatan FDS;
- Pendapatan Jasa Giro;
- Pendapatan Konsesi Perkantoran;
- Pendapatan Konsesi Usaha;
- Pendapatan Lain-Lain;
- Pendapatan Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara (*Fuel Throughput*);
- Pendapatan Sewa Bus Apron;
- Pendapatan Sewa *Counter*;
- Pendapatan Sewa *Counter*;
- Pendapatan Sewa Hunian (*Apartment* dan Rumah Tapak);
- Pendapatan Sewa Lapangan Sepak Bola;
- Pendapatan Sewa Tanah;
- Pendapatan Sewa Tanah/Lahan;
- Pendaratan Dalam Negeri;
- Pendaratan Luar Negeri;
- Penempatan Dalam Negeri; dan
- Piutang Usaha Perorangan.

6. Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan

- KSO Bagasi;
- KSO Bagasi;
- KSO *Fee* Bongkar Muat;
- KSO Gudang Penumpukan;
- KSO Iklan;
- KSO Jasa *Packing*;
- KSO Kontribusi Tetap;
- KSO Listrik;
- KSO *Mooring Bouy*;
- KSO Pandu;
- KSO Parkir;
- KSO Parkir Inap Kapal;
- KSO Pass Kendaraan;

- KSO Pass Untuk Orang;
- KSO Pelayanan Air Bersih Kapal;
- KSO Pelayanan Air Bersih Property;
- KSO Royalti;
- KSO Sampah;
- KSO *Seaport Tax*/Pass Orang;
- KSO Sewa Ruangan / Bangunan;
- KSO Tambat;
- KSO Tunda;
- Layanan Penggunaan Perairan;
- Pendapatan Air Bersih Untuk Property;
- Pendapatan Denda Jasa Pelabuhan;
- Pendapatan Denda KSO;
- Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Lainnya;
- Pendapatan Iklan;
- Pendapatan Jasa Air Tawar;
- Pendapatan Jasa Bongkar Muat;
- Pendapatan Jasa Giro;
- Pendapatan Jasa Labuh;
- Pendapatan Jasa Pandu;
- Pendapatan Jasa Penumpukan Barang;
- Pendapatan Jasa Tambat;
- Pendapatan Jasa *Throughput*;
- Pendapatan Jasa *Yacht*;
- Pendapatan Lain-Lain;
- Pendapatan Lainnya dari Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pendapatan Pass Untuk Orang;
- Pendapatan Retribusi Lainnya;
- Pendapatan Retribusi Pass Kendaraan;
- Pendapatan *Seaport Tax*;
- Pendapatan Sewa Gudang;
- Pendapatan Sewa Listrik;
- Pendapatan Sewa Rak;
- Pendapatan Sewa Ruangan;

- Pendapatan Sewa Tanah; dan
- Piutang Usaha Perusahaan.

7. Direktorat Lalu Lintas Barang

- Pendapatan Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Usaha (Baru dan Perpanjangan);
- Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Barang;
- Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Sementara Barang;
- Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pengeluaran Sementara Barang; dan
- Pendapatan Jasa Rekomendasi Pelabuhan Khusus.

8. Badan Usaha Rumah Sakit

- Alat;
- *Ambulance*;
- CSSD (*Central Sterilisasi dan Supply Dept*);
- Farmasi;
- Konsultasi Dokter;
- Konsultasi Umum/Spesialis;
- Laboratorium;
- Material;
- *Medical Check Up*;
- Obat;
- Pemulasaran Jenazah;
- Pendapatan BPJS Kesehatan – Lainnya;
- Pendapatan BPJS Kesehatan - Luar Paket INACBGS;
- Pendapatan BPJS Kesehatan - Obat Kronis dan Kemoterapi;
- Pendapatan BPJS Kesehatan - Rawat Inap;
- Pendapatan BPJS Kesehatan - Rawat Jalan;
- Pendapatan BPJS Kesehatan Kapitasi (Klinik Baloi);
- Pendapatan Denda;
- Pendapatan IGD Lainnya;
- Pendapatan Jasa Giro;
- Pendapatan Lain-Lain;
- Pendapatan Operasional Lainnya;

- Pendapatan Operasional Unit Penunjang Lainnya;
- Pendapatan Rawat Inap Lainnya;
- Pendapatan Rawat Jalan Lainnya;
- Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang;
- Pendapatan Sewa Lainnya;
- Pendapatan Sewa Listrik;
- Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin;
- Pendidikan dan Latihan;
- Penelitian dan Pengembangan (Litbang);
- Poliklinik;
- Radiologi;
- Registrasi;
- Registrasi Rawat Inap;
- Registrasi Rawat Jalan;
- Tindakan medis non operatif; dan
- Visit Dokter/ Konsultasi.

9. Badan usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan

- Biaya Administrasi Laboratorium;
- Jasa Pengelolaan kawasan KPLI-B3;
- Jembatan Timbang;
- Kompos Daur Ulang Limbah Domestik;
- KSO Non Air SPAM Hilir Lainnya;
- KSO Pemasangan Baru;
- KSO Pemeliharaan Meter Air;
- KSO Penggantian Meter;
- KSO Pengolahan Air Bersih;
- KSO Penyambungan Kembali;
- Layanan Limbah Domestik Non Rumah Tangga;
- Pass Masuk Bulanan KPLI B3;
- Pass Masuk Harian KPLI B3;
- Pass Masuk Tahunan KPLI B3;
- Pendapatan Air Baku;
- Pendapatan Asrama Haji;

- Pendapatan Asuransi;
- Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya;
- Pendapatan dari Rusun Batu Ampar;
- Pendapatan dari Rusun Kabil;
- Pendapatan dari Rusun Muka Kuning;
- Pendapatan dari Rusun Sekupang;
- Pendapatan dari Rusun Tanjung Uncang;
- Pendapatan Denda Agribisnis;
- Pendapatan Denda KSO;
- Pendapatan Denda Pemukiman;
- Pendapatan Denda Sewa Gedung/ Bangunan/ Ruangan/ Gudang;
- Pendapatan Gazebo Taman Rusa;
- Pendapatan *Guest House*;
- Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Kantor Air;
- Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Kantor Perwakilan JKT;
- Pendapatan Jasa Giro;
- Pendapatan Lain-Lain;
- Pendapatan Lainnya Taman Kolam Sekupang;
- Pendapatan Lainnya Taman Rusa Sekupang;
- Pendapatan Retribusi Lainnya;
- Pendapatan Retribusi Tiket *Camp* Vietnam Galang;
- Pendapatan Retribusi Tiket Taman Edukasi Agribisnis;
- Pendapatan Retribusi Tiket Taman Kolam Sekupang;
- Pendapatan Retribusi Tiket Taman Rusa Sekupang;
- Pendapatan Retribusi Tiket Temenggung Abdul Jamal (TAJ);
- Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang Lainnya;
- Pendapatan Sewa Kandang Ternak;
- Pendapatan Sewa Kantin Lantai 4 Anex 2;
- Pendapatan Sewa Kios Tenda Temenggung Abdul Jamal;
- Pendapatan Sewa Lahan KPLI B3;
- Pendapatan Sewa Lahan Tower;
- Pendapatan Sewa Lahan Untuk Tower;

- Pendapatan Sewa Lokasi Perikanan;
- Pendapatan Sewa Lokasi Pertanian;
- Pendapatan Sewa Lokasi Peternakan;
- Pendapatan Sewa Ruang Bank Mandiri;
- Pendapatan Sewa Tapak Kandang Ternak;
- Pendapatan Sewa Usaha Kuningan *Guest House* Lainnya;
- Pendapatan *Sporthall*;
- Pendapatan Titik Reklame;
- Pengelolaan Penyedotan;
- Pengolahan Air Limbah;
- Pengujian Air dan Air Limbah;
- Pengujian *Restriction of Hazardous Substances Directive* (RoHS);
- Sewa Gudang Tertutup; dan
- Sewa Ruangan Kantor.

10. Direktorat Pembangunan Infrastruktur

- Pendapatan dari Sewa Lahan Reklame;
- Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Jasa Lainnya;
- Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Utilitas;
- Pendapatan Penghijauan / *show room* bunga / tanaman; dan
- Perizinan Pematangan Lahan.

a. Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Realisasi PNBPN tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 97,39% atau Rp1.926.505.948.465,05 dari target Rp1.978.098.000.000,00. Capaian Nilai Realisasi PNBPN Batam pada Tahun 2025 dapat dilihat melalui berikut:

Tabel 3. 11 Capaian Nilai Realisasi PNBPN

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perijinan			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Realisasi PNBPN	Rp1.978.098.000.000,00	Rp1.926.505.948.465,05	97,39%

Capaian realisasi PNBPN diperoleh atas target penerimaan dari Unit Badan Usaha dan Unit Penghasil, antara lain sebagai berikut:

1. Biro Keuangan memperoleh Penerimaan sebesar Rp95.442.524.204,60;
2. Kantor Perwakilan memperoleh Penerimaan sebesar Rp61.711.977,00;
3. Pusat Data dan Sistem Informasi memperoleh Penerimaan sebesar Rp11.160.512.900,00;
4. Direktorat Pengelolaan Lahan memperoleh Penerimaan sebesar Rp436.485.197.628,33;
5. Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan memperoleh Penerimaan sebesar Rp468.497.455.827,93;
6. Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara memperoleh Penerimaan sebesar Rp125.427.540.987,24;
7. Direktorat Lalu Lintas Barang memperoleh Penerimaan sebesar Rp1.985.650.000.00;
8. Badan Usaha Rumah Sakit memperoleh Penerimaan sebesar Rp173.671.179.915,80
9. Badan usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan memperoleh Penerimaan sebesar Rp604.904.422.653,15; dan
10. Direktorat Pembangunan Infrastruktur memperoleh Penerimaan sebesar Rp8.869.752.371,00.

Adapun rendahnya capaian realisasi PNBPN Tahun 2025 dipengaruhi oleh kebijakan moratorium terhadap proses alokasi lahan baru. Permohonan pembukaan moratorium oleh BP Batam baru memperoleh persetujuan dari Komisi VI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 15 September 2025. Selain itu, hingga periode pelaporan, penerimaan Uang Wajib Tahunan (UWT) dari pengembangan Kawasan Rempang *Eco City* belum dapat direalisasikan, sehingga berdampak pada capaian penerimaan secara keseluruhan.

Lebih lanjut, rendahnya realisasi PNBPN pada Badan Usaha Rumah Sakit (BURS) disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Keterbatasan kapasitas tempat tidur. Sesuai dengan standar Rumah Sakit Tipe B, kapasitas ideal tempat tidur adalah sebanyak 200 unit. Namun demikian, kapasitas eksisting yang dapat dioperasikan saat ini baru mencapai 169 tempat tidur, sehingga terdapat keterbatasan dalam menampung pasien. Kondisi tersebut berdampak pada potensi pelayanan yang tidak dapat terlayani secara optimal dan berimplikasi pada penurunan penerimaan PNBPN;
2. Penerapan sistem rujukan berjenjang bagi peserta BPJS Kesehatan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) wajib merujuk pasien terlebih dahulu ke Rumah Sakit Tipe C sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Tipe B. Mekanisme ini mempengaruhi jumlah pasien rujukan yang diterima, sehingga berdampak pada volume layanan dan penerimaan rumah sakit.
3. Belum terealisasinya inisiatif strategis yang direncanakan. Beberapa program strategis yang diusulkan, seperti pengadaan alat kesehatan, renovasi Gedung D, serta pengembangan layanan Hemodialisa, belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2025. Keterlambatan pelaksanaan inisiatif tersebut berdampak pada belum optimalnya peningkatan kapasitas dan diversifikasi layanan yang berpotensi meningkatkan PNBPN.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Capaian Realisasi PNBPN tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat dan mengetahui perkembangan capaian kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024 serta terhadap target kinerja pada akhir Renstra seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 12 Perbandingan Nilai Realisasi PNBP

Sasaran Strategis			Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perijinan					
Indikator Kinerja Utama			Nilai Realisasi PNBP					
2023			2024			2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rp1,8 T	Rp1,64 T	92,14	Rp2,13 T	Rp2,29 T	107,73	Rp1,98 T	Rp1,93 T	97,39

Realisasi jumlah PNBP tahun 2023 yaitu sebesar 1.642.171.399.713,50 atau setara 92,14% dari target Rp1.782.248.980.000,00. Pada tahun 2024 Realisasi PNBP tercapai Rp2.295.435.197.773,88 dari target Rp2.130.730.260.000,00 atau 107,73%. Sedangkan Realisasi PNBP Tahun 2025 tercapai Rp1.926.505.948.465,05 dari target Rp1.978.098.000.000,00 atau 97,39%.

Terjadinya penurunan target penerimaan Tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun 2024 disebabkan oleh proses penyusunan target Tahun 2025 dilakukan pada Tahun 2023 dengan mengacu pada *baseline* realisasi Tahun 2023 serta *outlook* Tahun 2024. Usulan target PNBP tersebut telah dibahas bersama pimpinan dan Dewan Pengawas, serta disepakati agar penetapan target dilakukan secara lebih realistis dengan mempertimbangkan tren capaian realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, target penerimaan Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1,9 triliun.

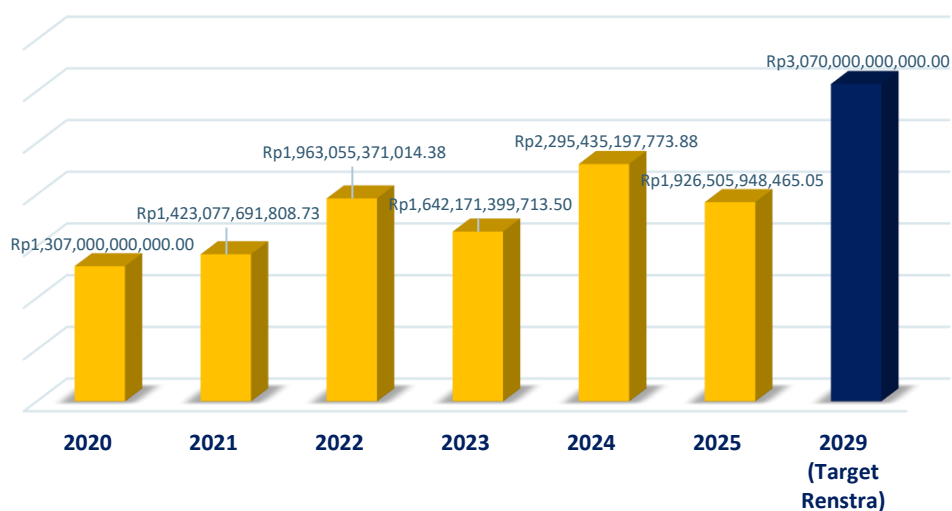
Penurunan target tersebut terutama terjadi pada komponen penerimaan dari sektor layanan lahan dan SPAM. Pada sektor lahan, penurunan dipengaruhi oleh proses pembahasan alokasi lahan Rempang yang masih berlangsung pada saat penyusunan target. Sementara itu, pada sektor SPAM, perhitungan target pada saat itu masih mengacu pada skema kerja sama yang sedang dalam proses penyesuaian.

Lebih lanjut, penetapan target penerimaan BP Batam Tahun 2025 juga telah mempertimbangkan rata-rata kemampuan realisasi PNBP

dalam beberapa tahun terakhir, proyeksi penerimaan dari layanan pertanahan dalam rangka pengembangan Kawasan Rempang yang masih dalam proses penyelesaian, serta dinamika pengelolaan kerja sama pemanfaatan aset pada beberapa unit layanan.

Tren pertumbuhan Realisasi PNBP BP Batam tahun 2020-2025 dan Target Akhir Renstra 2029 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 9 Tren Pertumbuhan Realisasi PNBP Tahun 2020 - Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra 2029



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Renstra

Tabel 3. 13 Perbandingan Nilai Realisasi PNBP dengan Target Renstra BP Batam

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perijinan			
Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
Nilai Realisasi PNBP	Rp1,93 T	Rp3,07 T	62,75%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Rencana Strategis BP Batam Tahun 2025–2029, Nilai Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perizinan tercatat sebesar Rp1,93 Triliun. Capaian tersebut setara dengan

62,75% dari target akhir Renstra Tahun 2029 yang ditetapkan sebesar Rp3,07 Triliun. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi PNBPN pada Tahun 2025 telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target jangka menengah, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan agar target akhir Renstra dapat tercapai secara optimal pada akhir periode perencanaan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dalam Capaian Kinerja

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BP Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp1,93 Triliun atau 97,39% dari target yang di perjanjikan dalam Kontrak Kinerja Kepala BP Batam Tahun 2025 yaitu Rp1,978 Triliun, sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2029 tingkat kemajuan sebesar 62,75% dari target akhir Renstra Tahun 2029 yang menunjukkan capaian yang cukup baik pada tahun awal pelaksanaan Renstra. Keberhasilan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh berbagai upaya yang telah dilakukan oleh BP Batam. Adapun upaya yang telah dilaksanakan BP Batam dalam mencapai target realisasi PNBPN, yaitu:

- a) Optimalisasi peningkatan layanan sesuai dengan bidang usaha pada Badan Usaha dan Unit Kerja Penghasil guna tercapainya target PNBPN;
- b) Melakukan evaluasi terhadap layanan terkait regulasi, pentarifan, sumber daya manusia (SDM);
- c) Penyiapan sarana prasarana yang dapat meningkatkan penerimaan PNBPN;
- d) Pengembangan di bidang IT sehingga lebih mempermudah layanan PNBPN.

Namun demikian, capaian PNBPN belum sepenuhnya optimal apabila dibandingkan dengan target yang di tetapkan pada tahun 2025, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a) Regulasi dan Kebijakan yang belum mendukung Optimalisasi Layanan;

- b) Penggunaan anggaran belanja yang tidak terlalu berdampak pada peningkatan PNPB; dan
- c) Sarana Prasarana Pendukung belum memadai.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian realisasi PNPB pada Tahun 2025 mencerminkan pemanfaatan sumber daya yang relatif efisien, baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana pendukung. Optimalisasi proses layanan berbasis digital, penguatan koordinasi antarunit kerja telah berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas realisasi PNPB. Dalam mencapai kinerja Nilai Realisasi PNPB Tahun 2025, efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan beberapa langkah berikut:

- Optimalisasi pemanfaatan sistem layanan berbasis teknologi informasi dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas layanan kepada pengguna jasa; dan
- Pemanfaatan sarana dan prasarana layanan secara optimal untuk mendukung kelancaran operasional pelayanan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pencapaian realisasi PNPB BP Batam tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan penerimaan, antara lain:

- a) Koordinasi dengan Unit Kerja terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- b) Koordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
- c) Memperluas potensi investasi dan atau kerja sama dengan pihak swasta.

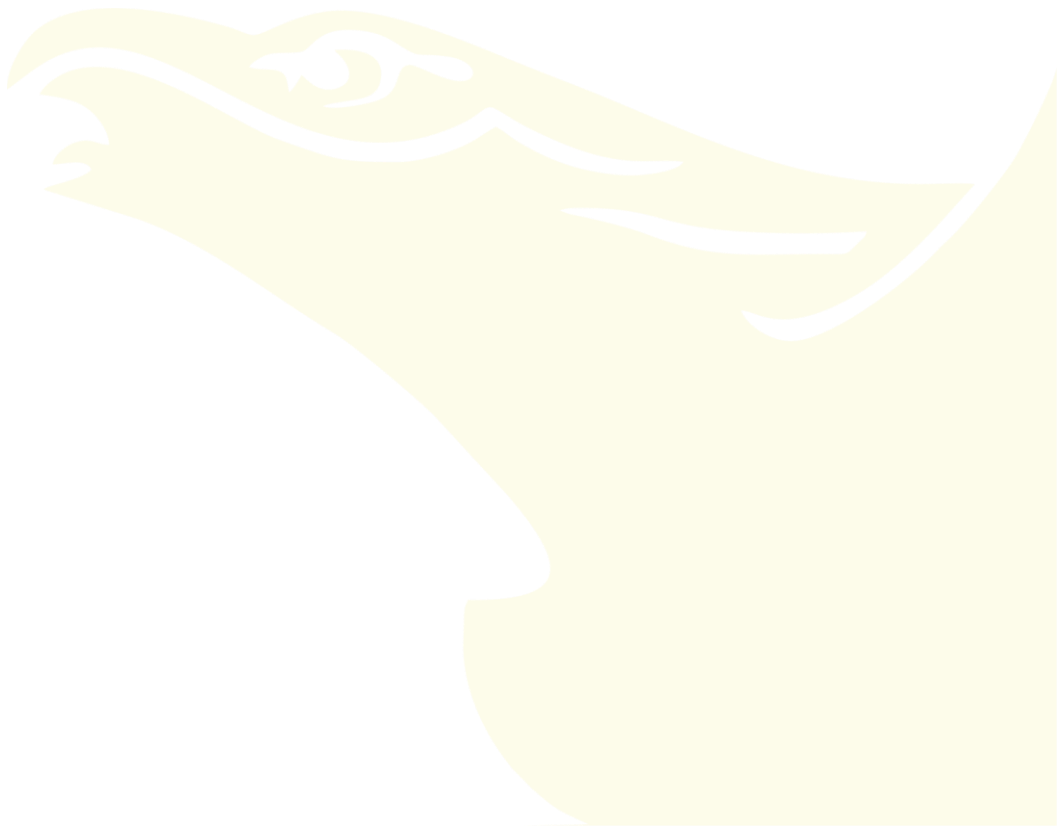
Di sisi lain, masih terdapat program dan kegiatan yang menyebabkan PNPB Tahun 2025 belum mencapai target PNPB Tahun 2025, antara lain:

- a) Kebijakan terkait pengalokasian di Direktorat Pengelolaan Lahan;
- b) Regulasi dan kebijakan yang belum mendukung optimalisasi layanan PNPB;

- c) Perjanjian kerja sama yang perlu dievaluasi kembali guna penerimaan yang lebih optimal.

Oleh karena itu, pada periode selanjutnya diperlukan beberapa upaya agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal, diantaranya:

- a) Regulasi dan kebijakan yang lebih optimal;
- b) Monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama; dan
- c) Peningkatan sarana dan prasarana pada jasa layanan BP Batam.





3.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis 3, Indikator Kinerja Utama (IKU) **3.1 Indeks Reformasi Birokrasi**. Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan RB dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.

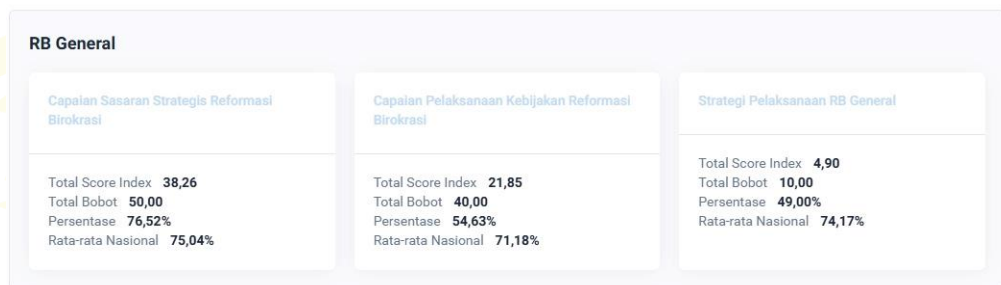
Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program RB dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan BP Batam.

Tabel 3. 14 Rentang Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1.	AA	> 100	Sangat Memuaskan
2.	A	> 80 – 100	Memuaskan
3.	A-		Memuaskan dengan catatan
4.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
5.	B	> 60 – 70	Baik
6.	CC	> 50 – 60	Cukup
7.	C	> 30 - 50	Kurang
8.	D	0 – 30	Sangat Kurang

Realisasi atas indikator ini, menggunakan data Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB melalui Portal RB Nasional (<https://www.portalrb.id/>). Nilai hasil evaluasi sementara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 adalah 68,58 dengan kategori “B” dan Predikat Baik dengan rincian sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3. 10 Tangkap Layar Nilai Evaluasi Sementara RB pada portal RB Nasional



RB General			
Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	
Total Score Index 38,26 Total Bobot 50,00 Persentase 76,52% Rata-rata Nasional 75,04%		Total Score Index 21,85 Total Bobot 40,00 Persentase 54,63% Rata-rata Nasional 71,18%	
Strategi Pelaksanaan RB General			
Total Score Index 4,90 Total Bobot 10,00 Persentase 49,00% Rata-rata Nasional 74,17%			

Sumber: <https://www.portalrb.id/>

Nilai 68,58 merupakan akumulasi *Total Score Index* dari capaian seluruh komponen evaluasi Reformasi Birokrasi (Sasaran Strategis, Pelaksanaan Kebijakan, dan Strategi Pelaksanaan RB) sebagaimana tercantum pada tabel di atas, yang saat ini masih merupakan nilai evaluasi sementara dari Kementerian PANRB.

a. Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Tabel 3. 15 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			
Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Indeks Reformasi Birokrasi	80 BB (Sangat Baik)	68,58 B (Baik)	85,73%

Berdasarkan tabel perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2025, diketahui bahwa Indeks Reformasi Birokrasi sebagai Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 ditargetkan mencapai nilai 80 dengan predikat BB (Sangat Baik).

Namun demikian, realisasi kinerja yang dicapai pada Tahun 2025 belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Ketidaktercapaian target tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya pemenuhan seluruh komponen penilaian Reformasi Birokrasi serta masih perlunya penguatan implementasi kebijakan dan tata kelola organisasi secara berkelanjutan.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Tabel 3. 16 Perbandingan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis			Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel					
Indikator Kinerja Utama			Indeks Reformasi Birokrasi					
2023			2024			2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	64,29 B (Baik)	-	67 B (Baik)	71,91 BB (Sangat Baik)	110,63%	80 BB (Sangat Baik)	68,58 B (Baik)	85,73%

Berdasarkan data capaian tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, nilai Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan dinamika kinerja yang fluktuatif. Pada Tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi tercatat sebesar 64,29 (kategori B/Baik). Selanjutnya pada Tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan menjadi 71,91 (kategori BB/Sangat Baik), yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BP Batam.

Pada Tahun 2025, ditetapkan target sebesar 80 (kategori BB/Sangat Baik), dengan realisasi sebesar 68,58 (kategori B/Baik) atau capaian sebesar 85,73% terhadap target. Nilai 68,58 tersebut merupakan hasil evaluasi sementara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang masih menunggu penetapan nilai final setelah selesainya masa sanggah.

Perlu dijelaskan bahwa pada Tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi belum menjadi indikator kinerja pada Kontrak Kinerja Kepala BP Batam, melainkan masih tercantum dan diukur pada Perjanjian Kinerja Anggota Bidang Kebijakan Strategis yang menangani fungsi

Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, mulai Tahun 2025, Indeks Reformasi Birokrasi ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Kepala BP Batam, sehingga pertanggungjawaban capaian indikator tersebut berada langsung pada level pimpinan instansi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Renstra

Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi dengan Target Renstra BP Batam

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			
Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	68,58 B (Baik)	AA (Sangat Memuaskan)	68,57%

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BP Batam, target akhir Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2029 ditetapkan kategori AA pada Nilai > 100 dengan predikat Sangat Memuaskan. Sementara itu, realisasi Tahun 2025 tercatat sebesar 68,58 (kategori B/Baik).

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2029, capaian Tahun 2025 menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 68,57%, yang menggambarkan bahwa lebih dari separuh target jangka menengah telah tercapai. Namun demikian, masih terdapat selisih sebesar 31,43 poin persentase menuju target akhir Renstra.

Capaian ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi percepatan Reformasi Birokrasi pada periode 2026-2029 sehingga target akhir renstra 2029 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) pada akhir periode Renstra dapat direalisasikan secara optimal.

Perlu disampaikan bahwa realisasi Tahun 2025 sebesar 68,58 masih merupakan hasil evaluasi sementara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang akan disesuaikan apabila telah ditetapkan secara final.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dalam Capaian Kinerja

Sebagian besar *Person in Charge* (PIC) komponen Indeks Reformasi Birokrasi (RB) telah memiliki pemahaman yang memadai serta telah menjalin koordinasi yang baik dengan instansi pengampu. Kondisi tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pemenuhan data dukung pada masing-masing unit kerja.

Namun demikian, dinamika dan struktur organisasi BP Batam turut mempengaruhi optimalisasi pemenuhan data dukung yang dipersyaratkan oleh instansi pengampu. Sebagai contoh pada komponen Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), masih terdapat kebutuhan pemenuhan jabatan fungsional tertentu sebagai prasyarat penilaian. Selain itu, tingkat pemahaman sebagian unit kerja, khususnya PIC komponen Indeks RB, terhadap substansi dan kelengkapan data dukung yang dipersyaratkan masih perlu ditingkatkan guna memastikan capaian nilai yang lebih optimal.

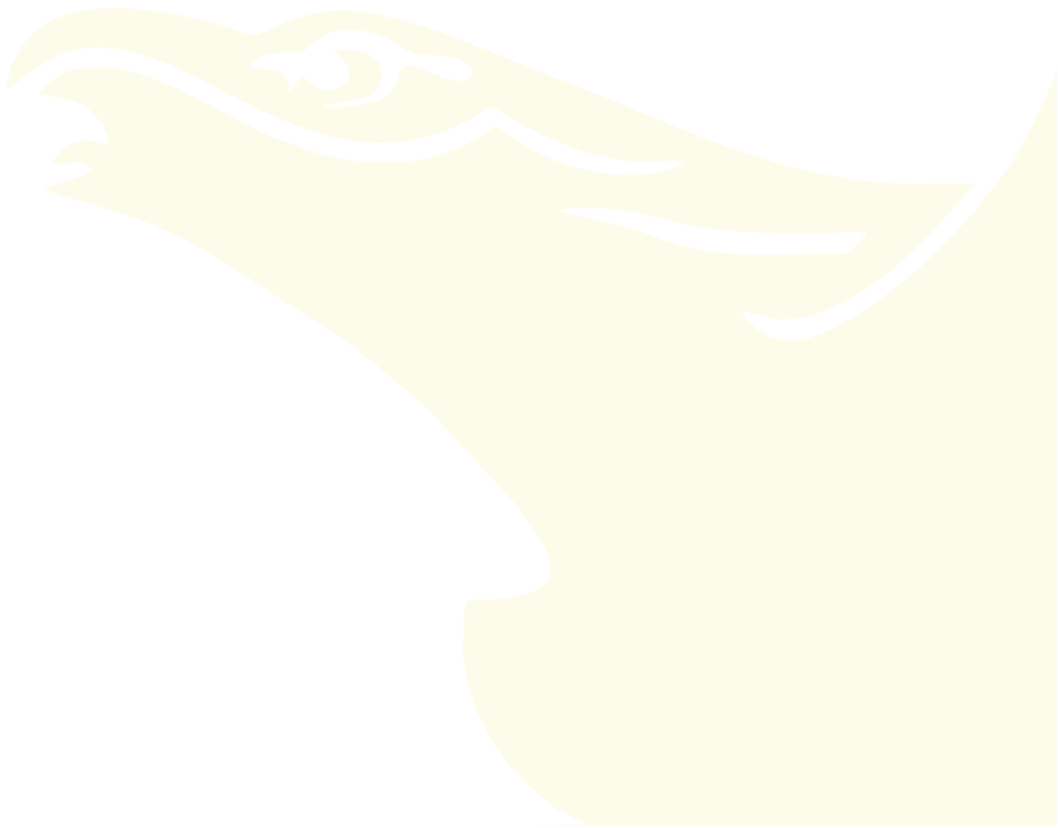
e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pemenuhan kebutuhan sumber daya dalam mendukung pencapaian target kinerja dinilai masih belum memadai. Di sisi lain, pelibatan sumber daya manusia yang tersedia belum sepenuhnya optimal, serta dukungan anggaran terhadap upaya pencapaian target kinerja masih terbatas. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Biro Organisasi, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko (OKMR) telah melaksanakan koordinasi secara intensif dengan unit pengampu maupun antarunit *Person in Charge* (PIC) dalam rangka pemenuhan data dukung komponen Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian substansi, kelengkapan dokumen, serta ketepatan waktu penyampaian data dukung sesuai dengan ketentuan instansi pengampu.

Sebagai tindak lanjut dalam upaya pencapaian target kinerja ke depan, akan dilaksanakan kegiatan seperti *Focus Group Discussion* (FGD), Bimbingan Teknis (Bimtek), dan konsinyering yang didahului dengan analisis kebutuhan secara komprehensif. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan kontribusi nyata dan terukur terhadap peningkatan capaian kinerja.





3.2 Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

Sasaran Strategis 3 dengan Indikator Kinerja Utama **3.2 Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU** adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan BLU untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara handal yang dilakukan dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi sehingga sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Persentase penyelesaian pengembangan modernisasi BLU pada tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) indikator dengan dasar nilai integrasi data dan operasionalisasi BIOS. Integrasi data bobot 20% dan Operasionalisasi BIOS bobot 80%.

Target Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU Tahun 2025 adalah 80%. Tujuan dari Indikator ini adalah untuk mengukur tingkat modernisasi pengelolaan sumber daya BLU dalam rangka mendukung peningkatan layanan, akuntabilitas dan akurasi manajemen dalam pengambilan keputusan.

a. Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Tabel 3. 18 Capaian Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			
Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	80%	100%	125%

Berdasarkan perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU pada Sasaran Strategis 3 ditargetkan sebesar 80%. Realisasi kinerja yang dicapai pada Tahun 2025 sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 125%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan modernisasi pengelolaan BLU telah dilaksanakan secara optimal dan melampaui target yang ditetapkan, serta mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung penguatan tata kelola organisasi BP Batam.

Tabel 3. 19 Uraian Capaian Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

Tahap	Uraian	Target	Bobot	Realisasi	Capaian	Persentase Capaian
I	Integrasi Data	80%	20%	20%	100%	125%
II	Operasionalisasi BIOS		80%	80%		

Pada Tahap I (Integrasi Data), realisasi capaian mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena sistem integrasi data telah tersedia dan terkonfigurasi sejak awal, sehingga tidak memerlukan perubahan signifikan serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Untuk menjaga konsistensi kinerja, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan proses pengiriman data berjalan dengan baik, akurat, dan tanpa kendala teknis.

Pada Tahap II (Operasionalisasi BIOS), capaian kinerja juga telah terpenuhi sesuai target, dimana pelaksanaan periode pelaporan serta pembaruan (*update*) data telah diunggah secara tepat waktu sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dan permintaan data oleh PPK BLU.

Secara keseluruhan, berdasarkan pembobotan pada Tahap I sebesar 20% dan Tahap II sebesar 80%, capaian kumulatif menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan persentase capaian sebesar 125%, melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini

mencerminkan efektivitas implementasi sistem serta optimalnya pelaksanaan operasional pada kedua tahapan tersebut.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Tabel 3. 20 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

Sasaran Strategis			Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel					
Indikator Kinerja Utama			Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU					
2023			2024			2025		
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
100	96,61	96,61	100	100	100	80	100	125

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU menunjukkan capaian yang relatif konsisten. Pada Tahun 2023, realisasi kinerja mencapai 96,61% dari target 100%, sedangkan pada Tahun 2024 realisasi kinerja telah mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 80% dengan realisasi kinerja mencapai 100%, sehingga menunjukkan kinerja yang melampaui target.

Indikator kinerja ini merupakan IKU yang bersifat *mandatory* dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Dit. PPK BLU), Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga penetapan target kinerja pada setiap tahun merupakan target yang ditetapkan oleh Dit. PPK BLU kepada BP Batam. Capaian tersebut mencerminkan komitmen BP Batam dalam memenuhi kewajiban kinerja BLU sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pembina.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Renstra

Tabel 3. 21 Perbandingan Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU dengan Target Renstra BP Batam

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			
Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%	-	-

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU menunjukkan realisasi sebesar 100%. Namun demikian, indikator ini merupakan IKU yang bersifat mandatory dari PPK BLU, sehingga tidak tercantum sebagai indikator dalam Rencana Strategis BP Batam dan tidak memiliki target akhir Renstra Tahun 2029. Oleh karena itu, capaian kinerja indikator ini dievaluasi berdasarkan pemenuhan target tahunan yang ditetapkan oleh PPK BLU, serta digunakan sebagai instrumen pengukuran kepatuhan dan efektivitas pengelolaan BLU di lingkungan BP Batam.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dalam Capaian Kinerja

Realisasi Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU pada Tahun 2025 yang mencapai 100% dari target 80% dengan penilaian capaian yaitu 125%, hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program modernisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh komitmen pimpinan dalam mendorong modernisasi pengelolaan BLU, pelaksanaan monitoring secara rutin, serta koordinasi yang efektif antarunit kerja terkait, transformasi digital layanan yang semula secara manual menjadi sistem digital. Selain itu, dukungan dari Pembina Pengelolaan

Keuangan BLU turut memberikan kepastian dalam pelaksanaan tahapan modernisasi sehingga kedua tahap yaitu Integrasi data dan Operasionalisasi BIOS dapat tercapai maksimal sesuai bobotnya.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian target modernisasi pengelolaan BLU secara penuh mencerminkan pemanfaatan sumber daya yang efisien, baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana pendukung. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang telah ada, peningkatan kapasitas SDM melalui pembagian peran yang jelas, serta sinergi antarunit kerja dalam memenuhi dan melengkapi indikator dalam dalam tahap Integrasi data dan Operasionalisasi BIOS.

Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut tercermin dari kemampuan BP Batam dalam menyelesaikan seluruh tahapan modernisasi sesuai dengan target tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis, antara lain pengembangan dan integrasi sistem informasi pengelolaan BLU, penyempurnaan proses bisnis dan standar operasional prosedur, serta peningkatan kapasitas SDM melalui koordinasi dan asistensi teknis. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh tahapan modernisasi berjalan sesuai dengan rencana, salah satu kegiatan yang mendukung pencapaian Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU yaitu pelaksanaan Bimtek "Peningkatan Tata Kelola BP Batam melalui Implementasi BIOS dan Strategi Pencapaian Indeks *Maturity Rating*" yang di gelar pada hari Selasa (28/10/2025) di IT Centre, Batam Centre dengan mengundang narasumber dari narasumber dari Direktorat PPK BLU Kementerian Keuangan.

Gambar 3. 11 Bimtek Peningkatan Tata Kelola BP Batam melalui Implementasi BIOS dan Strategi Pencapaian Indeks *Maturity Rating*



Meskipun tidak terdapat kegagalan yang signifikan dalam pencapaian indikator ini, ke depan diperlukan penguatan keberlanjutan implementasi hasil modernisasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal dalam peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas layanan BLU.

SASARAN STRATEGIS 3 TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ORGANISASI BP BATAM YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL

Indikator Kinerja Utama 3.3 Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu



3.3 Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu

Penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu adalah tindaklanjut yang dilaksanakan oleh BLU atas rekomendasi/saran/masukan yang disampaikan dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi, berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Perhitungan capaian kinerja penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu, dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{tindaklanjut Hasil Temuan Monitoring dan Evaluasi}}{\sum \text{temuan hasil monitoring dan evaluasi}} \times 100\%$$

Apabila capaian sebesar $\geq 100\%$ diakui sebesar 100% dan berhak mendapatkan kelebihan capaian dihitung berdasarkan:

1. Kecepatan waktu penyampaian tindak lanjut rekomendasi
2. Ketepatan tindak lanjut rekomendasi dan dinyatakan selesai.

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan responsibilitas BLU dan komitmen dalam perbaikan yang dilaksanakan terus menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, guna menunjang pelayanan BLU yang berkesinambungan dan peningkatan kinerja BLU.

a. Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Tabel 3. 22 Capaian Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			
Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu	92%	88,21%	95,88%

Berdasarkan perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, dan SPI secara Tepat Waktu pada Sasaran Strategis 3 ditargetkan sebesar 92%. Realisasi kinerja yang dicapai pada Tahun 2025 sebesar 88,21%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 95,88%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti secara tepat waktu, namun masih diperlukan penguatan koordinasi dan pengendalian internal agar target kinerja dapat tercapai secara optimal. Uraian Capaian Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Uraian Capaian Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu

Indikator Kinerja Utama		Target	Rekomendasi hasil Monev	Monev yang di tindak lanjuti	Persentase hasil tindak lanjut	Rata-rata	Persentase Capaian
Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu	PPK BLU	92%	N/A	N/A	N/A	88,21%	95,88%
	Pembina Teknis		N/A	N/A	N/A		
	BPK		789	695	88,09%		
	SPI		900	795	88,33%		

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Tabel 3. 24 Perbandingan capaian Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu

Sasaran Strategis			Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel					
Indikator Kinerja Utama			Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu					
2023			2024			2025		
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
-	-	-	90	100	100	92	88,21	95,88

Indikator Kinerja Utama Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, dan SPI secara Tepat Waktu merupakan IKU yang bersifat mandatory dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Dit. PPK BLU), Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga target kinerja yang ditetapkan merupakan target yang ditentukan oleh PPK BLU kepada BP Batam.

Indikator ini belum diterapkan pada Tahun 2023, baru mulai diukur pada Tahun 2024 dan Tahun 2025. Pada Tahun 2024, target kinerja ditetapkan sebesar 90% dengan realisasi kinerja mencapai 100%, sedangkan pada Tahun 2025 target kinerja meningkat menjadi 92% dengan realisasi kinerja sebesar 88,21%. Capaian tersebut menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, meskipun pada Tahun 2025 masih terdapat selisih terhadap target yang ditetapkan oleh PPK BLU.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Renstra

Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu dengan Target Renstra BP Batam

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			
Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu	88,21%	-	-

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, dan SPI secara Tepat Waktu menunjukkan realisasi kinerja sebesar 88,21%. Namun demikian, indikator kinerja ini merupakan IKU yang bersifat mandatory dari PPK BLU, sehingga tidak tercantum dalam Rencana Strategis BP Batam dan tidak memiliki target akhir Renstra Tahun 2029. Oleh karena itu, evaluasi kinerja indikator ini difokuskan pada pemenuhan target tahunan yang ditetapkan oleh Dit. PPK BLU sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan BLU.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dalam Capaian Kinerja

Capaian kinerja indikator Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam pencapaian target indikator kinerja Satuan Pemeriksaan Intern telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Aksi Monitoring Tindak Lanjut ... Rekomendasi bersama unit kerja;
2. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala; dan

3. Memberikan pendampingan/jasa konsultasi dalam upaya penyelesaian tindak lanjut.

Namun demikian terdapat kendala dalam pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI sehingga target belum dapat dicapai. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat temuan lama yang tidak bisa ditindaklanjuti disebabkan karena beberapa hal seperti perubahan SOTK yang menyebabkan unit penanggungjawab sudah tidak eksis lagi dan telah terjadi perubahan tugas dan fungsi;
2. Kesadaran unit kerja dalam menindaklanjuti temuan masih rendah.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja indikator ini meliputi monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan SPI secara semesteran serta koordinasi intensif dengan auditee/unit kerja dan BPK. Kegiatan tersebut terbukti memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan unit kerja terhadap penyelesaian rekomendasi dan menjaga kesinambungan proses pemantauan tindak lanjut.

Namun demikian, efektivitas program belum sepenuhnya optimal. Monitoring yang dilakukan secara periodik belum sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme percepatan tindak lanjut, antara lain karena pembentukan tim monitoring tindak lanjut yang masih terbatas per semester serta belum adanya sistem sanksi yang tegas bagi unit kerja yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tepat waktu. Kondisi ini berdampak pada masih adanya rekomendasi yang belum dapat diselesaikan sesuai target waktu yang ditetapkan.

Ke depan, penguatan program melalui penguatan kapasitas dan jumlah auditor SPI, serta penerapan sanksi sesuai ketentuan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dan mendorong capaian kinerja indikator secara lebih optimal.



3.4 Peningkatan Nilai *Maturity Rating* BLU

Maturity Rating BLU merupakan sebuah kerangka penilaian yang berfokus pada *process & performance improvement*. Rating tersebut ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan bertujuan untuk mendorong BLU untuk secara terus menerus bertumbuh mengikuti perkembangan dan kebutuhan pengguna layanan. Terdapat 6 (enam) aspek penilaian yakni Keuangan, Pelayanan, Kapabilitas Internal, Tata Kelola dan Kepemimpinan, Inovasi, dan Lingkungan.

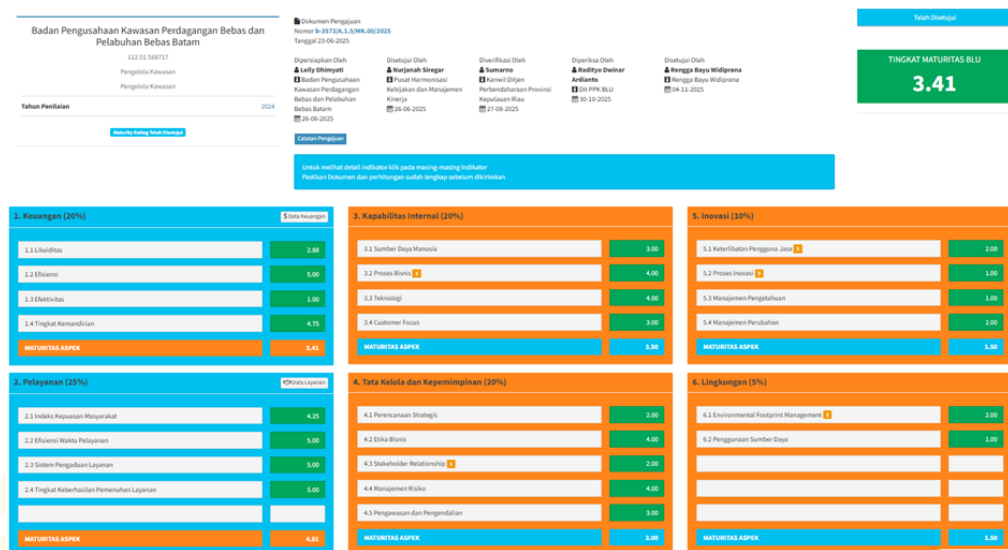
a. Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Tabel 3. 26 Capaian Peningkatan Nilai Maturity Rating BLU

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			
Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Peningkatan Nilai Maturity Rating BLU	3,38	3,41	100,89

Pada tahun 2025, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Direktur PPK BLU merilis skor maturity rating BP Batam tahun 2024 sebesar 3,41 atau 100,89% dari target 3,38. Pada level tersebut BLU mampu mendokumentasikan aktivitas secara standar yang dituangkan dalam bentuk prosedur baku. Skor tersebut didapat atas penilaian pada tiap-tiap aspek, sebagai berikut:

Gambar 3. 12 Dashboard Penilaian Maturity Rating



Setidaknya terdapat 5 (lima) level maturitas dalam BLU maturity rating yakni level 1 - BLU masih berada pada tahap permulaan, aktivitas yang digunakan sebagai dasar pengukuran maturitas bersifat ad-hoc, level 2 - BLU memiliki kapabilitas untuk melakukan aktivitas yang bersifat *repeatable*, meskipun belum terdokumentasikan secara standar, level 3 - BLU mampu mendokumentasikan aktivitas pada level 2 secara standar yang dituangkan dalam bentuk prosedur baku, level 4 - BLU mampu mendefinisikan, mengendalikan dan memprediksi proses untuk menjaga kualitas layanan maupun *output* yang diberikan kepada publik, dan level 5 - BLU telah mencapai tahap kesempurnaan dan berorientasi pada inovasi dan peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Berdasarkan hasil penilaian Maturity Rating Badan Layanan Umum (BLU), BP Batam memperoleh Tingkat Maturitas BLU sebesar 3,41, yang menunjukkan bahwa BP Batam telah berada pada Level 3 *Defined* dalam pengelolaan BLU. Capaian tersebut mencerminkan bahwa proses bisnis, tata kelola, dan sistem manajemen kinerja BP Batam telah terdefinisi dengan baik, terintegrasi, serta dijalankan secara konsisten, bahkan sebagian telah mengarah pada praktik perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) sehingga

menunjukkan tren peningkatan Tingkat Maturitas BP Batam setiap tahunnya.

Dari enam indikator penilaian, aspek Pelayanan menjadi kontributor utama dengan capaian sangat baik, ditunjukkan melalui tingginya Indeks Kepuasan Masyarakat, efisiensi waktu layanan, efektivitas sistem pengaduan, serta tingkat keberhasilan pemenuhan layanan. Hal ini menggambarkan komitmen BP Batam dalam memberikan pelayanan publik yang prima, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa. Selanjutnya, aspek Keuangan menunjukkan kondisi yang relatif sehat, tercermin dari tingkat efisiensi dan kemandirian yang tinggi, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada efektivitas pengelolaan keuangan agar selaras dengan pencapaian target kinerja secara optimal.

Pada aspek Kapabilitas Internal, BP Batam telah memiliki proses bisnis dan dukungan teknologi yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Namun demikian, penguatan kapasitas sumber daya manusia serta peningkatan orientasi pada *Costumer focus* masih perlu terus dioptimalkan. Sementara itu, aspek Tata Kelola dan Kepemimpinan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip perencanaan strategis, etika bisnis, manajemen risiko, serta pengawasan dan pengendalian telah diterapkan, meskipun *Stakeholders Relationships* masih memerlukan peningkatan.

Adapun aspek Inovasi dan Lingkungan masih menjadi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Skor yang relatif rendah pada kedua aspek tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan inovasi yang terstruktur, pengelolaan pengetahuan, serta penerapan prinsip keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, ke depan BP Batam perlu mendorong inovasi yang terdokumentasi dan terukur serta mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kebijakan dan proses bisnis organisasi.

Secara keseluruhan, capaian Tingkat Maturitas BLU sebesar 3,41 menunjukkan bahwa BP Batam telah berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan pengelolaan BLU yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan area strategis yang masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tingkat maturitas yang lebih optimal.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Tabel 3. 27 Perbandingan Capaian Peningkatan Nilai Maturity Rating BLU

Sasaran Strategis			Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel					
Indikator Kinerja Utama			Peningkatan Nilai Maturity Rating BLU					
2023			2024			2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	3,20	3,29	102,81	3,38	3,41	100,89

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) Peningkatan Nilai Maturity Rating BLU menunjukkan tren peningkatan yang konsisten pada periode pengukuran. Pada Tahun 2024, realisasi capaian sebesar 3,29 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,20. Selanjutnya, pada Tahun 2025, realisasi capaian kembali melebihi target dengan nilai 3,41 dari target 3,38. Perlu disampaikan bahwa IKU ini merupakan indikator yang bersifat *mandatory (given)* dari Direktorat PPK BLU, sehingga penetapan target sepenuhnya mengacu pada target yang ditetapkan oleh PPK BLU kepada BP Batam. Adapun pada Tahun 2023, IKU ini belum ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kepala BP Batam sehingga tidak terdapat target maupun realisasi kinerja pada tahun tersebut.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Renstra

Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi Nilai *Maturity Rating* BLU dengan Target Renstra BP Batam

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			
Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
Peningkatan Nilai <i>Maturity Rating</i> BLU	3,41	-	-

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Rencana Strategis, IKU Peningkatan Nilai *Maturity Rating* BLU mencatat realisasi sebesar 3,41. Namun demikian, indikator ini tidak memiliki target akhir dalam dokumen Renstra BP Batam 2025-2029, mengingat IKU tersebut merupakan indikator mandatory yang ditetapkan oleh Direktorat PPK BLU dan tidak termasuk dalam perencanaan strategis jangka menengah BP Batam. Oleh karena itu, capaian kinerja IKU ini dievaluasi berdasarkan pemenuhan target tahunan yang ditetapkan oleh PPK BLU, bukan terhadap target akhir Renstra.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dalam Capaian Kinerja

Capaian *maturity rating* BP Batam sebesar 3,41 yang melampaui target 3,38 menunjukkan bahwa kinerja organisasi berada pada kategori “Baik” dan telah melampaui ekspektasi perencanaan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

- **Penguatan Tata Kelola Internal**
Implementasi sistem pengendalian internal, standar operasional prosedur (SOP), serta pemantauan kinerja yang konsisten telah meningkatkan efektivitas proses bisnis dan kualitas pengambilan keputusan.
- **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Nilai tinggi pada aspek pelayanan mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan pada kecepatan, transparansi, dan kepuasan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

- **Komitmen Pimpinan dan Koordinasi Antar Unit**
Kepemimpinan yang kuat dan kolaborasi lintas unit kerja berkontribusi signifikan dalam memastikan program berjalan sesuai rencana dan target kinerja dapat dicapai.
- **Pemanfaatan Teknologi Informasi**
Digitalisasi proses dan penggunaan sistem informasi kinerja mendorong peningkatan akurasi data, efisiensi waktu, serta kemudahan monitoring dan evaluasi.

Meskipun capaian telah melampaui target, masih terdapat ruang perbaikan pada Aspek inovasi dan lingkungan, yang memerlukan penguatan budaya inovatif dan optimalisasi pengelolaan sumber daya berkelanjutan agar *maturity rating* dapat meningkat ke level yang lebih tinggi.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian kinerja sebesar 100,89% dari target menunjukkan bahwa BP Batam mampu mengelola sumber daya secara efisien dan proporsional. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Optimalisasi Sumber Daya Manusia**
Penempatan SDM yang sesuai kompetensi serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan berkontribusi pada peningkatan produktivitas organisasi.
- **Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi Proses**
Penggunaan sistem digital yang mengurangi beban administratif serta mempercepat proses kerja.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pencapaian *maturity rating* 3,41 tidak terlepas dari kontribusi berbagai program dan kegiatan strategis yang dijalankan BP Batam, antara lain:

- Program Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Kinerja
 - Penyempurnaan perencanaan kinerja berbasis indikator yang terukur;
 - Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkalaProgram ini berperan besar dalam meningkatkan konsistensi dan akuntabilitas kinerja organisasi.
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Simplifikasi proses layanan
 - Penerapan standar pelayanan dan survei kepuasan masyarakatProgram ini berdampak langsung pada peningkatan nilai aspek pelayanan.
- Program Transformasi Digital dan Teknologi Informasi
 - Digitalisasi proses bisnis;
 - Pemanfaatan aplikasi pendukung kinerja dan pelaporanProgram ini mendukung efisiensi kerja sekaligus peningkatan kualitas data kinerja.
- Program Penguatan Kapabilitas SDM dan Kepemimpinan
 - Pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kompetensi
 - Penguatan peran pimpinan dalam pengendalian kinerjaProgram ini menjadi fondasi keberlanjutan peningkatan *maturity rating*.

Selain itu, pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Peningkatan Tata Kelola BP Batam melalui Implementasi BIOS dan Strategi Pencapaian Indeks *Maturity Rating*” yang diselenggarakan pada hari Selasa, 28 Oktober 2025 di IT Centre, Batam Centre, dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) Kementerian Keuangan, turut menjadi faktor pendukung dalam pencapaian Indeks *Maturity Rating* BLU. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman kepada seluruh peserta terkait strategi pencapaian serta pemenuhan data dukung yang diperlukan dalam rangka meningkatkan capaian Indeks *Maturity Rating* BP Batam.

Gambar 3. 13 Bimtek Peningkatan Tata Kelola BP Batam melalui Implementasi BIOS dan Strategi Pencapaian Indeks *Maturity Rating*



Secara keseluruhan, keterpaduan program dan kegiatan yang dirancang selaras dengan tujuan strategis organisasi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian *maturity rating* BP Batam yang melampaui target yang ditetapkan.



3.5 Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU

Akurasi proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU mendukung pengelolaan keuangan yang baik, dan penyusunan perencanaan yang lebih akurat. Proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber pendapatan dan belanja, melakukan analisis historis dan pasar, estimasi volume layanan, serta perkiraan pertumbuhan. Perhitungan capaian dilakukan dengan cara membandingkan angka rencana pengesahan atas pendapatan dan belanja yang dilakukan setiap awal bulan dengan pendapatan dan belanja yang disahkan sampai dengan akhir bulan berkenaan. Target Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU BP Batam adalah 3,5.

Indeks akurasi proyeksi pendapatan memperhitungkan sebagai berikut:

- a. Ketepatan Waktu Penyampaian (40%);
 - b. Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan dan Belanja (60%).
- a. **Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja**

Tabel 3. 29 Capaian Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			
Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	3,50	4,53	129,29

Indikator Kinerja Utama Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU berperan penting dalam mendukung pengelolaan keuangan yang baik serta penyusunan perencanaan yang lebih akurat. Akurasi proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja dilakukan melalui identifikasi sumber pendapatan dan belanja, analisis data historis dan kondisi pasar, estimasi volume layanan, serta perkiraan pertumbuhan. Perhitungan capaian indikator ini dilakukan dengan membandingkan rencana pengesahan pendapatan dan belanja yang ditetapkan setiap awal bulan dengan realisasi pendapatan dan belanja yang disahkan sampai dengan akhir bulan berkenaan.

Tabel 3. 30 Detail Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU

IKU	Bulan	Tanggal	Indeks	PENDAPATAN					BELANJA					Indeks Akurasi Pendapatan dan Belanja	Indeks rata-rata Akurasi Pendapatan dan Belanja
				Proyeksi Pendapatan	Pengesahan	Deviasi	%	Indeks Akurasi Pendapatan	Proyeksi Belanja	Pengesahan	Deviasi	%	Indeks Akurasi Belanja		
Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	Januari	1/3/2025	5	Rp 152.409.131.399	Rp 122.971.124.811	Rp 29.438.006.588	19,32%	1,5	Rp 1	Rp 1	Rp -	0%	5	3,95	4,53
	Februari	2/1/2025	5	Rp 139.251.630.853	Rp 109.365.449.760	Rp 29.886.181.093	21,46%	1	Rp 42.837.610.327	Rp 47.441.611.533	Rp 4.604.001.206	11%	3	3,20	
	Maret	3/3/2025	5	Rp 135.168.509.278	Rp 138.321.273.489	-Rp 3.152.764.211	2,33%	5	Rp 53.488.792.903	Rp 53.807.872.588	Rp 319.079.686	1%	5	5,00	
	April	4/8/2025	5	Rp 129.839.507.128	Rp 134.719.866.849	-Rp 4.880.359.721	3,76%	4,5	Rp 119.960.402.937	Rp 120.124.291.710	Rp 163.888.773	0%	5	4,85	
	Mei	5/2/2025	5	Rp 123.128.485.400	Rp 125.468.313.623	-Rp 2.339.828.223	1,90%	5	Rp 79.558.425.430	Rp 80.031.432.551	Rp 473.007.121	1%	5	5,00	
	Juni	6/2/2025	5	Rp 120.425.031.122	Rp 120.783.543.315	-Rp 358.512.193	0,30%	5	Rp 99.824.921.023	Rp 99.833.876.023	Rp 8.955.000	0%	5	5,00	
	Juli	7/1/2025	5	Rp 119.560.955.316	Rp 120.370.969.194	-Rp 810.013.878	0,68%	5	Rp 109.644.536.622	Rp 110.327.403.411	Rp 682.866.789	1%	5	5,00	
	Agustus	8/1/2025	5	Rp 162.509.105.048	Rp 159.987.040.736	Rp 2.522.064.312	1,55%	5	Rp 134.520.737.931	Rp 134.703.065.206	Rp 182.327.275	0%	5	5,00	
	September	9/1/2025	5	Rp 135.235.234.325	Rp 136.884.883.640	-Rp 1.649.649.315	1,22%	5	Rp 92.916.442.654	Rp 93.520.295.554	Rp 603.852.900	1%	5	5,00	
	Oktober	11/2/2025	5	Rp 144.427.460.396	Rp 147.214.205.723	-Rp 2.786.745.327	1,93%	5	Rp 83.104.582.337	Rp 83.370.153.330	Rp 265.570.993	0%	5	5,00	
	November	11/3/2025	5	Rp 147.137.912.341	Rp 137.663.907.201	Rp 9.474.005.140	6,44%	4	Rp 130.186.235.982	Rp 130.262.098.123	Rp 75.862.140	0%	5	4,70	
	Desember	12/2/2025	5	Rp 386.885.942.571	Rp 472.755.370.126	-Rp 85.869.427.555	22,20%	1	Rp 124.059.551.646	Rp 506.851.168.937	Rp 382.791.617.291	309%	1	2,60	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sepanjang Tahun 2025, Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU mencapai nilai rata-rata 4,53. Capaian ini merefleksikan kemampuan BP Batam dalam menyusun proyeksi pendapatan dan belanja yang relatif akurat serta mendekati realisasi aktual sepanjang tahun berjalan.

Dari sisi pendapatan, sebagian besar bulan menunjukkan deviasi yang relatif kecil antara proyeksi dan pengesahan, dengan persentase deviasi berada pada kisaran rendah hingga moderat. Hal ini tercermin dari dominasi nilai Indeks Akurasi Pendapatan sebesar 5 pada mayoritas bulan, yang mengindikasikan bahwa perencanaan pendapatan telah disusun berdasarkan data historis, tren realisasi, serta asumsi yang realistis. Meskipun demikian, terdapat beberapa bulan dengan deviasi yang cukup signifikan, khususnya

pada awal tahun dan akhir tahun anggaran, yang berdampak pada penurunan indeks akurasi pada periode tersebut. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi penerimaan yang bersifat tidak reguler serta adanya penyesuaian kebijakan dan realisasi transaksi bernilai besar di akhir tahun.

Dari sisi belanja, akurasi proyeksi secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan Indeks Akurasi Belanja mayoritas bernilai 5 dan deviasi yang sangat kecil bahkan mendekati nol persen pada sebagian besar bulan. Hal ini mencerminkan pengendalian pelaksanaan anggaran yang efektif serta perencanaan belanja yang telah disusun secara cermat dan terukur. Namun demikian, pada akhir tahun anggaran terdapat deviasi belanja yang cukup besar, yang menyebabkan penurunan indeks akurasi pada bulan tersebut. Deviasi ini terutama disebabkan oleh percepatan realisasi belanja strategis dan penyelesaian kewajiban anggaran pada akhir tahun.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU sebesar 4,53 dari target 3,50 sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 129,29%, hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran telah berjalan dengan baik, konsisten, dan andal. Meskipun masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam mengantisipasi fluktuasi pendapatan dan lonjakan belanja pada periode tertentu, kinerja ini mencerminkan tata kelola keuangan BP Batam yang efektif dan akuntabel serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Tabel 3. 31 Perbandingan Capaian Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU

Sasaran Strategis			Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel					
Indikator Kinerja Utama			Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU					
2023			2024			2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	-	-	-	3,50	4,53	129,29

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, IKU Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU baru mulai diimplementasikan dan diukur pada Tahun 2025. Pada tahun tersebut, target yang ditetapkan sebesar 3,50 berhasil direalisasikan sebesar 4,53. Perlu disampaikan bahwa IKU ini

merupakan indikator yang bersifat *mandatory* dari Direktorat PPK BLU, sehingga penetapan target kinerja sepenuhnya mengacu pada target yang ditetapkan oleh Direktorat PPK BLU kepada BP Batam. Adapun pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, IKU ini belum ditetapkan sehingga tidak terdapat target maupun realisasi kinerja pada periode tersebut.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Renstra

Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU dengan Target Renstra BP Batam

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			
Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	4,53	-	-

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Rencana Strategis, IKU Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU mencatat realisasi sebesar 4,53. Namun demikian, indikator ini tidak memiliki target akhir dalam dokumen Rencana Strategis BP Batam, mengingat IKU tersebut merupakan indikator mandatory yang ditetapkan oleh Direktorat PPK BLU dan tidak termasuk dalam perencanaan strategis BP Batam. Oleh karena itu, evaluasi kinerja indikator ini dilakukan berdasarkan pencapaian target tahunan yang ditetapkan oleh Direktorat PPK BLU.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dalam Capaian Kinerja

Capaian Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU yang mencapai 4,53 (di atas target 3,50) menunjukkan bahwa kinerja perencanaan dan pengendalian keuangan BP Batam pada Tahun 2025 telah terlaksana dengan baik. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu:

- Ketepatan waktu penyampaian proyeksi

Penyampaian proyeksi pendapatan dan belanja BLU dilakukan tepat waktu tanpa kendala signifikan, sehingga proses pengesahan dan penyesuaian dapat berjalan sesuai jadwal.

- Peningkatan akurasi proyeksi pendapatan dan belanja
Dilakukan penyesuaian proyeksi melalui mekanisme *cut off* laporan pengesahan pendapatan dan belanja yang diselaraskan dengan realisasi, sehingga deviasi antara proyeksi dan realisasi dapat ditekan.
- Koordinasi yang intensif antar unit kerja
Koordinasi antara unit kerja penghasil pendapatan, unit pengelola belanja, serta unit perencanaan dan keuangan dilakukan secara rutin, termasuk evaluasi target bulanan.
- Pemanfaatan sistem informasi dan penyederhanaan proses administrasi
Implementasi teknologi informasi keuangan serta penyederhanaan administrasi belanja (termasuk pengelolaan dokumen pembayaran) meningkatkan keandalan data proyeksi.

Meskipun capaian kinerja sangat baik, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi proyeksi, antara lain:

- Belum optimalnya integrasi sistem aplikasi antara Sistem SAKTI dan FBMS;
- Keterlambatan sebagian unit kerja dalam menyampaikan data proyeksi belanja;
- Perubahan kebijakan dan sistem eksternal, seperti penambahan fitur aplikasi SAKTI dan perubahan aplikasi perpajakan;
- Kendala regulasi, antara lain perjanjian kerja sama yang belum optimal dan percepatan peraturan tarif BP Batam yang masih dalam proses; dan
- Akurasi proyeksi pengesahan pendapatan pada Triwulan IV (empat) bulan Desember 2025 deviasi sangat signifikan, hal ini disebabkan adanya penerimaan *Retained Earnings* dari PT. Adhya Tirta Batam sesuai putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) nomor 47026/V/ARB-BANI/2025.

Namun demikian, kendala tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian indeks secara keseluruhan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU dinilai cukup efisien, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- **Optimalisasi sumber daya manusia**
SDM yang ada dimanfaatkan secara maksimal melalui peningkatan koordinasi, monitoring rutin, serta evaluasi berkala tanpa memerlukan penambahan personel secara signifikan.
- **Pemanfaatan teknologi informasi**
Penggunaan sistem informasi keuangan mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi proyeksi pendapatan dan belanja secara lebih cepat dan akurat.
- **Efisiensi proses kerja**
Penyederhanaan alur administrasi belanja dan percepatan pengesahan anggaran mengurangi waktu dan biaya operasional.

Dengan capaian indeks yang melampaui target, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang digunakan telah memberikan nilai manfaat yang optimal terhadap pencapaian kinerja.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan terbukti sangat berkontribusi terhadap pencapaian Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU sebesar 4,53, antara lain:

- Koordinasi aktif dengan unit kerja penghasil dan pengelola belanja;
- Koordinasi intens dengan unit sejak tahap perencanaan hingga evaluasi realisasi meningkatkan kualitas data proyeksi;
- Percepatan pengesahan pendapatan & belanja sesuai dengan nilai target yang memungkinkan penyesuaian proyeksi yang lebih akurat;
- Analisis proyeksi berbasis realisasi dan evaluasi berkala; dan
- Analisis proyeksi pendapatan dan belanja dilakukan dengan mempertimbangkan tren realisasi, sehingga proyeksi lebih realistis.

SASARAN STRATEGIS 3 TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ORGANISASI BP BATAM YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL

Indikator Kinerja Utama 3.6 Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional



3.6 Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional, untuk periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025. Pendapatan Operasional dalam indikator kinerja ini adalah seluruh pendapatan dalam Laporan Operasional dikurangi pendapatan dari APBN.

Beban Operasional dalam indikator kinerja ini adalah seluruh beban dalam Laporan Operasioal dikurangi dengan penyusutan dan amortisasi dan belanja penugasan dari K/L. Rata-rata 5 tahun terakhir adalah 1,13 untuk Tahun 2024 0,68.

Formula Perhitungannya adalah:

$$Rasio\ BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\sum \text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

IKU ini dimaksudkan kan untuk seberapa besar kemampuan BLU dalam mengelola beban operasional. Semakin besar nilai rasio BOPO pada BLU maka menunjukkan semakin tidak efisien manajemen BLU dalam mengelola beban operasional layanannya

Selain itu juga untuk memacu Pemimpin BLU agar meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan BLU dan meningkatkan *cost effectiveness* dan *cost efficiency* sehingga kegiatan dapat dibiayai dari PNBPN. Target Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 68%, polarisasi pada IKU ini

adalah *minimize*, yakni semakin kecil realisasi maka semakin baik kinerja.

a. Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Tabel 3. 33 Capaian Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			
Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	68%	67,68%	100,48%

Berdasarkan perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional pada Sasaran Strategis 3 ditargetkan sebesar 68%. Realisasi kinerja yang dicapai pada Tahun 2025 sebesar 67,68%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,48%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan beban operasional BP Batam telah dilaksanakan secara efisien, dengan tingkat beban operasional yang lebih rendah dibandingkan pendapatan operasional, sehingga melampaui target kinerja yang ditetapkan.

Tabel 3. 34 Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

KETERANGAN		DATA
a.	Pendapatan Operasional	Rp 1.716.716.281.352,00
b.	Pendapatan APBN	Rp 8.959.797.465,00
c. (a-b)	Pendapatan setelah dikurangi APBN	Rp 1.707.756.483.887,00
	PAGU PENDAPATAN	Rp 1.978.098.000.000,00
d.	Belanja Operasional	Rp 1.882.613.700.595,00
e.	Penyusutan	Rp 726.831.251.945,00
f. (d-e)	Belanja Operasional setelah dikurangi penyusutan	Rp 1.155.782.448.650,00
	PAGU BELANJA	Rp 2.071.397.065.000,00
g. (f/c)*100	BOPO	67,68%

d. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Tabel 3. 35 Perbandingan Capaian Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Sasaran Strategis			Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel					
Indikator Kinerja Utama			Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional					
2023			2024			2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	-	-	-	68%	67,68%	100,48%

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional merupakan IKU yang bersifat *mandatory* dari Direktorat Pembina Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU), Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga penetapan target kinerja merupakan target yang ditetapkan oleh Dit. PPK BLU kepada BP Batam.

Indikator ini belum diterapkan pada Kontrak Kinerja Kepala BP Batam Tahun 2023 dan Tahun 2024, serta baru mulai ditetapkan dan diukur pada Kontrak Kinerja Kepala BP Batam Tahun 2025. Pada Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 68% dengan realisasi kinerja sebesar 67,68%. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang lebih baik dari target yang ditetapkan, serta mencerminkan kemampuan BP Batam dalam mengendalikan beban operasional secara efektif sesuai dengan kebijakan pengelolaan keuangan BLU.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Renstra

Tabel 3. 36 Perbandingan Realisasi Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			
Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	67,68%	-	-

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional menunjukkan realisasi kinerja sebesar 67,68%. Namun demikian, indikator ini merupakan IKU yang bersifat *mandatory* dari Dit. PPK BLU, sehingga tidak tercantum dalam Rencana Strategis BP Batam dan tidak memiliki target akhir Renstra Tahun 2029. Oleh karena itu, evaluasi kinerja indikator ini difokuskan pada pencapaian target tahunan yang ditetapkan oleh PPK BLU sebagai bagian dari penguatan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLU. Detail perhitungan Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional adalah sebagai berikut:

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dalam Capaian Kinerja

Capaian Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional sebesar 67,68% menunjukkan kinerja sangat baik, karena realisasi rasio berada lebih rendah dari target 68% sesuai dengan karakteristik indikator berpolarisasi *minimize*. Hal ini menandakan bahwa BP Batam mampu mengendalikan beban operasional secara efektif sekaligus menjaga pertumbuhan pendapatan operasional.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain peningkatan efisiensi pada belanja operasional melalui pengendalian biaya rutin, optimalisasi pemanfaatan aset dan

infrastruktur yang telah tersedia, serta penerapan digitalisasi pada berbagai proses layanan dan administrasi yang menekan biaya operasional. Selain itu, upaya peningkatan pendapatan operasional melalui optimalisasi layanan, kerja sama pemanfaatan aset, dan pengembangan sumber pendapatan baru turut berkontribusi dalam menurunkan rasio beban terhadap pendapatan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi menahan optimalisasi rasio ke tingkat yang lebih rendah. Kendala tersebut antara lain meningkatnya kebutuhan belanja operasional untuk mendukung layanan strategis, penyesuaian biaya akibat perubahan kebijakan dan struktur organisasi, serta adanya kebutuhan investasi operasional awal pada beberapa sektor yang belum sepenuhnya memberikan dampak peningkatan pendapatan dalam jangka pendek. Namun demikian, kendala tersebut tidak secara signifikan menghambat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian rasio sebesar 67,68% mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya yang baik, di mana setiap satuan biaya operasional yang dikeluarkan mampu menghasilkan pendapatan operasional yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan target. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya keuangan, aset, dan SDM telah dilakukan secara optimal dan berorientasi pada nilai tambah.

Efisiensi tersebut dicapai melalui pengendalian belanja operasional secara selektif, prioritas kegiatan yang berdampak langsung terhadap pendapatan, serta peningkatan produktivitas SDM melalui penataan proses kerja dan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, pengurangan aktivitas yang kurang memberikan kontribusi langsung terhadap *output* dan *outcome* organisasi turut mendukung terciptanya efisiensi penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.

h. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional antara lain:

1. Pelaksanaan kerjasama kegiatan pemanfaatan aset strategis yang bertujuan untuk optimalisasi pendapatan usaha tanpa membebani anggaran biaya BP Batam;
2. Optimalisasi aset untuk peningkatan pendapatan operasional;
3. Melakukan program promosi dalam rangka menarik minat investasi di sektor strategis dalam pengembangan kawasan guna meningkatkan pendapatan; dan
4. Modernisasi sistem pengelolaan keuangan BLU dan integrasi aplikasi BIOS dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi manajemen keuangan dan pelaporan operasional berbasis data *real time*.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan tersebut terbukti efektif dalam mendukung pencapaian kinerja yang melampaui target, sekaligus memperkuat tata kelola keuangan BP Batam yang efisien, efektif, dan berkelanjutan.

C. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi Belanja DIPA BP Batam tahun 2025 sebesar Rp1.469.140.851.531,45 atau 70,93% dari pagu sebesar Rp2.071.397.065.000,00. Adapun realisasi belanja TA. 2025 terdiri dari belanja barang sebesar Rp1.178.036.485.739,45 atau 82,39% dari pagunya sebesar Rp1.429.754.460.000,00 dan belanja modal sebesar Rp291.104.365.792,00 atau 45,37% dari pagunya sebesar 641.642.605.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 37 Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	KODE KEGIATAN	KEGIATAN	TA 2024		%
			PAGU	REALISASI	
1	A	BELANJA RUPIAH MURNI	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00
2	B	BELANJA PINJAMAN HIBAH LUAR NEGERI	Rp 8.760.000.000,00	Rp 6.306.969.082,00	72,00
3	C	BELANJA RUPIAH MURNI PENDAMPING	Rp 5.870.199.000,00	Rp 2.652.828.383,00	45,19
4	D	BELANJA PNBPN	Rp 2.056.766.866.000,00	Rp 1.460.181.054.066,45	70,99
	I.	Program Pengembangan Kawasan Strategis	Rp 1.119.219.111.000,00	Rp 679.747.877.283,45	60,73
	5123	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	Rp 87.282.018.000,00	Rp 43.172.133.795,00	49,46
	5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	Rp 33.302.621.000,00	Rp 30.275.373.358,00	90,91
	5125	Pengelolaan, Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara	Rp 15.015.544.000,00	Rp 10.540.130.392,00	70,19
	5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	Rp 174.583.018.000,00	Rp 153.408.438.457,45	87,87
	5127	Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan	Rp 574.204.794.000,00	Rp 265.129.447.958,00	46,17
	5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	Rp 1.818.824.000,00	Rp 1.319.721.236,00	72,56
	5130	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan	Rp 40.352.891.000,00	Rp 30.300.154.905,00	75,09
	5134	Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi	Rp 72.110.765.000,00	Rp 58.225.728.138,00	80,74
	5981	Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja Badan Usaha BP Batam	Rp 2.446.644.000,00	Rp 1.189.652.232,00	48,62
	5982	Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Badan Usaha BP Batam	Rp 895.583.000,00	Rp 870.075.455,00	97,15
	5983	Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam	Rp 1.655.147.000,00	Rp 14.768.402,00	0,89
	6651	Penyusunan Perencanaan Teknis Pendukung Pengembangan Infrastruktur Kawasan	Rp 20.013.796.000,00	Rp 10.373.196.861,00	51,83
	6652	Promosi KPBPB Batam	Rp 7.991.080.000,00	Rp 6.511.963.141,00	81,49
	6672	Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam	Rp 1.003.653.000,00	Rp 670.220.825,00	66,78
	6675	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air Minum	Rp 86.542.733.000,00	Rp 67.746.872.128,00	78,28
	II.	Program Dukungan Manajemen	Rp 937.547.755.000,00	Rp 780.433.176.783,00	83,24
	5113	Penyusunan Kebijakan Strategis, Perencanaan Program dan Teknis	Rp 8.791.788.000,00	Rp 4.395.419.031,00	49,99

NO	KODE KEGIATAN	KEGIATAN	TA 2024		%
			PAGU	REALISASI	
	5114	Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa	Rp 129.610.409.000,00	Rp 113.545.272.503,00	87,61
	5115	Pengelolaan dan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Rp 589.479.371.000,00	Rp 490.559.463.797,00	83,22
	5116	Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Rp 7.101.918.000,00	Rp 5.094.690.554,00	71,74
	5117	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	Rp 9.297.404.000,00	Rp 8.094.272.655,00	87,06
	5118	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta	Rp 8.508.307.000,00	Rp 6.611.305.832,00	77,70
	5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan	Rp 3.141.690.000,00	Rp 2.276.004.222,00	72,45
	5978	Penyusunan dan Penyelarasan Kebijakan, Pentarifan serta Pengelolaan Teknologi Informasi	Rp 5.305.322.000,00	Rp 3.546.173.331,00	66,84
	5979	Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kawasan	Rp 5.589.745.000,00	Rp 4.203.698.515,00	75,20
	5980	Pelayanan Pemasaran, Kehumasan dan Protokol	Rp 27.818.887.000,00	Rp 22.298.200.829,00	80,15
	6640	Dukungan Manajemen pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	Rp 10.630.250.000,00	Rp 8.732.531.049,00	82,15
	6641	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	Rp 12.990.727.000,00	Rp 10.664.858.135,00	82,10
	6642	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan, Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara	Rp 3.498.168.000,00	Rp 1.727.720.923,00	49,39
	6643	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	Rp 20.726.516.000,00	Rp 14.733.564.042,00	71,09
	6644	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan	Rp 6.883.924.000,00	Rp 4.625.492.971,00	67,19
	6645	Dukungan Manajemen Internal Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	Rp 842.781.000,00	Rp 773.810.261,00	91,82
	6646	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan	Rp 7.380.511.000,00	Rp 6.680.578.940,00	90,52
	6647	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi	Rp 5.234.955.000,00	Rp 4.940.048.471,00	94,37
	6648	Dukungan Manajemen Internal Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja Badan Usaha BP Batam	Rp 625.120.000,00	Rp 499.373.043,00	79,88
	6649	Dukungan Manajemen Internal Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Badan Usaha BP Batam	Rp 525.093.000,00	Rp 501.271.811,00	95,46
	6650	Dukungan Manajemen Internal Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam	Rp 591.562.000,00	Rp 202.801.084,00	34,28
	6671	Dukungan Manajemen Internal Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam	Rp 2.877.762.000,00	Rp 2.535.712.475,00	88,11
	6673	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi	Rp 53.782.639.000,00	Rp 51.608.490.841,00	95,96
	6674	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air Minum	Rp 16.312.906.000,00	Rp 11.582.421.468,00	71,00
Total			Rp 2.071.397.065.000,00	Rp 1.469.140.851.531,45	70,93

Sumber Data: Biro Keuangan, Penyerapan Anggaran Tahun 2025.

Hal-hal yang menyebabkan rendahnya penyerapan realisasi belanja BP Batam tahun 2025 antara lain:

1. Realisasi untuk kode kegiatan 5115 Pengelolaan dan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebesar Rp490.559.463.797,00 atau sebesar 83,22% dari pagu yang direncanakan. Penyerapan yang rendah ini disebabkan tertundanya pengangkatan pegawai dan rencana kenaikan gaji yang masih dalam proses;
2. Tidak terserapnya pagu belanja modal infrastruktur sebesar Rp297,72 miliar yang terdiri dari kegiatan infrastruktur yang batal dilaksanakan dan kegiatan kontrak tahun jamak (MYC TA. 2025-2026);
3. Tidak terserapnya kegiatan Rempang *Eco-City* sebesar Rp. 24,79 miliar; dan
4. Tidak terserapnya kegiatan penyusunan studi kelayakan/kajian sebesar Rp 13, 51 miliar.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Langkah Peningkatan Kinerja

LAPORAN KINERJA **2025**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kepala BP Batam Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2025. Sepanjang tahun 2025, BP Batam telah melaksanakan berbagai upaya strategis guna meningkatkan capaian kinerja secara berkelanjutan, yang tercermin dari hasil pengukuran kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan persentase capaian rata-rata sebesar 105,58%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, terdapat beberapa indikator kinerja utama yang melampaui target yang telah ditetapkan. Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam mencapai Rp69,30 triliun atau sebesar 115,50% dari target, menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Batam. Selain itu, indikator Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU, Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU, serta Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dan Peningkatan Nilai Maturity Rating BLU juga menunjukkan capaian yang melampaui target, yang mengindikasikan peningkatan efektivitas dan pelayanan pengelolaan organisasi serta keuangan BLU.

Sementara itu, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu Nilai Realisasi PNBP, Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, dan SPI secara tepat waktu, serta Indeks Reformasi Birokrasi. Belum tercapainya target pada indikator-indikator tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi pendapatan, perlunya percepatan dalam penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi serta masih rendahnya nilai pada beberapa komponen penilaian Reformasi Birokrasi dan terdapatnya sejumlah indikator atau subkomponen yang belum dapat terpenuhi secara maksimal sesuai dengan kriteria penilaian yang ditetapkan. Kondisi tersebut berdampak

pada akumulasi nilai akhir Indeks Reformasi Birokrasi sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi bagi BP Batam untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah guna meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kepala BP Batam Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dan terukur, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian dan peningkatan pada periode berikutnya. Ke depan, BP Batam akan terus melakukan penguatan sinergi antar unit kerja, peningkatan efektivitas program dan kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya guna memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja organisasi dan pencapaian sasaran strategis secara optimal.

Realisasi Anggaran BP Batam tahun 2025 sebesar Rp1.469.140.851.531,45 atau 70,93% dari total pagu anggaran yang dapat digunakan, yaitu Rp 2.071.397.065.000,00. Adapun realisasi belanja TA. 2025 terdiri dari belanja barang sebesar Rp1.178.036.485.739,45 atau 82,39% dari pagunya sebesar Rp1.429.754.460.000,00 dan belanja modal sebesar Rp291.104.365.792,00 atau 45,37% dari pagunya sebesar 641.642.605.000,00.

B. Langkah Peningkatan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, BP Batam akan melakukan berbagai langkah strategis sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja Tahun 2025. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja yang belum memenuhi target.

1. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) melalui penguatan perencanaan pendapatan, peningkatan akurasi proyeksi penerimaan, serta penguatan koordinasi antar unit kerja terkait guna mendorong peningkatan realisasi pendapatan secara lebih optimal;
2. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang berasal dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, maupun Satuan Pengawasan Internal (SPI). Upaya ini dilakukan melalui penguatan mekanisme pengendalian internal, peningkatan koordinasi antar unit kerja, serta pemantauan secara berkala

terhadap progres penyelesaian rekomendasi agar dapat diselesaikan secara tepat waktu; dan

3. Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pemenuhan komponen penilaian Reformasi Birokrasi, penyempurnaan tata kelola organisasi, serta penguatan implementasi program reformasi birokrasi pada seluruh unit kerja. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai pada setiap komponen penilaian sehingga capaian Indeks Reformasi Birokrasi dapat meningkat secara signifikan pada periode berikutnya.

Selain itu, BP Batam juga akan terus melakukan penguatan sinergi antar unit kerja, peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya organisasi, termasuk pemanfaatan anggaran secara lebih efisien dan efektif, sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran strategis secara berkelanjutan. Melalui berbagai langkah peningkatan kinerja tersebut, diharapkan BP Batam dapat mempertahankan capaian kinerja yang telah baik sekaligus meningkatkan kinerja pada indikator-indikator yang masih memerlukan perbaikan, sehingga tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat tercapai secara lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.



LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Kontrak Kinerja BP Batam Tahun 2025



**KONTRAK KINERJA
ANTARA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DENGAN
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
TAHUN 2025**



Nomor : PRJ- 392/PB/2025
 Nomor : 8 /SPJ/KA/2/2025

Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Astera Primanto Bhakti
 Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan RI
 Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Amsakar Achmad
 Jabatan : Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan kontrak kinerja dengan ketentuan:

1. **PIHAK KEDUA** menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Investasi di KPBPB Batam	1 Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam	Rp.60 T
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perijinan	2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	87 (Baik)
		3 Nilai Realisasi PNBP	Rp.1,978 T
		4 Indeks Reformasi Birokrasi	80 (Sangat Baik)
		5 Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	80%
3.	Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	6 Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK, SPI Secara Tepat Waktu	92%
		7 Peningkatan Nilai Maturity Rating BLU	Indeks 3,38
		8 Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	Indeks 3,5

		9	Rasio Beban Operasional terhadap Operasional	Operasional Pendapatan	68%
--	--	---	--	------------------------	-----

2. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima konsekuensi atas capaian target kinerja tersebut;
3. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan reviu dan evaluasi atas capaian kinerja dan dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian remunerasi;
4. Kontrak Kinerja ini berlaku mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 28 Februari 2025

PIHAK PERTAMA,


f Astera Primanto Bhakti

PIHAK KEDUA,



Ansakar Achmad

Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan RI dengan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan
Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2025

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

1. Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam

Sasaran Strategis	:	Meningkatnya Investasi di KPBPB Batam				
Indikator Kinerja Utama	:	Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam				
Deskripsi	:	Nilai realisasi investasi di KPBPB Batam merupakan jumlah keseluruhan investasi yang masuk ke KPBPB Batam berupa Modal Tetap dan Modal Lancar dari Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dalam periode satu tahun dibandingkan dengan target yang ditetapkan				
Formula	:	<table><tr><th>Kegiatan</th><th>Jumlah Investasi</th></tr><tr><td>Realisasi Investasi</td><td>Rp.60 T</td></tr></table> Realisasi Investasi Tahun 2025 = Modal Tetap + Modal Lancar Realisasi Investasi Tahun 2025 = (Impor Barang Modal + Margin Distribusi + Jasa Pemasangan + Biaya lain-lain) + Modal Lancar Modal Tetap : Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam Modal Lancar : Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, Badan Pusat Statistik Kota Batam	Kegiatan	Jumlah Investasi	Realisasi Investasi	Rp.60 T
Kegiatan	Jumlah Investasi					
Realisasi Investasi	Rp.60 T					
Tujuan	:	IKU ini bertujuan agar BP Batam mencapai peningkatan realisasi investasi yang tinggi				
Satuan Pengukuran	:	Rupiah				
Jenis Konsolidasi Periode	:	Take Last Known (Akumulasi Januari s.d. Desember)				
Polarisasi Indikator Kinerja	:	Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)				
Periode Pelaporan	:	Quartal/Tahunan				
Sumber Data	:	Pusat Pengembangan KPBPB Batam dan KEK BP Batam, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam dan Badan Pusat Statistik Kota Batam				

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Sasaran Strategis	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perijinan																		
Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik																		
Deskripsi	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus). Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat selanjutnya mempedomani ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.																		
Formula	:	Hasil Pengukuran IKM: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indeks Kuantitatif</th><th colspan="2">Kualitatif</th></tr> <tr> <th>Skala 1 - 100</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Predikat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25,00 - 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr> <tr> <td>65,00 - 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr> <tr> <td>76,61 - 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>88,31 - 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr> </tbody> </table> Lokus Survei Kepuasan Masyarakat: 1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 2. Badan Usaha Pelabuhan (BUP); 3. Badan Usaha Rumah Sakit (BURS); 4. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM); 5. Direktorat Pengelolaan Pertanahan. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat bekerjasama dengan lembaga yang memiliki kredibilitas dan reputasi di bidang penelitian dan survei.	Indeks Kuantitatif	Kualitatif		Skala 1 - 100	Mutu Pelayanan	Predikat	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	76,61 - 88,30	B	Baik	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik
Indeks Kuantitatif	Kualitatif																			
Skala 1 - 100	Mutu Pelayanan	Predikat																		
25,00 - 64,99	D	Tidak Baik																		
65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																		
76,61 - 88,30	B	Baik																		
88,31 - 100,00	A	Sangat Baik																		
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan																		
Satuan Pengukuran	:	Angka																		
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i> (Akumulasi Januari s.d. Desember)																		
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)																		
Periode Pelaporan	:	Tahunan																		
Sumber Data	:	Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja																		

3. Nilai Realisasi PNB

Sasaran Strategis	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perijinan																																																
Indikator Kinerja Utama	:	Nilai Realisasi PNB																																																
Deskripsi	:	Realisasi PNB merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas layanan yang diberikan kepada masyarakat antara lain melalui pemanfaatan barang/jasa, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain,sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN. Persentase realisasi PNB adalah jumlah realisasi PNB dibandingkan dengan targetnya Tahun 2025, yang dihitung untuk periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025.																																																
Formula	:	Realisasi PNB Tahun 2025 = $\frac{\Sigma(\text{Jumlah Realisasi PNB Tahun 2025})_n}{\Sigma(\text{Target PNB Tahun 2025 yang berlaku})_n} \times 100\%$ <table><tr><th>No</th><th>Badan Usaha</th><th>Target PNB (Juta Rp)</th><th>%</th></tr><tr><td>1</td><td>Biro Keuangan</td><td>43.313</td><td>2,19</td></tr><tr><td>2</td><td>Direktorat Pengelolaan Pertanahan</td><td>893.967</td><td>45,19</td></tr><tr><td>3</td><td>Direktorat Infrastruktur Kawasan</td><td>6.821</td><td>0,34</td></tr><tr><td>4</td><td>Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal</td><td>2.496</td><td>0,13</td></tr><tr><td>5</td><td>Pusat Data dan Sistem Informasi</td><td>9.146</td><td>0,46</td></tr><tr><td>6</td><td>Kantor Perwakilan Jakarta</td><td>795</td><td>0,04</td></tr><tr><td>7</td><td>Badan Usaha Pelabuhan</td><td>401.893</td><td>20,32</td></tr><tr><td>8</td><td>Unit Usaha Pengelola Logistik Aerocity</td><td>108.980</td><td>5,51</td></tr><tr><td>9</td><td>Badan Usaha Rumah Sakit</td><td>175.336</td><td>8,86</td></tr><tr><td>10</td><td>Badan Usaha Fasilitas Lingkungan</td><td>30.768</td><td>1,56</td></tr><tr><td>11</td><td>Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum</td><td>304.583</td><td>15,40</td></tr></table>	No	Badan Usaha	Target PNB (Juta Rp)	%	1	Biro Keuangan	43.313	2,19	2	Direktorat Pengelolaan Pertanahan	893.967	45,19	3	Direktorat Infrastruktur Kawasan	6.821	0,34	4	Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	2.496	0,13	5	Pusat Data dan Sistem Informasi	9.146	0,46	6	Kantor Perwakilan Jakarta	795	0,04	7	Badan Usaha Pelabuhan	401.893	20,32	8	Unit Usaha Pengelola Logistik Aerocity	108.980	5,51	9	Badan Usaha Rumah Sakit	175.336	8,86	10	Badan Usaha Fasilitas Lingkungan	30.768	1,56	11	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum	304.583	15,40
No	Badan Usaha	Target PNB (Juta Rp)	%																																															
1	Biro Keuangan	43.313	2,19																																															
2	Direktorat Pengelolaan Pertanahan	893.967	45,19																																															
3	Direktorat Infrastruktur Kawasan	6.821	0,34																																															
4	Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	2.496	0,13																																															
5	Pusat Data dan Sistem Informasi	9.146	0,46																																															
6	Kantor Perwakilan Jakarta	795	0,04																																															
7	Badan Usaha Pelabuhan	401.893	20,32																																															
8	Unit Usaha Pengelola Logistik Aerocity	108.980	5,51																																															
9	Badan Usaha Rumah Sakit	175.336	8,86																																															
10	Badan Usaha Fasilitas Lingkungan	30.768	1,56																																															
11	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum	304.583	15,40																																															
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk memacu pemanfaatan aset BLU dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat yang optimal.																																																
Satuan Pengukuran	:	Rupiah																																																
Jenis Konsolidasi Periode	:	Take Last Known (Akumulasi Januari s.d. Desember)																																																
Polarisasi Indikator Kinerja	:	Maximize (Semakin tinggi semakin baik)																																																
Periode Pelaporan	:	Triwulan																																																
Sumber Data	:	Biro Keuangan																																																

4. Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel																										
Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Reformasi Birokrasi																										
Deskripsi	:	Indeks Reformasi Birokrasi merupakan perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Dan Reformasi Birokrasi masuk dalam salah satu bagian dari delapan misi (Asta Cita) Pemerintahan Prabowo-Gibran.																										
Formula	:	Mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 182 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th><th>Nilai/Angka</th><th>Predikat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td><td>>100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr> <tr> <td>A</td><td rowspan="2">>80-90</td><td>Memuaskan</td></tr> <tr> <td>A-</td><td>Memuaskan dengan Catatan</td></tr> <tr> <td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat Baik</td></tr> <tr> <td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr> <tr> <td>C</td><td>>30-50</td><td>Buruk</td></tr> <tr> <td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Kurang</td></tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	AA	>100	Sangat Memuaskan	A	>80-90	Memuaskan	A-	Memuaskan dengan Catatan	BB	>70-80	Sangat Baik	B	>60-70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30-50	Buruk	D	0-30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai/Angka	Predikat																										
AA	>100	Sangat Memuaskan																										
A	>80-90	Memuaskan																										
A-		Memuaskan dengan Catatan																										
BB	>70-80	Sangat Baik																										
B	>60-70	Baik																										
CC	>50-60	Cukup																										
C	>30-50	Buruk																										
D	0-30	Sangat Kurang																										
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.																										
Satuan Pengukuran	:	Angka																										
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i> (Akumulasi Januari s.d. Desember)																										
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (Semakin tinggi semakin baik)																										
Periode Pelaporan	:	Triwulan																										
Sumber Data	:	Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja																										

5. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel																																																																																										
Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU																																																																																										
Deskripsi	:	Modernisasi Pengelolaan BLU adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan BLU untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara handal yang dilakukan dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi sehingga sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat																																																																																										
Formula	:	Persentase penyelesaian pengembangan modernisasi BLU pada tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) tahapan dengan dasar nilai dengan penjelasan: Indikator <table><tr><th>Tahap</th><th>Uraian</th><th>Skor per Indikator</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td rowspan="10">I</td><td>Integrasi Data (Extra Miles)</td><td></td><td>20</td></tr><tr><td>a. Pengembangan Webservice pada Tahap Development</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1) Permintaan secret key development</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>2) Data terkirim pada server development</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>3) Pengiriman dilakukan dengan scheduler/automation</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>b. Pengembangan webservice pada Tahap Production</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1) Permintaan secret key production</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>2) Data terkirim pada server production</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>c. Kelengkapan Pengiriman Data</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1) Pengiriman data rutin dilakukan setiap hari</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>2) Kelengkapan data terkirim</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td rowspan="15">II</td><td>Operasionalisasi BIOS</td><td></td><td>80</td></tr><tr><td>Kelengkapan Data pada Modul BIOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a. Profil non SDM</td><td>6,66</td><td></td></tr><tr><td>b. Profil SDM</td><td>6,66</td><td></td></tr><tr><td>c. Data Layanan</td><td>6,66</td><td></td></tr><tr><td>d. Data Keuangan</td><td>6,66</td><td></td></tr><tr><td>e. Rencana Bisnis Anggaran Indikatif</td><td>6,66</td><td></td></tr><tr><td>f. Rencana Bisnis Anggaran Definitif</td><td>6,66</td><td></td></tr><tr><td>g. Rencana Strategi Bisnis</td><td>6,66</td><td></td></tr><tr><td>h. Dokumen Kontrak Kinerja</td><td>6,66</td><td></td></tr><tr><td>i. Dokumentasi</td><td>6,66</td><td></td></tr><tr><td>j. Pembinaan</td><td>6,66</td><td></td></tr><tr><td>k. Derwas</td><td>6,66</td><td></td></tr><tr><td>l. Maturity Rating Assessment</td><td>6,66</td><td></td></tr><tr><td>m. Usulan Tarif</td><td>6,66</td><td></td></tr><tr><td>n. Laporan Pelaksanaan Tarif</td><td>6,66</td><td></td></tr><tr><td>o. Laporan Pelaksanaan Remunerasi</td><td>6,66</td><td></td></tr></table> Persentase Capaian = Persentase Penyelesaian Indikator + Persentase Extra Miles Target Capaian = 80%	Tahap	Uraian	Skor per Indikator	Bobot (%)	I	Integrasi Data (Extra Miles)		20	a. Pengembangan Webservice pada Tahap Development			1) Permintaan secret key development	10		2) Data terkirim pada server development	10		3) Pengiriman dilakukan dengan scheduler/automation	20		b. Pengembangan webservice pada Tahap Production			1) Permintaan secret key production	10		2) Data terkirim pada server production	20		c. Kelengkapan Pengiriman Data			1) Pengiriman data rutin dilakukan setiap hari	30		2) Kelengkapan data terkirim	30		II	Operasionalisasi BIOS		80	Kelengkapan Data pada Modul BIOS:			a. Profil non SDM	6,66		b. Profil SDM	6,66		c. Data Layanan	6,66		d. Data Keuangan	6,66		e. Rencana Bisnis Anggaran Indikatif	6,66		f. Rencana Bisnis Anggaran Definitif	6,66		g. Rencana Strategi Bisnis	6,66		h. Dokumen Kontrak Kinerja	6,66		i. Dokumentasi	6,66		j. Pembinaan	6,66		k. Derwas	6,66		l. Maturity Rating Assessment	6,66		m. Usulan Tarif	6,66		n. Laporan Pelaksanaan Tarif	6,66		o. Laporan Pelaksanaan Remunerasi	6,66	
Tahap	Uraian	Skor per Indikator	Bobot (%)																																																																																									
I	Integrasi Data (Extra Miles)		20																																																																																									
	a. Pengembangan Webservice pada Tahap Development																																																																																											
	1) Permintaan secret key development	10																																																																																										
	2) Data terkirim pada server development	10																																																																																										
	3) Pengiriman dilakukan dengan scheduler/automation	20																																																																																										
	b. Pengembangan webservice pada Tahap Production																																																																																											
	1) Permintaan secret key production	10																																																																																										
	2) Data terkirim pada server production	20																																																																																										
	c. Kelengkapan Pengiriman Data																																																																																											
	1) Pengiriman data rutin dilakukan setiap hari	30																																																																																										
2) Kelengkapan data terkirim	30																																																																																											
II	Operasionalisasi BIOS		80																																																																																									
	Kelengkapan Data pada Modul BIOS:																																																																																											
	a. Profil non SDM	6,66																																																																																										
	b. Profil SDM	6,66																																																																																										
	c. Data Layanan	6,66																																																																																										
	d. Data Keuangan	6,66																																																																																										
	e. Rencana Bisnis Anggaran Indikatif	6,66																																																																																										
	f. Rencana Bisnis Anggaran Definitif	6,66																																																																																										
	g. Rencana Strategi Bisnis	6,66																																																																																										
	h. Dokumen Kontrak Kinerja	6,66																																																																																										
	i. Dokumentasi	6,66																																																																																										
	j. Pembinaan	6,66																																																																																										
	k. Derwas	6,66																																																																																										
	l. Maturity Rating Assessment	6,66																																																																																										
	m. Usulan Tarif	6,66																																																																																										
n. Laporan Pelaksanaan Tarif	6,66																																																																																											
o. Laporan Pelaksanaan Remunerasi	6,66																																																																																											

Tujuan	: IKU ini untuk mengukur tingkat modernisasi pengelolaan sumber daya BLU dalam rangka mendukung peningkatan layanan, akuntabilitas dan akurasi manajemen dalam pengambilan keputusan.
Satuan Pengukuran	: Persentase (%)
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i> (Akumulasi Januari s.d. Desember)
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: 1. Pusat Data dan Sistem Informasi; 2. Biro Sumber Daya Manusia; 3. Biro Keuangan; 4. Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja; 5. Unit Kerja Penyedia Data Layanan; 6. Data pada BIOS; 7. Sistem Informasi pada BLU; 8. Data Primer sebagai bahan uji dan pembandingan.

6. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK RI, SPI Secara Tepat Waktu

Sasaran Strategis	: Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Dari PPK BLU, Pembina Teknis, BPK RI, SPI Secara Tepat Waktu
Deskripsi	: Penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Pembina Keuangan/Pembina Teknis/Dewan Pengawas/APIP dan/atau BPK adalah tindak lanjut yang dilaksanakan oleh BLU atas rekomendasi/saran/masukan yang disampaikan dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi, berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Formula	: Perhitungan capaian kinerja penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Pembina Keuangan / Pembina Teknis / Dewan Pengawas / APIP dan/atau BPK, dihitung dengan formula sebagai berikut: Target penyelesaian rekomendasi = 92% $\frac{\sum \text{tindak lanjut Hasil Temuan Monitoring dan Evaluasi}}{\sum \text{temuan hasil monitoring dan evaluasi}} \times 100\%$ Apabila capaian sebesar $\geq 100\%$ diakui sebesar 100% dan berhak mendapatkan kelebihan capaian dihitung berdasarkan: 1. Kecepatan waktu penyampaian tindak lanjut rekomendasi 2. Ketepatan tindak lanjut rekomendasi dan dinyatakan selesai. Keterangan • Penyelesaian Rekomendasi yang dihitung adalah tindak lanjut rekomendasi tahun kontrak kinerja sesuai hasil

	monitoring dan evaluasi dari Pembina Keuangan / Pembina Teknis / Dewan Pengawas / APIP dan/atau BPK. Rekomendasi yang penyelesaiannya jatuh pada tahun berikutnya akan dihitung dalam kontrak kinerja tahun tersebut. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capaian Tambahan</th><th>Bobot</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rekomendasi diselesaikan ≥60 hari kalender sebelum batas waktu, ketepatan tindak lanjut rekomendasi dan dinyatakan selesai.</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>Rekomendasi diselesaikan >45 hari kalender sebelum batas waktu, ketepatan tindak lanjut rekomendasi dan dinyatakan selesai.</td><td>25%</td></tr> <tr> <td>Rekomendasi diselesaikan <30 hari kalender batas waktu, ketepatan tindak lanjut rekomendasi dan dinyatakan selesai.</td><td>10%</td></tr> </tbody> </table> Capaian maksimal IKU 150%	Capaian Tambahan	Bobot	Rekomendasi diselesaikan ≥60 hari kalender sebelum batas waktu, ketepatan tindak lanjut rekomendasi dan dinyatakan selesai.	50%	Rekomendasi diselesaikan >45 hari kalender sebelum batas waktu, ketepatan tindak lanjut rekomendasi dan dinyatakan selesai.	25%	Rekomendasi diselesaikan <30 hari kalender batas waktu, ketepatan tindak lanjut rekomendasi dan dinyatakan selesai.	10%
Capaian Tambahan	Bobot								
Rekomendasi diselesaikan ≥60 hari kalender sebelum batas waktu, ketepatan tindak lanjut rekomendasi dan dinyatakan selesai.	50%								
Rekomendasi diselesaikan >45 hari kalender sebelum batas waktu, ketepatan tindak lanjut rekomendasi dan dinyatakan selesai.	25%								
Rekomendasi diselesaikan <30 hari kalender batas waktu, ketepatan tindak lanjut rekomendasi dan dinyatakan selesai.	10%								
Tujuan	: IKU ini bertujuan untuk meningkatkan responsibilitas BLU dan komitmen dalam perbaikan yang dilaksanakan terus menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, guna menunjang pelayanan BLU yang berkesinambungan dan peningkatan kinerja BLU.								
Satuan Pengukuran	: Persentase (%)								
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i> (Akumulasi Januari s.d. Desember)								
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)								
Periode Pelaporan	: Tahunan								
Sumber Data	: Laporan tindak lanjut di BIOS dan hasil verifikasi dari Direktorat PPKBLU.								

7. Penilaian Maturity Rating BLU

Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel																											
Indikator Kinerja Utama	:	Penilaian Maturity Rating BLU																											
Deskripsi	:	BLU Maturity Rating merupakan sebuah kerangka penilaian yang berfokus pada <i>process and performance improvement</i> dengan 5 (lima) level maturitas yang masing-masing level memiliki basis kinerja yang berlaku secara universal untuk seluruh aspek dan indikator penilaian.																											
Formula	:	<table><tr><th rowspan="2">Indeks</th><th colspan="4">Level Capaian Tahun Sebelumnya</th></tr><tr><th>4</th><th>3</th><th>2</th><th>1</th></tr><tr><td>5</td><td>>0,12</td><td>>0,16</td><td>>0,21</td><td>>0,25</td></tr><tr><td>4</td><td>0,09 - 0,12</td><td>0,13 - 0,16</td><td>0,17 - 0,20</td><td>0,21 - 0,24</td></tr><tr><td>3</td><td>0,05 - 0,08</td><td>0,09 - 0,12</td><td>0,13 - 0,16</td><td>0,17 - 0,20</td></tr></table>	Indeks	Level Capaian Tahun Sebelumnya				4	3	2	1	5	>0,12	>0,16	>0,21	>0,25	4	0,09 - 0,12	0,13 - 0,16	0,17 - 0,20	0,21 - 0,24	3	0,05 - 0,08	0,09 - 0,12	0,13 - 0,16	0,17 - 0,20			
Indeks	Level Capaian Tahun Sebelumnya																												
	4	3	2	1																									
5	>0,12	>0,16	>0,21	>0,25																									
4	0,09 - 0,12	0,13 - 0,16	0,17 - 0,20	0,21 - 0,24																									
3	0,05 - 0,08	0,09 - 0,12	0,13 - 0,16	0,17 - 0,20																									

		2	0,01 - 0,04	0,05 - 0,08	0,09 - 0,12	0,13 - 0,16								
		1	<0,01	<0,05	<0,09	<0,12								
EXTRAMILES Apabila capaian sesuai atau di atas target, capaian diakui 100% dan berhak atas kelebihan capaian. Kelebihan capaian dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian:														
<table><tr><th>Kriteria</th><th>Capaian</th></tr><tr><td>Matrat dikirim ke Kanwil DJPb 30 Hari Kalender sebelum batas waktu</td><td>50%</td></tr><tr><td>Matrat dikirim ke Kanwil DJPb 20 Hari Kalender sebelum batas waktu</td><td>30%</td></tr><tr><td>Matrat dikirim ke Kanwil DJPb 10 Hari Kalender sebelum batas waktu</td><td>10%</td></tr></table>							Kriteria	Capaian	Matrat dikirim ke Kanwil DJPb 30 Hari Kalender sebelum batas waktu	50%	Matrat dikirim ke Kanwil DJPb 20 Hari Kalender sebelum batas waktu	30%	Matrat dikirim ke Kanwil DJPb 10 Hari Kalender sebelum batas waktu	10%
Kriteria	Capaian													
Matrat dikirim ke Kanwil DJPb 30 Hari Kalender sebelum batas waktu	50%													
Matrat dikirim ke Kanwil DJPb 20 Hari Kalender sebelum batas waktu	30%													
Matrat dikirim ke Kanwil DJPb 10 Hari Kalender sebelum batas waktu	10%													
Target Indeks 3 Capaian = capaian indeks/target indeks Catatan: maksimum capaian kinerja untuk IKU ini adalah 150%.														
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk mendorong BP Batam terhadap capaian Maturiti Rating												
Satuan Pengukuran	:	Persentase (%)												
Jenis Konsolidasi Periode	:	Take Last Known (Akumulasi Januari s.d. Desember)												
Polarisasi Indikator Kinerja	:	Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)												
Periode Pelaporan	:	Quartal/Tahunan												
Sumber Data	:	Aplikasi BIOS dan Kertas Kerja Maturity Rating												

8. Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU

Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Pengelolaan Organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
Aspek Kinerja	:	Aspek Keuangan dan Tata Kelola
Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU
Deskripsi	:	Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU mendukung pengelolaan keuangan yang baik dan penyusunan perencanaan yang lebih akurat. Proyeksi pendapatan dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber pendapatan, melakukan analisis historis dan pasar, estimasi volum layanan, serta perkiraan pertumbuhan. Perhitungan capaian dilakukan dengan cara membandingkan angka rencana pengesahan atas pendapatan yang dilakukan setiap awal bulan dengan pendapatan yang sahkan sampai dengan akhir bulan berkenaan.

Formula	: Target Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU = 3,5.																				
	Indeks akurasi proyeksi pendapatan memperhitungkan sebagai berikut:																				
	1. Ketepatan Waktu Penyampaian (40%);																				
	2. Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan dan belanja (60%).																				
	1. Ketepatan Waktu Penyampaian:																				
	<table> <tr> <th colspan="2">Kriteria</th></tr> <tr> <td>Indeks 5</td><td>Data proyeksi pendapatan dikirim dan belanja kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan</td></tr> <tr> <td>Indeks 4,5</td><td>Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 4 bulan berkenaan</td></tr> <tr> <td>Indeks 4</td><td>Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 5 bulan berkenaan</td></tr> <tr> <td>Indeks 3,5</td><td>Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 6 bulan berkenaan</td></tr> <tr> <td>Indeks 3</td><td>Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 7 bulan berkenaan</td></tr> <tr> <td>Indeks 2,5</td><td>Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 8 bulan berkenaan</td></tr> <tr> <td>Indeks 2</td><td>Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 9 bulan berkenaan</td></tr> <tr> <td>Indeks 1,5</td><td>Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 10 bulan berkenaan</td></tr> <tr> <td>Indeks 1</td><td>Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 11 bulan berkenaan</td></tr> </table>	Kriteria		Indeks 5	Data proyeksi pendapatan dikirim dan belanja kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan	Indeks 4,5	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 4 bulan berkenaan	Indeks 4	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 5 bulan berkenaan	Indeks 3,5	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 6 bulan berkenaan	Indeks 3	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 7 bulan berkenaan	Indeks 2,5	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 8 bulan berkenaan	Indeks 2	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 9 bulan berkenaan	Indeks 1,5	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 10 bulan berkenaan	Indeks 1	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 11 bulan berkenaan
Kriteria																					
Indeks 5	Data proyeksi pendapatan dikirim dan belanja kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan																				
Indeks 4,5	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 4 bulan berkenaan																				
Indeks 4	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 5 bulan berkenaan																				
Indeks 3,5	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 6 bulan berkenaan																				
Indeks 3	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 7 bulan berkenaan																				
Indeks 2,5	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 8 bulan berkenaan																				
Indeks 2	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 9 bulan berkenaan																				
Indeks 1,5	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 10 bulan berkenaan																				
Indeks 1	Data proyeksi pendapatan dan belanja dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 11 bulan berkenaan																				
	2. Akurasi Proyeksi Pengesahan:																				
	<table> <tr> <th colspan="2">Kriteria</th></tr> <tr> <td>Indeks 5</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d. 3%</td></tr> <tr> <td>Indeks 4,5</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 3,01% s.d. 5%</td></tr> <tr> <td>Indeks 4</td><td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 5,01% s.d. 7%</td></tr> </table>	Kriteria		Indeks 5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d. 3%	Indeks 4,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 3,01% s.d. 5%	Indeks 4	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 5,01% s.d. 7%												
Kriteria																					
Indeks 5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d. 3%																				
Indeks 4,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 3,01% s.d. 5%																				
Indeks 4	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 5,01% s.d. 7%																				

		Indeks 3,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 7,01% s.d. 10%
		Indeks 3	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 10,1% s.d. 12,5%
		Indeks 2,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 12,51% s.d. 15%
		Indeks 2	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 15,01% s.d. 17,5%
		Indeks 1,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 17,51% s.d. 20%
		Indeks 1	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan lebih dari 20%
	IKU dihitung dengan rata-rata capaian setiap triwulan Bobot akhir indeksasi = 50% akurasi proyeksi pendapatan + 50% akurasi proyeksi belanja. Catatan: maksimum capaian kinerja untuk IKU ini adalah 150%.		
Tujuan	:	IKU ini dimaksud mengukur proyeksi pendapatan BLU dan pola pengesahan atas pendapatan tersebut dalam rangka mendukung peningkatan akurasi perencanaan kas pemerintah pada khususnya dan pengelolaan keuangan yang baik secara umum.	
Satuan Pengukuran	:	Persentase	
Jenis Konsolidasi Periode	:	Average	
Polarisasi Indikator Kinerja	:	Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)	
Periode Pelaporan	:	Triwulan	
Sumber Data	:	Biro Keuangan berupa Monitoring Penyampaian Proyeksi dan OMSPAN	

9. Rasio Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Aspek Kinerja	:	Aspek Keuangan dan Tata Kelola
Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang Perindustrian yang berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama	:	Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
Deskripsi	:	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional, untuk periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025. Pendapatan Operasional dalam indikator kinerja ini adalah seluruh pendapatan dalam Laporan Operasional dikurangi pendapatan dari APBN. Beban Operasional dalam indikator kinerja ini adalah seluruh beban dalam Laporan Operasional dikurangi dengan penyusutan dan amortisasi dan belanja penugasan dari K/L. Rata-rata 5 tahun terakhir adalah 1,13 untuk Tahun 2024 0,68.
Formula	:	$\text{Rasio BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$ Catatan: maksimum capaian kinerja untuk IKU ini adalah 150%.
Tujuan	:	IKU ini dimaksudkan untuk seberapa besar kemampuan BLU dalam mengelola beban operasional. Semakin besar nilai rasio BOPO pada BLU maka menunjukkan semakin tidak efisien manajemen BLU dalam mengelola beban operasional layanannya Selain itu juga untuk memacu Pemimpin BLU agar meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan BLU dan meningkatkan <i>cost effectiveness</i> dan <i>cost efficiency</i> sehingga kegiatan dapat dibiayai dari PNPB.
Satuan Pengukuran	:	Persentase (%)
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Laporan Keuangan (Laporan Operasional) dan Data Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BP BATAM